MAJU MUNDUR ATURAN IMPOR GULA

KONTROVERSI IZIN PRAKTEK DOKTER ASING

TEMPO

ENAK DIBACA DAN PERLU

SETELAH RIZIEQ KEMBALI

Hampir empat tahun mengungsi ke Arab Saudi, Rizieq Syihab akhirnya kembali. Intelijen diduga ikut bermain.



16-22 NOVEMBER 2020
RP 45.000
WWW.TEMPO.CO
MAJALAH BERITA MINGGUAN
ISSN: 0126 - 4273

00039
9 770126 427302

Klarifikasi Politikus NasDem, Ahmad Ali, soal Kisruh Impor Buah



Surat

Klarifikasi Ahmad Ali

SETELAH membaca laporan utama majalah *Tempo* edisi 2-8 November 2020 tentang "Jatah Preman Buah Impor", ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi.

Artikel berjudul "Jalan Tol Impor Buah", "Dua NasDem di Pusaran Impor Buah", "Para Pengimpor yang Istimewa", dan "Tiga Faksi NasDem dan Perselisihannya" yang menyebutkan keterlibatan Ahmad Ali dalam pengaturan kuota impor buah adalah tudingan yang berlebihan dan merugikan nama baik saya secara serius. Majalah *Tempo* seperti membangun sebuah cerita untuk mengarahkan opini publik bahwa persoalan impor buah bermasalah dan ada praktik korupsi berupa pungutan liar yang melibatkan saya sebagai kolega Menteri Pertanian di Partai NasDem. Seluruh pemberitaan dalam laporan utama itu jelas tidak benar karena tuduhan tersebut berdasar pada pengakuan satu-dua orang yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya.

Framing majalah *Tempo* terasa makin aneh dan janggal ketika majalah ini menyebutkan beberapa masalah personal yang tidak relevan dengan substansi berita. Pemberitaan tentang surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dihubungkan dengan persoalan hukuman pelanggaran psikotropika pada 2018 jelas bukan persoalan yang relevan dalam substansi laporan utama dan berpotensi pada upaya pembunuhan karakter yang serius. Apalagi fakta masalah personal yang ditulis *Tempo* tidak akurat karena persoalan pelanggaran psikotropika tersebut terjadi pada 2003 atau 17 tahun yang lalu, bukan pada 2018, seperti cerita yang diarahkan dalam majalah *Tempo*. Sebagai catatan, saya sudah menulis secara terbuka terkait dengan masalah ini di laman Facebook saya pada 13 September 2018. Jadi sekali lagi, menurut saya, upaya personalisasi masalah tersebut adalah tindakan yang berlebihan.

Terkait dengan tuduhan pengaturan kuota impor buah, dengan ini saya menyatakan bahwa saya sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah terlibat dalam kebijakan impor buah di Kementerian Pertanian ataupun di Kementerian Perdagangan. Informasi yang diberitakan *Tempo* tentang pertemuan dengan salah satu importir yang melibatkan saya di Pacific Place sama sekali tidak pernah terjadi dan tidak benar. Tak ada sekali pun pertemuan antara saya dan para importir buah, baik di Pacific Place maupun di tempat lain.

Majalah *Tempo* juga menyebutkan telah menghubungi Ahmad Ali tapi tidak direspons. Dalam beberapa minggu ini, saya betul-betul sedang banyak kegiatan di daerah pemilihan dalam rangka reses, sehingga belum bisa merespons secara khusus majalah *Tempo*. Jadwal reses saya tersebar di banyak daerah di Sulawesi Tengah dan berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain yang berjarak hingga 500-an kilometer. Sering kali sinyal bermasalah. Ada rencana untuk menjawab majalah *Tempo* setelah selesai reses dalam bentuk wawancara secara langsung. Saya sangat menyesalkan majalah *Tempo* mempublikasikan berita tersebut sebelum mendapat konfirmasi dari saya.

Ahmad M. Ali
Jakarta

Seperti ditulis dalam artikel tersebut, penyalahgunaan psikotropika merupakan cerita pada 2018 ketika Anda mendapatkan SKCK untuk menjadi calon anggota legislatif yang tak mencantumkan kejadian pada 2003.

Harga Gas Alam

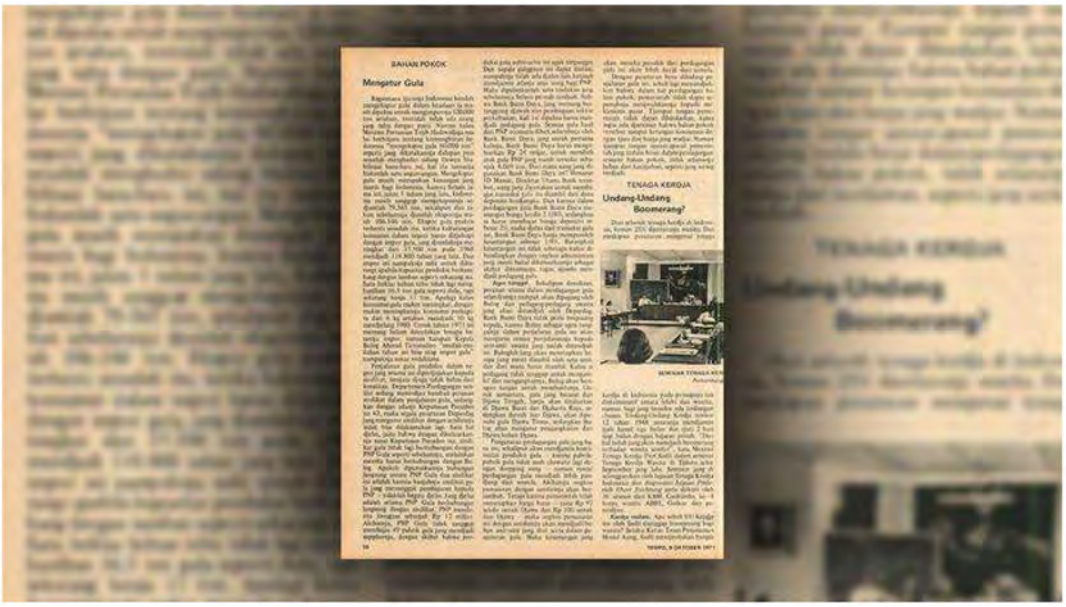
KAMI, pelaku industri keramik di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, telah memakai gas alam dari Perusahaan Gas Negara selama hampir 40 tahun. Setelah berharap sekian lama realisasi dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Nomor 89 pada April 2020 tentang penurunan harga gas untuk tujuh sektor industri, termasuk industri keramik, tapi harapan kami sampai surat ini dirilis masih belum juga terealisasi.

Kami mohon rasa keadilan bagi sesama pelaku industri keramik untuk mendapatkan hak-hak kami sebagai pelanggan setia PGN. Saya berharap pihak-pihak yang memutuskan penyesuaian harga gas alam mengakomodasi permohonan ini.

Fendy Yudha
Direktur Utama PT Terra Cotta Indonesia Cirebon

Impor

Pemerintah Indonesia Bermimpi Ekspor Gula



BAHAN POKOK

Mengatur Gula

TENAGA KERJA

Undang-Undang Boomerang?

PENGUSAHA pengolah gula mentah untuk industri makanan dan minuman ketar-ketir karena pasokan yang kian menipis. Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia Bernardi Dharmawan mengatakan realisasi impor untuk semester II pada tahun ini hanya cukup untuk produksi hingga akhir tahun saja. “Beberapa anggota malah melaporkan stok bahan bakunya sudah habis awal Desember,” katanya.

Sengkarut impor gula bukan hal baru di republik ini. Pada 1971, tahun majalah ini lahir, polemik impor gula telah mengemuka. Lewat laporan berjudul “Mengatur Gula” yang terbit pada 9 Oktober 1971, *Tempo* menulis tentang rencana pemerintah mengekspor gula di tengah angka impor yang tinggi. Saat itu, kebutuhan impor gula dalam negeri berada di kisaran 120 ribu ton.

Tonggak impor gula Indonesia muncul pada 1968. Saat itu pasokan gula tebu dari petani tak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Akibatnya, pemerintah terpaksa membuka keran impor sebesar 37.500 ton. Jumlah ini terus meroket menjadi 118 ribu ton pada 1970.

Padahal Indonesia tercatat sebagai salah satu pengekspor gula pada 1960-an. *Tempo* mencatat ekspor gula Indonesia sebesar 106.146 ton pada 1964 dan 97.565 ton dua tahun setelahnya. Tapi ekspor gula berhenti pada 1968. Dengan segera Indonesia berubah menjadi negara pengimpor gula.

Angan-angan kembali menjadi negara pengekspor gula dikemukakan oleh Menteri Pertanian Tojib Hadiwidjaja. Dalam sidang Dewan Stabilisasi pada akhir September 1971, ia memaparkan kemungkinan Indonesia mengekspor 80 ribu ton per tahun.

Tapi banyak pihak berpendapat bahwa angan-angan Tojib ini seperti mimpi di siang bolong. Sebab, jumlah produksi tebu tak kunjung berkembang signifikan jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan konsumsi gula. Bahkan di beberapa daerah terus terjadi penyusutan panen. Satu hektare kebun tebu yang biasanya bisa menghasilkan 16,5 ton gula kini hanya memproduksi 11 ton. Sedangkan konsumsi per kapita meningkat dari 6 kilogram menjadi 10 kilogram.

Kusutnya pengaturan gula berimbas pada pola distribusi hingga pembiayaan. Adanya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 43 Tahun 1971 yang mengatur peran sindikat dalam penyaluran gula memutus mata rantai distribusi antara sindikat gula dan Perusahaan Negara Perkebunan Gula (PNP Gula) yang telah terbangun mapan. Sindikat harus berhubungan dengan Badan Urusan Logistik dalam rantai distribusi terbaru ini.

Aturan dalam kepres tersebut menyebut Bulog sebagai satu-satunya lembaga yang dapat mendistribusikan dan memasarkan gula konsumsi di Indonesia. Kepala Bulog Ahmad Tirtosudiro mengatakan kebijakan ini dirancang untuk mengembalikan kekuatan produksi gula dalam negeri. “Mudah-mudahan tahun ini bisa setop impor gula,” ujarnya.

Kemunculan kepres ini dilatarbelakangi banyaknya sindikat gula yang menunggak pembayaran kepada PNP Gula hingga menimbulkan kerugian sebesar Rp 1 miliar. Akibatnya, PNP Gula tidak sanggup membayar tagihan dari 49 pabrik gula yang menjadi penyuplainya. Agar pampatnya pembayaran ini tak mengganggu produksi gula, pemerintah mengambil langkah radikal. Bank Bumi Daya (BBD), yang menjadi penanggung jawab atas pembiayaan sektor perkebunan, dipaksa menjadi pedagang gula.

Pemerintah menekan BBD agar membeli semua gula dari PNP, yang jumlahnya sebanyak 4.000 ton, dengan biaya Rp 24 miliar. Direktur Utama BBD J.D. Massie mengatakan uang untuk membeli semua gula itu berasal dari deposito berjangka. Gula-gula itu lalu diserahkan kepada Bulog sebagai agen tunggal dalam skema perdagangan gula terbaru ini. Bulog yang akan menentukan kepada siapa gula-gula ini akan mendarat sebelum sampai ke meja konsumen.

Ahmad mengatakan Bulog membatasi distribusi per regional untuk menjamin ketersediaan pasokan yang merata. Gula dari Jawa Tengah, misalnya, hanya didistribusikan sampai area Jawa Barat dan Jakarta. Sedangkan pasokan gula untuk luar Jawa akan diambil dari Jawa Timur. Pemerintah juga menetapkan

harga batas atas untuk menjamin harga tetap terjangkau, yaitu Rp 92 per kilogram untuk area Jawa dan Rp 100 untuk luar Jawa.

Impor Gula Gula Pasir Industri Gula

Editorial: Rizieq Syihab dan Kesalahan Strategi Pemerintah



Salah Langkah Hadapi Rizieq

PERGI sebagai tersangka, Muhammad Rizieq bin Hussein Syihab kembali ke Indonesia pada Selasa, 10 November lalu, dengan dielu-elukan bak pahlawan. Melambungnya pamor politik Rizieq tak lepas dari kesalahan strategi pemerintah dalam menghadapi provokasi iliberal dan intoleran pentolan Front Pembela Islam ini.

Bagi pendukungnya, masa pelarian Rizieq selama tiga tahun tujuh bulan di Arab Saudi justru menambah ketokohannya. Dia menjadi magnet politik baru. Puluhan ribu orang berduyun-duyun menuju Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, untuk menjemputnya. Aparat gagal mengantisipasi kerepotan khalayak akibat kedatangan Rizieq. Publik dirugikan dengan lumpuhnya akses menuju bandara selama beberapa jam.

Pemerintah mengaku sengaja menyiapkan pengamanan ala kadarnya untuk menghindari kesan konfrontatif. Sejumlah pejabat bahkan mengklaim kepulangan Rizieq akan membawa ketenangan untuk politik Indonesia. Itu jelas pernyataan dan dalih yang mengada-ada. Posisi tawar Rizieq yang lebih besar dengan keberadaannya di Jakarta justru bakal lebih merepotkan pemerintah dan memancing keributan baru.

Sejak awal kemunculannya dalam panggung politik Indonesia, Rizieq memang dibesarkan oleh ambiguitas politik dan hukum di negeri ini. Ketika dia mendirikan Front Pembela Islam (FPI) pada Agustus 1998, kita tahu sejumlah perwira tinggi polisi dan militer ikut berperan. Pada masa-masa ketika kekuasaan Orde Baru dan Presiden Soeharto baru saja tumbang, berbagai dokumen yang belakangan terungkap menunjukkan manuver elite militer dan polisi memanfaatkan FPI dalam intrik-intrik kekuasaan.

Tahun bergulir, pemerintahan berganti, dan FPI terkesan dibiarkan terus melebarkan jejaringnya. Sayap militer FPI yang dinamakan Laskar Pembela Islam leluasa merazia tempat-tempat yang disebut sebagai “sumber maksiat”. Dengan seragam ala tentara berwarna putih, kelompok ini menjadi alat penekan efektif untuk berbagai kepentingan. Baru pada Juni 2008, ketika FPI menyerang aksi damai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Monumen Nasional, Jakarta, polisi turun tangan. Rizieq Syihab pun menjalani hukuman satu setengah tahun penjara.

Sayangnya, ketegasan pemerintah mengambil pendekatan hukum tak berlanjut. Di era Presiden Joko Widodo, strategi keamanan yang diterapkan justru mengedepankan pendekatan politik. Polisi menyerah ketika Rizieq, bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, memaksa pemerintah menjerat Gubernur DKI Jakarta (ketika itu) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan tuduhan mencemarkan agama Islam. Kejaksaan Agung bahkan menghadirkan Rizieq sebagai saksi ahli dalam perkara Basuki. Setelah Ahok divonis dua tahun penjara, atas nama keseimbangan, polisi kemudian bergerak mempidanakan Rizieq.

Ketika hukum bergerak dengan bandul politik, yang terjadi adalah absurditas. Rizieq dibidik dengan tujuh kasus berbeda, dari dugaan percakapan mesum, penghinaan Pancasila, hasutan kebencian, hingga penghinaan suku. Pada April 2017, Rizieq "dibiarkan" terbang ke Arab Saudi. Sebulan kemudian, dalam pelariannya, Rizieq dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Pornografi.

Terbukti kepolisian tak pernah berusaha mengejar pria 55 tahun itu. Aparat intelijen sampai tokoh politik bergantian menemuinya di Mekah dan tak satu pun yang membawanya pulang. Setahun kemudian, pada Juni 2018, polisi menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. Kelihatan betul, hukum dijalankan untuk tujuan politis.

Rizieq menemukan panggungnya ketika pemerintah bersikap mendua. Di satu sisi, pemerintah berkampanye soal pluralisme, upaya menghadang intoleransi dan

radikalisme Islam. Namun, di sisi lain, pemerintah tak bersikap konsisten menegakkan hukum dalam banyak kasus intoleransi. Atas nama politik akomodasi dan keseimbangan, Presiden Jokowi malah memilih Ma'ruf Amin, tokoh sentral dalam gerakan menjerat Ahok, sebagai wakil presiden dan membiarkan polisi tak meneruskan kasus Rizieq.

Politik dua muka seperti ini secara tidak langsung justru menyuburkan intoleransi —hal yang oleh Jokowi dan kabinetnya hendak diperangi—dan sekaligus meningkatkan popularitas Rizieq.

Mengatasi gerakan iliberal berwajah populisme agama memerlukan kebijakan publik yang jelas. Basisnya adalah kesetaraan semua orang di depan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia. Permainan politik dan hukum yang dilakukan pemerintah pasti kontraproduktif karena justru menyediakan lapangan simpati bagi tokoh seperti Rizieq. Makin populernya Rizieq kini adalah harga yang harus dibayar pemerintah Jokowi.

Rizieq Syihab Front Pembela Islam | FPI

Editorial: Apa Guna Menolak Dokter Asing? -



Jangan Takut Dokter Asing

IKATAN Dokter Indonesia (IDI) semestinya tidak cemas terhadap rencana pemerintah membuka pintu bagi dokter asing. Kehadiran dokter dari negeri seberang tak hanya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, tapi juga mengembangkan dunia kedokteran dalam negeri.

Kehadiran dokter asing tak mungkin ditolak karena Indonesia telah menandatangani perjanjian multilateral dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang melonggarkan pintu masuk barang dan jasa mulai 2025. Undang-Undang Cipta Kerja juga telah melonggarkan persyaratan tenaga kerja asing, termasuk dokter, untuk bekerja di sini.

Meski sebarannya tak merata, IDI menyatakan 180 ribu dokter yang ada saat ini sudahlah cukup. Sebaliknya, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)—lembaga yang menerbitkan surat tanda registrasi praktik dokter—mendukung rencana pemerintah itu.

Jika menggunakan Undang-Undang Praktik Kedokteran, dokter lulusan luar negeri harus menempuh jalur berliku untuk dapat bekerja di rumah sakit

domestik. Untuk mendapatkan izin praktik, seorang dokter membutuhkan waktu lebih dari satu tahun. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat secepatnya perlu merevisi aturan itu.

Klaim IDI soal cukupnya jumlah dokter bisa diperdebatkan. Berdasarkan data KKI, rasio dokter di Indonesia adalah 4,27 per 10 ribu penduduk. Adapun dokter spesialis 1,46 per 10 ribu penduduk. Kondisi itu jauh tertinggal dibanding Singapura, yang memiliki 22,94 dokter per 10 ribu penduduk. KKI pun menyatakan Indonesia menghadapi ancaman kekurangan 100 ribu dokter pada 2030. Di tengah ancaman pandemi, penambahan dokter, termasuk dokter spesialis, sangat dibutuhkan.

Penolakan IDI bisa dibaca sebagai upaya organisasi itu melindungi dokter lokal agar tak tergilas oleh dokter asing. Anggota IDI seharusnya tak perlu khawatir berkompetisi dengan dokter asing. Tak ada jalan menghadapi kompetisi itu selain meningkatkan pengetahuan dan pelayanan.

Persepsi negatif terhadap kualitas dokter Indonesia telah membuat sejumlah orang memilih berobat ke luar negeri. Menurut riset Indonesia Services Dialogue, lebih dari Rp 100 triliun setiap tahun dihabiskan orang Indonesia untuk berobat ke mancanegara. IDI tak perlu menjadi bunker bagi sebagian dokter yang inkompeten atau yang telah melakukan malapraktik.

Pemerintah harus menjamin kualitas dokter asing yang membuka praktik di sini. Konsil Kedokteran bisa menelusuri rekam jejak mereka sebelum menerbitkan izin. Pemerintah harus memastikan dokter asing tak hanya bekerja untuk kalangan berduit, tapi juga melayani masyarakat bawah. Mereka pun harus diwajibkan mentransfer pengetahuannya kepada dokter lokal, termasuk dengan memaksa mereka melakukan pelayanan sosial atau mengajar di kampus-kampus dalam negeri.

Pemerintah harus segera membenahi karut-marut pendidikan kedokteran, termasuk persoalan biaya kuliah yang mahal. Dengan biaya yang tinggi, lulusan kedokteran didorong hanya akan mencari keuntungan setelah lulus. Yang kerap terjadi: mereka berkongkalikong dengan perusahaan farmasi dalam menuliskan resep.

Kehadiran dokter asing dapat memaksa dunia kedokteran memperbaiki diri. Analoginya seperti Pertamina yang memperbaiki tempat penjualan bahan bakar minyak setelah perusahaan asing diizinkan masuk. Pompa-pompa bensin yang dulu busuk kini nyaman dan memberi pelayanan yang baik.

Editorial: Simpang-Siur Kebijakan Baru soal Impor Gula



Maju-Mundur Pangkas Rente

SIMPANG-siur soal prosedur impor gula rafinasi untuk kebutuhan industri harus segera diakhiri. Kalau tidak, pasokan gula untuk produksi makanan dan minuman bisa terhambat dan harganya terus naik tak terkendali. Pemerintah seharusnya memastikan bahwa skema impor berorientasi pada efisiensi dan pengurangan biaya produksi, bukannya membuka lebar-lebar peluang masuknya pemburu rente dalam pengadaan komoditas strategis ini.

Rapat kabinet terbatas tentang importasi gula dan garam khusus industri pada awal Oktober 2020 sudah menelurkan keputusan yang tepat. Ketika itu, seperti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seusai rapat, pemerintah mengizinkan industri makanan dan industri yang membutuhkan garam atau gula industri mengimpor secara langsung. Selama ini, industri makanan dan minuman harus menanti pasokan bahan baku dari industri gula rafinasi yang memegang izin impor dan kuota sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020.

Ada beberapa masalah dalam skema impor yang saat ini berlaku. Pertama, terjadi inefisiensi karena importir atau pabrik gula rafinasi pada kenyataannya hanya menjadi broker. Nilai tambah berupa pengolahan gula mentah menjadi gula rafinasi tak sebanding dengan tambahan biaya yang harus ditanggung industri makanan dan minuman akibat rantai pasok yang memanjang.

Apalagi tak semua pabrik gula rafinasi serius memenuhi kewajibannya membuka kebun tebu sendiri. Cita-cita membangun basis produksi gula yang kelak bisa swasembada hanya kedok untuk mempertahankan rente di industri gula rafinasi.

Bukti kegagalan ini terjadi pada Januari lalu. Ketika itu, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia mengeluhkan stok gula rafinasi menipis akibat keterlambatan impor. Produksi empat pabrik makanan dan minuman sampai berhenti karena kehabisan gula.

Kedua, ada masalah dalam penentuan kuota impor gula. Karena pemerintah tak memiliki basis data yang valid, kuota tak pernah benar-benar mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pabrik makanan dan minuman, kebutuhan konsumen langsung di pasar, dan kepentingan petani. Kuota impor yang berlebih, kerap dipicu lobi-lobi importir, menyebabkan gula rafinasi impor merembes ke pasar eceran. Selain menjatuhkan harga gula petani, ini jelas merugikan konsumen karena gula kristal murni tersebut tak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi langsung.

Sayangnya, keputusan rapat kabinet terbatas itu kini dimentahkan oleh pembahasan di level Kementerian Perindustrian. Beredar kabar bahwa kementerian tetap akan mempertahankan skema impor seperti sekarang. Bedanya, importir bakal dibatasi hanya pemain lama di industri gula rafinasi. Selain itu, pemerintah berjanji menerbitkan izin dan kuota tepat waktu agar pasokan gula buat industri makanan dan minuman tak sampai seret. Jika benar, rancangan keputusan ini dikhawatirkan bakal mendorong oligopoli impor gula. Kita tahu industri gula rafinasi di negeri ini sebenarnya dikuasai segelintir pengusaha besar saja.

Rencana pemerintah memperbaiki tata niaga gula dengan mengizinkan impor langsung oleh industri makanan dan minuman tak boleh goyah hanya karena lobi-lobi importir gula rafinasi. Konsumen tidak boleh dipaksa membayar harga lebih mahal akibat rantai pasokan yang sengaja dibuat panjang. Dalam jangka panjang, kebijakan bagi-bagi rezeki semacam ini tak akan menghasilkan industri nasional yang kompetitif.

Editorial : Sok Kalem Menghadapi Resesi



Sok Kalem Menghadapi Resesi

MENGHADAPI ekonomi yang didera resesi, pemerintah harus memiliki langkah strategis. Resesi jelas bukan kabar baik dan fakta itu tidak boleh ditutup-tutupi dengan retorika "ekonomi sudah mulai membaik"—semata untuk menenangkan pasar dan orang ramai.

Resesi terjadi setelah dua kuartal berturut-turut ekonomi Indonesia tumbuh negatif. Pada kuartal ketiga tahun ini, seperti diumumkan Badan Pusat Statistik 5 November lalu, pertumbuhan minus 3,49 persen. Kuartal sebelumnya negatif 5,32 persen.

Seperti terjadi di banyak negara, resesi Indonesia terjadi akibat wabah Covid-19. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menjaga kesehatan masyarakat tak terhindarkan membawa dampak buruk bagi ekonomi nasional. Orang-orang mengurangi konsumsi, permintaan barang dan jasa terjun bebas, perusahaan tutup, pemutusan hubungan kerja terjadi, daya beli masyarakat merosot, perusahaan yang masih bertahan satu per satu berguguran—lingkaran setan yang tak terhindarkan.

Meski sinyal resesi sudah tampak sebelum kuartal kedua 2020, masih ada pejabat yang menganggap peringatan akan bahaya resesi hanya paranoia. Ada pula yang sok *cool*: setelah ekonomi babak-belur, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada awal November lalu mengatakan Indonesia sudah mulai keluar dari resesi.

Pertumbuhan negatif ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga memang lebih baik dibanding kuartal sebelumnya. Tapi terlalu dini untuk mengatakan kita telah keluar dari kubangan krisis. Hendaknya diingat: semangat membangun optimisme memang diperlukan, tapi itu tidak berarti kita boleh membohongi diri sendiri. Penyangkalan bisa menyebabkan pemerintah dan publik lengah.

Pemerintah hendaknya segera menyusun strategi penyelamatan. Karena resesi dipicu oleh turunnya angka konsumsi, beleid pemerintah haruslah diarahkan pada upaya mendongkrak daya beli masyarakat. Alih-alih membantu rakyat dengan program Kartu Prakerja—yang terbukti hanya menguntungkan penyelenggara kegiatan—pemerintah hendaknya memperbanyak bantuan langsung tunai. Bantuan berupa barang, misalnya aksi bagi-bagi bahan kebutuhan pokok, terbukti juga tak efektif, bahkan hanya menguntungkan produsen penyedia bahan pokok.

Pemerintah perlu meninjau skala prioritas alokasi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 yang disahkan pada 29 September 2020 mematok belanja Rp 2.750 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp 2.540,4 triliun. Target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5 persen hanyalah sedikit lebih rendah dari tahun lalu, yang 5,3 persen. Sebuah fakta yang tak bisa ditolak: dalam lima tahun terakhir, target pertumbuhan ekonomi pemerintah meleset dari rencana.

Di saat krisis, penetapan target yang kelewat tinggi bisa kontraproduktif. Soalnya pertumbuhan membutuhkan modal dan modal membutuhkan pemasukan. Pemasukan yang didapat dari utang pada gilirannya akan kembali membebani anggaran di masa depan. Dalam APBN 2021, defisit ditetapkan 1.006,37 triliun atau 5,7 persen dari produk domestik bruto. Selama ini APBN kita, bahkan sebelum Covid-19, ditutup dengan pinjaman.

Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis krisis bisa segera diatasi. Pada kuartal IV tahun ini, menurut Menteri Keuangan, pemerintah akan mempercepat realisasi belanja negara di pusat dan daerah, yang nilainya Rp 1.200 triliun. Pemerintah juga berharap vaksin yang segera datang bisa memicu perbaikan ekonomi.

Meski tak buruk, optimisme Menteri Keuangan patut diwaspadai, terutama perihal target realisasi belanja negara. Yang selama ini terjadi, penyerapan anggaran terseok-seok, akibat birokrasi yang tak efektif dan koordinasi antarlembaga yang jelek.

Harapan pada vaksin untuk mengatasi pandemi hendaknya tidak berlebihan dilambungkan. Para epidemiolog telah mengingatkan: meski nanti tersedia, vaksin Covid-19 tidak akan serta-merta menghapus wabah.

Dengan kata lain: jalan masih terjal. Ekonomi tidak akan segera pulih terutama jika pemerintah kehilangan fokus dan kebijakan tak henti dirongrong kepentingan jangka pendek segelintir orang.

Resesi Krisis Ekonomi Krisis Ekonomi Indonesia

Cawe-cawe BIN dalam Kepulangan Rizieq Syihab dan Kesalahan Analisis Intelijen



Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab menyapa simpatisannya saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, 10 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

- **Intelijen diduga salah menganalisis jumlah massa penjemput Rizieq Syihab. .**
- **Kepala BIN Budi Gunawan disebut pernah bertemu dengan Rizieq Syihab di Mekah. 21657**
- **BIN juga ditengarai mengirimkan utusan untuk membicarakan persyaratan kepulangan Rizieq. .**

MENGUMPULKAN sejumlah menteri di kantornya pada Senin, 9 November lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Mahmoddin memimpin rapat yang hanya memiliki satu agenda, yaitu sikap pemerintah menghadapi kepulangan pentolan Front Pembela Islam, Muhammad Rizieq bin Hussein Syihab, dari Arab Saudi.

Hadir dalam pertemuan itu Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Hadi Tjahjanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Mahfud menuturkan, kesimpulan dari rapat tersebut adalah membiarkan Rizieq pulang dan dijemput oleh para pendukungnya. "Pengamanan dilakukan secara biasa dan tak boleh represif," ujarnya pada Selasa, 10 November lalu.

Seorang pejabat yang mengetahui isi pertemuan tersebut bercerita, rapat itu digelar setelah pemerintah mendapatkan informasi bahwa Rizieq benar-benar akan pulang ke Indonesia. Sebelumnya, sejumlah pejabat bidang politik, hukum, dan keamanan menerima informasi bahwa Rizieq belum bisa pulang setelah lebih dari tiga setengah tahun tinggal di Saudi. Kalaupun pulang, Rizieq dianggap dideportasi oleh pemerintah Saudi.



Massa dari berbagai daerah memadati akses tol guna menjemput Imam Besar FPI Rizieq Shihab di Tangerang, Banten, 10 November 2020. ANTARA/Muhammad Iqbal

Awal November lalu, Mahfud juga menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri. Pejabat yang mengetahui pertemuan tersebut mengatakan Mahfud meminta penegak hukum tak mencari-cari kesalahan Rizieq agar tidak menimbulkan kegaduhan atau membesarkan sosok Rizieq. Pemerintah tak ingin ada aksi massa yang lebih banyak setelah demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, jika memang ada masalah hukum, Mahfud mempersilakan penegak hukum bergerak.

Kepulangan Rizieq juga dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Istana pada awal November lalu. Menurut dua pejabat pemerintah yang mengetahui isi pertemuan itu, Badan Intelijen Negara menyampaikan bahwa massa penjemput Rizieq hanya sekitar 10 ribu orang. Prediksi itu meleset jauh. Mengacu pada pengecekan secara

online melalui situs *mapchecking.com*, untuk penjemput Rizieq di Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, dengan luas 25.669 meter persegi, diperkirakan ada 51 ribu orang. Jumlah itu belum termasuk massa yang berada di jalan tol menuju bandara sepanjang 7 kilometer. Kemacetan panjang terjadi berjam-jam dan 118 penerbangan tertunda.

Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto tak memberikan tanggapan soal isi rapat tersebut. Hingga Sabtu, 14 November lalu, ia tak mengangkat panggilan telepon dan tak membalas permintaan wawancara yang dilayangkan *Tempo*.

•••

BERSAMA sepuluh anggota keluarganya, Rizieq Syihab pergi umrah dan menginjakkan kaki di Arab Saudi pada 26 April 2017. Ia pergi dengan menyandang status tersangka kasus penodaan Pancasila sejak akhir Januari tahun itu. Adalah putri mantan presiden Sukarno, Sukmawati Soekarnoputri, yang melaporkan Rizieq pada Oktober 2016 saat dia membicarakan sila ketuhanan. Pada akhir Januari itu pula beredar salinan percakapan bernada mesum yang diduga terjadi antara Rizieq dan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein. Rizieq menyatakan percakapan itu merupakan fitnah.

Muchsin Alatas dari Dewan Pembina Majelis Syuro Front Pembela Islam mengatakan Rizieq pergi ke Saudi karena khawatir dibunuh. Muchsin mengklaim mendapat pesan dari seorang petinggi intelijen pada sekitar pertengahan April 2017. Isinya, mewanti-wanti keselamatan Rizieq. “Habib Rizieq bisa dihilangkan nyawanya kalau terus ada di Indonesia,” tutur Muchsin kepada *Tempo*, Rabu, 11 November lalu.

TEMPO.CO

TUMPUKAN PERKARA IMAM BESAR

SEKITAR 44 bulan meninggalkan Indonesia, Muhammad Rizieq Syihab pulang kampung. Pergi ke Arab Saudi dengan menyandang status tersangka, Imam Besar Front Pembela Islam itu kembali tanpa memiliki persoalan hukum. Sejumlah kasus yang melibatkan Rizieq tak jelas penyelesaiannya.



Rizieq Syihab saat akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Februari 2017.
Dok TEMPO/Dian Triyuli Handoko

NASKAH:
PRAMONO
SUMBER:
ARSIP MAJALAH TEMPO, TEMPO.CO

2016

27 OKTOBER
Putri Sukarno, Sukmawati Soekarnoputri, melaporkan Rizieq Syihab ke polisi karena dianggap menghina Pancasila.

2017

29 JANUARI
Beredar percakapan bernada mesum yang diduga terjalin antara Rizieq dan Firza Husein.

30 JANUARI
Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan Rizieq sebagai tersangka kasus penodaan Pancasila.

26 APRIL
Rizieq tiba di Arab Saudi.

12 MEI
Rizieq pergi ke Malaysia untuk mengurus sidang doktoralnya.

29 MEI
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menetapkan Rizieq sebagai tersangka kasus konten porno.

12 JUNI
Rizieq pertama kali dikabarkan akan kembali ke Indonesia.

2 DESEMBER
Muncul kabar kepulangan Rizieq untuk menghadiri reuni aksi 212. Namun dia gagal pulang.

2018

23-28 JUNI
Rizieq merayakan Lebaran di Yaman bersama istri dan anaknya.

4 MEI
Polda Jawa Barat menghentikan penyidikan kasus penodaan Pancasila.

17 JUNI
Polisi mengumumkan penghentian kasus konten porno.

2020

4 NOVEMBER
Rizieq mengumumkan rencana kepulangannya.

9 NOVEMBER
Rizieq terbang dari Arab Saudi.

10 NOVEMBER
Rizieq tiba di Jakarta.

KASUS

• DUGAAN KASUS PERCAKAPAN MESUM DENGAN FIRZA HUSEIN
Rizieq Syihab sempat menjadi tersangka dalam kasus percakapan mesum dengan Firza Husein. Belakangan, polisi menghentikan penyidikan kasus tersebut.

• SALAM SAMPURASUN
Awal Januari 2017, Aliansi Masyarakat Sunda melaporkan Rizieq ke Polda Jawa Barat. Rizieq dituding memelesetkan salam khas Sunda, "sampurasun", menjadi "campur racun" saat berceramah di Purwakarta pada 13 November 2015.

• DUGAAN PELECEHAN PANCASILA DAN SUKARNO
Putri mantan presiden Sukarno, Sukmawati Soekarnoputri, mengadukan Rizieq karena dianggap menodai Pancasila dan menghina Sukarno dalam video ceramah yang viral.

• DUGAAN PENODAAN AGAMA
Pada 26 Desember 2016, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia melaporkan Rizieq karena dianggap melecehkan umat kristiani.

• DUGAAN KEBENCIAN DAN MEMECAH BELAH PERSATUAN
Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama melaporkan Rizieq ke Polda Metro Jaya pada 30 Desember 2016 karena dinilai memecah belah persatuan dan kesatuan negara serta menimbulkan rasa benci kepada sesama.

• KASUS DUIT BERLOGO PALU-ARIT
Jaringan Intelektual Muda Anti-Fitnah melaporkan Rizieq ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2017. Penyebabnya, Rizieq dalam ceramahnya menyebutkan mata uang baru berlogo "palu-arit".

• KASUS TANAH MEGAMENDUNG
Pada Januari 2017, Kepala Polda Jawa Barat saat itu, Inspektur Jenderal Anton Charliyan, mengatakan Rizieq diduga terkait dengan penyerobotan lahan dan pemilikan tanah negara tanpa hak. Tanah itu berada di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, dekat dengan rumah Rizieq.

VONIS

● 11 AGUSTUS 2003
Rizieq Syihab divonis tujuh bulan penjara karena dianggap melakukan penghasutan serta menyebarkan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap pemerintah. Pada 5 Mei 2000, Rizieq sebagai Ketua Front Pembela Islam mengeluarkan surat instruksi agar semua anggota organisasi itu menutup dan memusnahkan tempat maksiat.

● 30 OKTOBER 2008
Rizieq divonis satu setengah tahun penjara karena dianggap menganjurkan orang lain melakukan kekerasan dalam kasus penyerangan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Monumen Nasional, Jakarta, pada 1 Juni 2008.

TAMU

Di Arab Saudi, aktivitas politik Rizieq Syihab tak pernah berhenti. Dia kerap menerima tamu dari Tanah Air. Tak hanya dari kubu penentang pemerintah, tetamunya juga merupakan pejabat dan politikus pendukung pemerintah.

BUDI GUNAWAN

- Kepala Badan Intelijen Negara ini disebut bertemu dengan Rizieq di Arab Saudi untuk membicarakan soal rencana penghentian perkara.
- Budi Gunawan juga disebut mengirim sejumlah utusan untuk melobi Rizieq.
- Staf intelijen diduga bertemu dengan Rizieq untuk membicarakan rencana kepulangannya dengan syarat tak lagi membuat kegaduhan.

"Jawaban Pak BG (Budi Gunawan) adalah tidak betul dan tidak pernah terjadi."

Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN **Wawan Hari Purwanto**



Budi Gunawan.
TEMPO/M Taufan Rengganis



Tito Karnavian.
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

TITO KARNAVIAN

- Saat menjabat Kepala Kepolisian RI, Tito disebut menemui Rizieq pada Agustus 2017. Pertemuan itu membahas perkara yang menjerat Rizieq.

"Pak Kapolri tidak pernah ketemu Rizieq Syihab di Arab Saudi untuk membicarakan kasus-kasusnya."

Inspektur Jenderal **Mohammad Iqbal,** mantan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri

ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU

- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini bertemu dengan Rizieq pada April

• Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini bertemu dengan Rizieq pada April 2018. Dia mengaku berdiskusi dengan Rizieq soal berbagai isu, seperti kebangkitan Partai Komunis Indonesia, ketidaknetralan polisi, dan tudingan pemerintah tak memperhatikan aspirasi umat Islam.

"Setidaknya mencoba meluruskan prasangka-prasangka yang keliru."

Erwin Moeslimin Singajuru, mantan anggota DPR dari PDIP

KONTROVERSI

- Pengacara Rizieq Syihab, Sugito Atmaprawiro, mengatakan tak ada kasus hukum dan pelanggaran imigrasi yang sedang dihadapi Rizieq.
- Rizieq membantah disebut *overstay* dan menyatakan tak membayar denda.
- Politikus Gerindra, Fadli Zon, menyebutkan pemerintah seharusnya membantu kepulangan Rizieq.
- Persaudaraan Alumni 212 berencana menggelar reuni 212 di Lapangan Monas pada 2 Desember mendatang.
- Duta Besar Indonesia di Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, menyebutkan Rizieq Syihab punya catatan pelanggaran di komputer imigrasi Arab Saudi.
- Rizieq disebut *overstay* sehingga harus membayar denda.
- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menyatakan Rizieq tak mau menerima bantuan pemerintah.
- Sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah, menolak rencana reuni 212 dengan alasan pandemi Covid-19.

Muchsin pun menyampaikan pesan itu kepada Rizieq. Para pengurus FPI menggelar rapat dan merunut sejumlah peristiwa yang terjadi sebelumnya. Misalnya mobil meledak di dekat tempat Rizieq berceramah di Jalan M.T. Haryono, Jakarta, pada pertengahan April. Rapat pengurus menyimpulkan Rizieq harus pindah ke luar negeri. Arab Saudi dipilih dengan alasan Rizieq dan keluarganya bisa menjalani umrah.

Sekitar dua pekan berada di Saudi, Rizieq pergi ke Malaysia untuk mengurus dan menjalani sidang doktoral di Universitas Sains Islam selama empat hari. Menurut Muchsin, Rizieq memilih kembali ke Arab Saudi ketimbang pulang ke Indonesia. Muchsin lalu menunjukkan percakapannya dengan seorang pengikut Rizieq di Malaysia. Dalam *chat* tersebut tertulis bahwa Rizieq sempat dicari oleh intelijen di rumahnya. "Beberapa jam setelah beliau terbang, intelijen itu baru tiba," seperti tertulis dalam pesan tersebut.

Dua pekan kemudian, atau pada 29 Mei 2017, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menetapkan Rizieq sebagai tersangka dugaan konten pornografi. Sejumlah ulama pun melobi pemerintah agar kasus yang menjerat Rizieq dihentikan. Salah satunya dilancarkan oleh sejumlah ulama 212 saat dua kali bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Muslim Indonesia Usamah Hisyam mengaku menjadi mediator pertemuan itu. Menurut dia, Presiden menyatakan enggan mengintervensi persoalan hukum.

Direktur Habib Rizieq Center, Abdul Khoir, menuturkan, Rizieq sempat didekati sejumlah petinggi pemerintah selama berada di Saudi. “Ada yang datang langsung ataupun mengirimkan utusan,” ujar Khoir, yang tergabung dalam tim tujuh Rizieq, kelompok penasihat hukum Rizieq. Dua pejabat pemerintah dan dua orang dekat Rizieq mengatakan pejabat yang datang menemui Rizieq di Mekah adalah Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Tito Karnavian, yang kala itu menjadi Kepala Kepolisian RI.



Budi Gunawan mengikuti rapat kerja dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di gedung Nusantara II, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Seorang pejabat yang mengetahui pertemuan itu mengatakan Budi bahkan mengirim utusan sampai enam kali. Utusan itu menyampaikan agar Rizieq menerima penghentian perkara dengan syarat dia dan FPI tak menimbulkan kegaduhan di dalam negeri lagi. Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto pada Juni 2018 membantah informasi tersebut. Adapun Tito Karnavian, kini Menteri Dalam Negeri, belum bisa dimintai tanggapan. Anggota staf khususnya, Kastorius Sinaga, tak merespons pertanyaan yang diajukan *Tempo*.

Pada Juni 2018, Tito menolak berkomentar soal informasi tersebut. Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal, Kepala Polda Nusa Tenggara Barat, yang saat itu menjabat Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, membantah kabar bahwa Tito bertemu dengan Rizieq di Saudi. Namun Iqbal mengatakan Tito pernah tak sengaja bertemu dengan pengurus FPI DKI Jakarta saat umrah ke Mekah.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menampik ada perwakilan Polri yang bertemu dengan Rizieq selama ia berada di Saudi. “Tidak ada info tersebut,” ujarnya, Sabtu, 14 November lalu. Awal Mei 2018, Polda Jawa Barat menghentikan penyidikan kasus penodaan Pancasila yang menjerat Rizieq. Pada pertengahan Juni 2018, polisi pun mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan kasus konten porno.

•••

SELAMA berada di Arab Saudi, Rizieq Syihab sudah mengutarakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia sebanyak enam kali. Namun dia tak kunjung bisa kembali ke Tanah Air. Kepastian pulang itu baru muncul pada pertengahan Oktober lalu. “Kepada pengurus FPI, beliau memberitahukan sedang mengurus proses administrasi,” ucap Muchsin Alatas dari Dewan Pembina Majelis Syuro Front Pembela Islam. Pengurusan kepulangan itu dikerjakan oleh Rizieq dan timnya di Saudi. Muchsin bercerita, tim Rizieq menerjemahkan berbagai dokumen, seperti surat penghentian penyidikan perkara, untuk melobi pemerintah Saudi.

Dua orang dekat Rizieq mengatakan lobi itu dilancarkan lantaran tak kunjung ada titik temu dengan perwakilan pemerintah Indonesia soal waktu kepulangan. Muchsin membenarkan ada utusan Pejaten, kantor Badan Intelijen Negara, yang membicarakan rencana kepulangan. Ia mengatakan pembicaraan itu disertai dengan syarat agar Rizieq tak lagi beraktivitas politik. “Intinya diminta ceramah dan dakwah yang biasa saja,” ujarnya.

Sebaliknya, kata Muchsin, Rizieq pun mengajukan syarat untuk menghentikan aktivitas politiknya. Ada lima komitmen yang diajukannya kepada pemerintah, yaitu tidak boleh ada penodaan agama dan pelaku penodaan agama harus ditangkap; tidak boleh ada pihak asing menguasai aset negara; melarang Partai Komunis Indonesia; membebaskan ulama dan aktivis; serta jangan ada lagi persekusi dan kriminalisasi. Menurut Muchsin, perwakilan intelijen itu tak bisa menjawab permintaan Rizieq.

Direktur Habib Rizieq Center, Abdul Khoir, menyatakan intelijen Indonesia beberapa kali memberikan informasi soal aktivitas Rizieq kepada intelijen Saudi. Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, mengaku mendapat cerita langsung dari Rizieq soal keterlibatan intelijen saat datang ke rumahnya di kawasan Sari’ Sittin di Mekah pada Juni 2019. Dua bulan sebelumnya, rumah Rizieq didatangi oleh intelijen Saudi karena mereka mendapat informasi sering digelar berbagai pertemuan rahasia di sana.

Rizieq pun menjelaskan bahwa rumahnya kerap didatangi tamu asal Indonesia. “Setelah diusut, ternyata informasi awalnya berasal dari pemerintah Indonesia,”

kata Mardani mengulang ucapan Rizieq. Dalam siaran di Front TV, akun milik FPI di YouTube, Rizieq menyatakan ada pihak-pihak yang ingin membuat hidup dia dan keluarganya susah.

Di akun yang sama, Rizieq juga mengklaim telah membuat kesepakatan tertulis dengan Badan Intelijen Negara. Dia pun menyatakan dokumen itu pernah diperlihatkannya kepada pemerintah Saudi ketika ia diisukan sebagai buron. "Dokumen ini belum saya buka ke masyarakat. Saya pikir nanti kalau keadaan darurat," ujarnya pada Selasa, 10 November lalu.



Laskar Pembela Islam (LPI) berjaga menyambut kedatangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta, 10 November 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahmam W

Meski telah menyelesaikan urusan administrasi, Rizieq juga mengaku ada pihak yang berupaya menggagalkan kepulangannya. Caranya dengan membatalkan pemesanan tiket pesawat ke agen travel. Di bandara, anaknya juga sempat tertahan karena dianggap telah melakukan penipuan. Setelah memberi penjelasan, kata Rizieq, dia dan keluarganya bisa masuk ke pesawat.

Kabar masuknya Rizieq ke pesawat sampai ke pengurus FPI di Jakarta. Mereka langsung menyebarkan pesan berantai ke berbagai grup WhatsApp, meminta anggota FPI menjemput di bandara. Laskar FPI pun ditugasi berjaga di tiga terminal di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, sebagai antisipasi pendaratan pesawat Saudi Arabia Airlines yang mengangkut Rizieq dialihkan.

Muchsin Alatas menuturkan, para pengikut Rizieq datang dari berbagai daerah, seperti Palembang, Jawa Barat, dan Madura. Banyak dari mereka menginap di hotel sekitar bandara. Muchsin sendiri menginap di Hotel Transit Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Keesokan harinya, sekitar pukul 06.00, Muchsin dan 19

pengurus FPI bergerak ke Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta dan menunggu di salah satu ruang kedatangan.

Bertemu dengan sohibnya, Rizieq Syihab menyalami mereka satu per satu. Sambil memeluk Rizieq, Muchsin mengatakan selamat datang. "Akhirnya bisa pulang," ujar Muchsin menirukan ucapan Rizieq.

HUSSEIN ABRI DONGORAN, DIKO OKTARA

Budi Gunawan Badan Intelijen Negara Rizieq Syihab FPI Front Pembela Islam | FPI

Hidup Rizieq Syihab di Arab: Dijaga FPI, Tak Terima Sembarang Tamu, dan Didatangi Intelijen



Postingan foto dari akun Twitter @HabibRizieq_ID milik Rizieq Shihab, bersama warga negara Indonesia di Thoif, Mekah, Arab Saudi, 11 September 2020. Twitter @HabibRizieq_ID

- **Rizieq Syihab memiliki pelayan dan penjaga yang menyaring dan melayani tamu. .**
- **Rombongan jemaah umrah asal Indonesia kerap datang ke rumahnya. 21657**
- **Pemerintah Arab Saudi tak pernah menegur Rizieq Syihab yang kerap mendatangkan kerumunan ke rumahnya. .**

ABDUL Khoir kerap terheran-heran saat akan keluar dari rumah Rizieq Syihab di Sari' Sittin, Mekah, Arab Saudi. Beberapa kali bertandang ke sana, moncong sandalnya yang menghadap ke pintu rumah berputar ke arah jalan. Belakangan, Direktur Habib Rizieq Center itu mengetahui para penjaga rumah merapikan dan mengubah arah sandal tersebut. "Sandal bisa langsung dipakai tanpa perlu berlama-lama," katanya kepada *Tempo*, Kamis, 12 November lalu.

Di Mekah, Rizieq menyewa rumah dua lantai yang jarak tempuhnya sekitar 15 menit berkendara dari Masjid Al-Haram. Rizieq dan keluarganya tinggal di lantai dua. Lantai satu yang hanya beralaskan karpet dan tak memiliki meja dan kursi digunakan untuk menerima tamu. Tak semua orang bisa bertemu dengan sahibulbait. Menurut Abdul Khoir, Ketua Front Pembela Islam Arab Saudi, Abdul Wahid, menyeleksi ketat tetamu yang hadir. Wahid pun mengatur durasi waktu bertemu dengan Rizieq dan memastikan penganan untuk tamu tercukupi.

Para tamu memarkir kendaraan mereka di tanah kosong seluas lapangan futsal di belakang rumah Rizieq. Mereka lalu masuk lewat pintu belakang. Di bagian belakang rumah itu, menurut Abdul Khoir, seseorang pernah memasang bendera kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Fotonya sempat viral di media sosial. Khoir bercerita, tamu yang akan pulang akan dilayani oleh penjaga rumah. Jika mereka membawa kendaraan, penjaga itu akan memanggil sopir atau mengantarkan mobil. Penjaga itu juga siap memanggil taksi jika tamu membutuhkannya. Pengaturan itu, ucap Khoir, merupakan instruksi langsung dari Rizieq Syihab.

Rizieq menetap di Saudi setelah meninggalkan Indonesia pada April 2017. Memboyong sejumlah anggota keluarganya, dia berangkat umrah ke Mekah. Sebulan sebelumnya, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menetapkan Rizieq sebagai tersangka kasus percakapan bermuatan pornografi dengan Firza Husein. Polisi berkali-kali memeriksa Firza dan sempat menahannya pada akhir Januari 2017. Pada pertengahan Juni 2018, Markas Besar Kepolisian RI menyatakan penyidikan kasus tersebut dihentikan.

Menetap di Saudi, kegiatan Rizieq terpantau melalui media sosial atau unggahan tamu yang menemuinya. Sejumlah tokoh politik sempat menyambanginya. Pendiri Partai Amanat Nasional, Amien Rais, bertemu dengan Rizieq di sebuah hotel pada 14 Juni 2017. Kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Pawiro, mengatakan kliennya hampir setiap hari menerima kunjungan tokoh Indonesia dan luar negeri. Menurut dia, tamu yang pernah datang ke rumah Rizieq antara lain Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. “Hampir setiap hari. Beliau jarang punya waktu istirahat,” kata Sugito.

Sejumlah anggota rombongan umrah asal Indonesia pun ikut mengunjungi rumah Rizieq. Abdul Khoir mengatakan mereka umumnya dibawa oleh pengusaha umrah yang kenal dengan pengurus FPI. Rizieq pun kerap menggelar tahlilan atau perayaan maulid di rumahnya. Meski ada keramaian, kata Khoir, Pemerintah Saudi tak pernah menegur pentolan Front Pembela Islam itu.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ini mengatakan Rizieq berkali-kali hendak pulang ke Indonesia. Setidaknya tiga kali Rizieq membeli tiket pesawat. Suatu kali, ujar Khoir, Rizieq sudah melewati pos *check-in*. Koper dan barang bawaan pun sudah masuk ke lambung pesawat. Namun, di imigrasi, ia ditahan oleh petugas. "Mereka menyatakan Rizieq tak bisa keluar dari Arab Saudi." Akibatnya, hanya koper milik Rizieq yang terbang ke Tanah Air.

Salah satu rencana kepulangan Rizieq mencuat pada Desember 2017 saat reuni alumni 212, unjuk rasa yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta saat itu, dipenjarakan karena penistaan agama. Rencana ini dia sampaikan saat berbicara melalui konferensi jarak jauh di Kongres Alumni 212 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Belakangan, Rizieq batal pulang dan hanya menyampaikan orasi lewat video yang diunggah di saluran YouTube Ustadz Lover dengan judul "Ini Jawaban Habib Rizieq Datang Reuni 212? Langsung dari Makkah Almukaromah". Video itu kini tak terlihat lagi di YouTube.

Abdul Khoir menduga pencegahan Rizieq keluar dari Arab Saudi adalah adanya permintaan dari pemerintah Indonesia. Namun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan nama Rizieq tak pernah masuk daftar cegah tangkal. "Kalau mau masuk (Indonesia), ya masuk saja," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dalam rapat dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 Februari lalu. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. juga mengatakan tak pernah melarang Rizieq pulang.

Dalam acara reuni 212 pada Desember 2019, lewat rekaman video Rizieq mengatakan telah mengontak Duta Besar Indonesia di Riyadh, Agus Maftuh, terkait dengan statusnya di Arab Saudi. Kala itu, Rizieq baru saja mendapat surat pencekalan dari pemerintah Saudi. Setelah itu, Duta Besar Indonesia mengirim Kepala Pos Badan Intelijen Negara yang bertugas di negara tersebut. Petugas itu meminta keterangan dan sejumlah berkas keimigrasian dalam bentuk fotokopi.

Rizieq pun memberikan salinan paspor dan visa. Melalui petugas intelijen itu, Rizieq mengaku sempat berbicara dengan Agus Maftuh lewat telepon. Agus berpesan agar Rizieq memberikan keterangan selengkap-lengkapnya. Rizieq juga berterima kasih karena Agus mengirimkan petugas ke rumahnya. "Saya sempat menawari Pak Dubes untuk mampir ke Mekah," ujar Rizieq.

Agus Maftuh mengatakan pemerintah Indonesia memperoleh lima lembar dokumen dari Kantor Kerajaan Arab Saudi. Menurut dia, visa Rizieq seharusnya sudah habis masa berlakunya pada 20 Juli 2018. Akibatnya, Rizieq pun berstatus *overstay* karena tak memperoleh perpanjangan visa. Dalam sistem imigrasi Arab

Saudi, status Rizieq juga masih tercatat dalam *sijil al-mukhalif* atau daftar pelanggar undang-undang keimigrasian. Selain itu, nama Rizieq tercatat dengan jelas masuk ke *tasjil murahhal* atau daftar orang dideportasi.

Pada 2 November lalu, pemerintah Saudi memberikan izin menetap bagi Rizieq selama sembilan hari. Saat itu, Rizieq mengurus kepulangannya di Kantor Deportasi Syumaisi. Rizieq pun tak perlu membayar denda *overstay*. Sebab, kata Agus Maftuh, pemerintah Saudi menghapus denda *overstay* bagi warga negara asing yang menetap di negara itu. Rizieq mewanti-wanti bakal menuntut secara hukum siapa pun yang menyebut dia melanggar izin tinggal. "Jangan sembarangan menyebut saya *overstay*," ujar Rizieq dalam siaran di Front TV.

WAYAN AGUS PURNOMO, DEWI NURITA

Rizieq Syihab Front Pembela Islam | FPI Arab Saudi

Kekecewaan Rizieq Syihab terhadap Prabowo Subianto -



Rizieq Syihab mengisi acara dialog dan ceramah kepada simpatisannya dari Mekah, yang disiarkan oleh channel Yotube FRONT TV, Desember 2019. TEMPO/Jati Mahatmaji

- **Menolak jadi calon presiden, Rizieq Syihab mendukung Prabowo dan mendorong nama calon wakil presiden. .**
- **Rizieq mendukung Partai Bulan Bintang, tapi partai politik itu tak lolos ke Senayan. 21657**
- **Rizieq Syihab tetap tak menerima kemenangan Jokowi yang dianggapnya penuh kecurangan. .**

BERMUKIM hampir 1.300 hari di Arab Saudi, Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Syihab telah mendapat tawaran bergabung dengan Partai Masyumi begitu tiba di Indonesia. Inisiator Masyumi, Ahmad Yani, mengatakan Rizieq telah menerima informasi mengenai pendirian Masyumi sejak tinggal di Tanah Suci.

Majelis Syuro Muslimin Indonesia merupakan partai politik Islam terbesar di Indonesia pada masa Orde Lama. Dalam Pemilihan Umum 1955, Masyumi menjadi pemenang kedua dengan 7,9 juta suara atau 20,9 persen, setelah Partai

Nasional Indonesia dengan 8,4 juta suara atau 22,3 persen. Pada Sabtu, 7 November lalu, sejumlah orang mendeklarasikan kembali partai tersebut.

Menurut Yani, para inisiator Masyumi mengabarkan pendirian tersebut kepada Rizieq karena dua hal. Pertama, Rizieq menyetujui rekomendasi "Ijtimak Ulama" yang digelar pada 2018, salah satunya membentuk wadah politik baru bagi umat Islam. Kedua, Rizieq merupakan tokoh di Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia. "Kami mengundang sejumlah tokoh dan ulama untuk duduk di Majelis Syura Masyumi," kata Yani di Jakarta pada Selasa, 10 November lalu.

Yani mengaku kerap berdiskusi dengan Rizieq soal politik. Misalnya ihwal pendirian Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Organisasi ini beberapa kali melancarkan kritik kepada pemerintah. Yani, yang menjabat Ketua Komite Eksekutif KAMI, optimistis Rizieq mendukung gerakan tersebut. Penyebabnya, KAMI mendesak pemerintah bersikap adil terhadap ulama dan aktivis yang kritis.

Pada 2018, mantan politikus Partai Persatuan Pembangunan itu juga menemui Rizieq di Mekah. Rizieq, menurut Yani, bertanya soal statusnya di partai itu. Rizieq meminta Yani mengambil alih PPP yang mendukung Basuki Tjahaja Purnama—bekas Gubernur DKI Jakarta yang tersandung perkara penodaan agama—pada Pemilihan Gubernur DKI 2017. Tak mampu memenuhi permintaan itu, Yani diminta maju menjadi calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang. Rizieq beralasan partai yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu dihuni banyak anggota Front Pembela Islam. "PBB akan jadi partai besar kalau kita konsisten. Bismillah," ujar Yani menirukan pesan Rizieq.

Pencalonan Yani tak mulus setelah PBB memutuskan mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sejumlah calon legislator PBB menyatakan mundur, termasuk Yani. Ia membentuk PBB poros Mekah dan mendesak partai itu membebaskan kadernya mendukung Prabowo Subianto, rival Jokowi. Menurut Yani, usul ini disetujui oleh Rizieq. Namun PBB hanya meraih sekitar 1 juta suara atau 0,79 persen dan tak lolos ke Senayan.

Setelah pemilu usai, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menyambangi Rizieq pada Juni 2019. Mardani bercerita, kala itu Rizieq masih menuding pemilu yang dimenangi Jokowi tersebut diwarnai kecurangan. Ia pun meminta pendukung Prabowo berjuang sampai gugatan mereka dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Mengantongi data Komisi Pemilihan Umum, Mardani mengusulkan agar Rizieq dan pendukung Prabowo legawa dan berjuang lagi pada Pemilu 2024. "Saya percaya dengan hasil penghitungan KPU," tutur Mardani.

Dari Mekah, Rizieq terlibat dalam kampanye Pemilu 2019. Ia mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Slamet Maarif, pengurus FPI yang menjabat Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, bercerita Rizieq urun saran ketika persiapan debat pertama calon presiden mengenai penegakan hukum dan terorisme. Di sebuah grup WhatsApp, kata dia, Rizieq mengusulkan politikus PKS, Hidayat Nur Wahid, menjadi bagian dari tim pakar.

Rizieq pun mengulas penampilan Prabowo setelah debat. Menurut Slamet, Rizieq menyayangkan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu tak menyinggung tidak tuntasnya kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. “Habib menilai isu Novel bisa menjadi kunci memenangi debat,” ujar Slamet kala itu.

Pada Juni 2018, atau dua bulan sebelum pendaftaran calon presiden, Prabowo bertamu ke rumah Rizieq di Mekah. Slamet; pendiri Partai Amanat Nasional, Amien Rais; dan Ansufri Idrus Sambo—guru mengaji Prabowo—turut hadir. Sebagaimana diceritakan Slamet, sahibulbait ditanyai mengenai niatnya berlaga dalam pemilihan presiden. Namun Rizieq menolak tawaran itu dengan alasan tak mau lagi menjadi aktor politik di Tanah Air. Dalam pertemuan itu, Rizieq belum terang-terangan mendukung Prabowo.

Baru pada Ijtimak Ulama yang digelar di Hotel Peninsula, Jakarta, pada 28 Juli 2018, Rizieq bersikap. Acara yang digagas Persaudaraan Alumni 212 itu menyaring sejumlah kandidat calon presiden. Dua calon yang tersisa ialah Rizieq dan Prabowo. Melalui video telekonferensi, para peserta Ijtimak menanyakan kesediaan Rizieq. Slamet menyebutkan Rizieq menyerahkan amanah kepada Prabowo.



Politikus Ahmad Yani saat menghadiri deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta, Agustus 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

Rizieq disebut-sebut mengusulkan calon pendamping Prabowo. Dalam Ijtimak Ulama muncul nama Ketua Dewan Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri dan mubalig Abdul Somad Batubara—yang enggan bertarung dalam pemilihan presiden. Namun Prabowo menepis nama Salim dengan alasan tak diterima koalisi partai pendukungnya. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Yusuf Martak menceritakan dalam pertemuan di rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Agustus 2018, seorang ulama menyebutkan Prabowo tak mengikuti anjuran Rizieq jika menolak Salim Segaf. “Pak Jokowi lebih cerdas dari kami,” tutur Yusuf soal keputusan Jokowi menggandeng Ma’ruf Amin, saat itu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.

Merapatnya Prabowo ke Istana membuat Rizieq kecewa. Ketua FPI Muchsin Alatas mengatakan Rizieq dalam sejumlah diskusi menyebutkan Prabowo tak memegang komitmen. Menurut dia, Rizieq pernah berjanji tak akan bekerja sama lagi dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu. “Habib menilai Prabowo sebenarnya masih berpeluang melawan hasil pemilu secara hukum,” ujar Muchsin.

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, tak merespons pertanyaan yang dilayangkan *Tempo* hingga Sabtu, 14 November lalu. Pada April 2020, Prabowo melalui akun resmi media sosialnya menyatakan menerima tawaran Jokowi menjadi Menteri Pertahanan demi kerukunan nasional.

Selepas pemilu, Rizieq juga beberapa kali tampil dalam sejumlah demonstrasi. Melalui layanan audiovisual dari Mekah, dia berorasi saat unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila pada Juli lalu. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat lalu menarik rancangan tersebut. Belakangan, pemerintah mengajukan draf anyar, yaitu RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

RAYMUNDUS RIKANG, WAYAN AGUS PURNOMO, HUSSEIN ABRI DONGORAN

Rizieq Syihab Prabowo Subianto Front Pembela Islam | FPI

Bagaimana Aceh Menjadi Daerah Merah Perdagangan Satwa Liar



Tim gabungan Baintelkam Mabes Polri, Polda Aceh dan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta petugas BKSDA Aceh memperlihatkan kulit harimau sumatera (Panthera tigris sumatrea) saat gelar kasus kejahatan perdagangan satwa dilindungi di Banda Aceh, Aceh, Selasa (10/11/2020)./ANTARA FOTO/Ampelsa

- **Barang bukti puluhan paruh burung rangkong, kulit trenggiling, dan selembar kulit harimau bernilai Rp 6,5 miliar. .**
- **Jika dulu dagingnya dicari untuk bahan obat tradisional Cina, kini sisik trenggiling kerap dipakai sebagai bahan baku sabu. 21657**
- **Keberadaan burung rangkong penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem karena perannya menyebarkan biji tanaman .**

SEDAN hitam berpelat nomor BL-1837-LAB berhenti di tengah jalan lintas Bireun-Takengon, Aceh, pada Selasa, 3 November lalu. Belasan petugas dari pos jaga Covid-19 menghadang lajunya. Air muka para penumpang mobil itu semula tak beriak. Mereka terkesiap begitu personel kepolisian yang membantu petugas kesehatan dalam operasi itu memeriksa bagasi mobil.

Rupanya, ini bukan operasi pencegahan Covid-19, melainkan penangkapan yang direncanakan. Polisi langsung memiting penumpang berkaus kuning setelah menemukan 71 paruh burung rangkong gading (*Rhinoplax vigil*), 28 kilogram kulit trenggiling (*Manis javanica*), dan selembar kulit harimau beserta tulang-belulang (*Panthera tigris sumatrae*) di dalam bagasi. "Nilainya mencapai Rp 6,5 miliar," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Aceh Komisaris Besar Margiyanta, Jumat, 13 November lalu.

Dalam video amatir yang merekam peristiwa itu, pria berkaus kuning telengkup di tanah setelah dipiting. Selanjutnya kedua tangannya digari. Penangkapan yang sempat membuat macet lalu lintas di ruas jalan itu berlangsung tak sampai lima menit. Kedua penumpang sedan hitam serta barang sitaan lekas diboyong ke kantor polisi.

Pria berkaus kuning itu adalah Deni Azan, 47 tahun. Warga Desa Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh, itu ditangkap bersama sopirnya, Lukman Hakim, 27 tahun. Keduanya digulung setelah menyepakati transaksi dengan seorang pembeli dari Jakarta di sebuah hotel di sekitar Bener Meriah. Bagian tubuh hewan yang mereka perdagangkan berasal dari satwa liar dilindungi hasil perburuan di kawasan hutan konservasi Leuser, Aceh.



Paruh Rangkong saat pengungkapan kasus perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi, di Banda Aceh, Selasa 10 November 2020./Istimewa

Menurut Margiyanta, rencana transaksi itu sudah terpantau beberapa pekan sebelum penangkapan. Walau begitu, operasi pencidukan Deni dimulai setelah tim yang terdiri atas polisi dan petugas dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mendeteksi kepergian pria itu dari rumahnya untuk menemui calon pembeli. Intelijen kepolisian sempat memergoki Deni memasukkan sejumlah

barang ke dalam beberapa karung. “Mereka kami tangkap ketika melintas di pos pantau Covid-19 selepas transaksi,” ucap Margiyanta.

Menurut Margiyanta, Deni terbilang pemain besar dalam bisnis satwa liar. Selain menyuplai pasar lokal, ia banyak meladeni permintaan pasar luar negeri, terutama Cina dan Hong Kong, untuk dijadikan kerajinan. Nilai penjualannya mencapai miliaran rupiah untuk setiap transaksi. Bahkan ia pernah menghasilkan belasan miliar rupiah dalam sekali transaksi dengan pembeli dari Jakarta.

Deni mengandalkan jaringan pemburu liar untuk memasok barang. Anggota jaringan ini diperkirakan berjumlah lebih dari seratus orang. Para pemburu umumnya adalah pekebun yang mencari penghasilan tambahan, yang berasal dari desa di sekitar Leuser. Untuk setiap barang yang diantar para pemburu, Deni menerapkan skema beli putus. “Setiap barang yang datang akan ia bayar kontan saat itu juga,” ujar Margiyanta.

Bisnis hitam ini, kata Margiyanta, menjanjikan keuntungan cukup besar. Untuk satu gram paruh burung rangkong, misalnya, ia cukup membayar Rp 28 ribu kepada pemburu. Sementara itu, harga jual kepada pembeli bisa mencapai Rp 60 ribu. Adapun harga beli per kilogram sisik trenggiling dari pemburu mencapai Rp 1,5 juta. Di pasar internasional, harganya bisa berlipat dua hingga tiga kali.

Orang yang mengetahui seluk-beluk bisnis ini mengatakan Deni adalah pemasok bagi sejumlah penadah besar di Jakarta. Beberapa di antaranya diketahui kerap menyambangi rumah Deni. Mereka datang ke Bener Meriah untuk memastikan jumlah dan kualitas barang sebelum bertransaksi. Setelah beralih tangan, barang-barang itu dibawa ke Jakarta dengan perjalanan darat. “Jalurnya lewat Medan dan Padang,” tutur narasumber tersebut.

Sehari-hari, Deni tak tampak seperti pemasok satwa liar. Ia membuka usaha warung kelontong dan bensin eceran di muka rumahnya. Luas bangunan rumahnya sekitar 200 meter persegi. Di belakang bangunan terdapat tanah lapang. Di atas lahan itu tumbuh beberapa batang pohon durian. Sumber penghasilannya yang lain adalah kebun kopi. Ia memiliki perkebunan di Bener Meriah.

Deni Azan dan Lukman belum bisa ditemui untuk dimintai konfirmasi. Keduanya kini mendekam di ruang tahanan Polda Aceh. Polisi berencana menjerat mereka dengan pasal perburuan satwa liar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. “Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda maksimum Rp 100 juta,” kata Margiyanta.

Aceh termasuk daerah merah perdagangan satwa liar—atau bagian tubuh satwa tersebut. Sebelum Deni digulung, lima bulan lalu tiga tersangka berinisial A, MD, dan MR ditangkap saat sedang bertransaksi di depan pompa bensin Lhok Nibong, Pante Bidari, Aceh Timur. Barang buktinya selembar kulit harimau, empat taring harimau dan beruang madu, serta sejumlah tulang-belulang dan puluhan kuku kedua hewan tersebut.

Kini, yang sedang banyak dicari adalah burung rangkong gading dan trenggiling. Burung rangkong gading lazim disebut dengan nama enggang gading. Bagian tubuh hewan ini, seperti paruh dan bulu, sudah lama dijadikan ornamen keagamaan oleh masyarakat tertentu di luar negeri. Menurut Margiyanta, ini yang membuat permintaannya cukup tinggi.

Adapun trenggiling semula hanya dikonsumsi dagingnya untuk alasan kesehatan. Konsumsinya mencapai 100 ribu kilogram per tahun. Pasar terbesarnya adalah Cina. Sisiknya belakangan diburu oleh produsen narkotik karena mengandung tramadol hidroklorida yang digunakan sebagai bahan sabu.



Tersangka dihadirkan saat pengungkapan kasus perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi, di Banda Aceh, Selasa 10 November 2020./Istimewa

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sustyo Irianto mengatakan perburuan burung rangkong gading, trenggiling, dan harimau dilarang berdasarkan konsensus internasional. Dalam Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Terancam Punah (CITES), ketiga hewan itu masuk dalam Apendiks 1 alias tidak boleh diburu dan diperjualbelikan.

Selama lima tahun terakhir, kata Sustyo, tim gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan polisi telah mengungkap sekitar 1.400 kejahatan perdagangan satwa. Para pelaku tak selalu beroperasi di bawah tanah. Ada kalanya para penjahat menjajakan buruannya secara terbuka di Internet dan media sosial. “Karena itu, kami juga perlu memperkuat tim patroli *cyber*,” ucapnya.

Direktur Pendidikan dan Komunikasi Flight Protecting Birds Nabila Fatma Gaid mengatakan populasi burung rangkong perlu dijaga guna menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya menjadi penanda kualitas hutan hujan tropis seperti di Indonesia. Burung yang bisa tumbuh sepanjang satu meter ini membuat sarang di pohon dengan ketinggian sekitar 20 meter dan memangsa buah-buahan dan serangga di pohon-pohon di sekitarnya.

Menurut Nabila, pengungkapan kasus perburuan satwa liar belakangan ini sedikit-banyak dipengaruhi pandemi Covid-19. Karena ruang gerak menjadi lebih terbatas, para pengepul tidak lagi menjual barang ke penadah di luar negeri, melainkan melemparnya ke pasar lokal. “Agar barang tidak tertahan lama, mereka akhirnya melepasnya ke penadah dalam negeri,” ujarnya.

RIKY FERDIANTO

KLHK Satwa Liar Kepolisian RI

Draf Rancangan Aturan Impor Gula Tak Seperti Keputusan Rapat Kabinet



Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet membahas pasokan garam dan gula khusus untuk industri secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, 5 Oktober lalu. Foto: setkab.go.id

- **Pemerintah merancang aturan baru yang mengatur pasokan gula khusus industri. .**
- **Banyak manfaat impor langsung oleh pengguna. 21657**
- **Isi draf yang tak sejalan dengan hasil rapat kabinet. .**

RUMUSAN draf aturan baru tentang gula rafinasi ramai diperbincangkan di kalangan pelaku usaha makanan dan minuman sepanjang pekan lalu. Tapi keriuhan pembicaraan rancangan regulasi yang bakal berdampak terhadap bisnis mereka itu masih sebatas kasak-kusuk. “Pemerintah tidak melibatkan kami dalam pembahasan draf,” kata Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi Dwiatmoko Setiono, Rabu, 11 November lalu.

Dari selentingan pula Dwiatmoko mendengar kabar bahwa pembahasan rancangan peraturan Menteri Perindustrian itu sudah memasuki tahap sinkronisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembahasan antar-kementerian teknis belum final. “Kabarnya, ada poin yang belum disepakati antar-kementerian,” ujarnya.

Penyusunan rancangan peraturan Menteri Perindustrian tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat kabinet terbatas yang membahas importasi gula dan garam khusus industri. Seusai pertemuan yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Senin, 5 Oktober lalu, itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa ada dua keputusan penting yang mendasar berkaitan dengan pengadaan dua komoditas tersebut.



Aktivitas bongkar muat gula impor asal Filipina di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 18 Februari lalu./ Tempo/Tony Hartawan

Presiden, menurut Luhut, setuju impor garam dan gula dilakoni langsung oleh industri pengguna. Dia mencontohkan, produsen kaca bisa mengimpor langsung garam bila industri kaca membutuhkan garam dengan spesifikasi tertentu. “Gula nanti yang mengimpor hanya industri pangan, yang memerlukan. Jadi tidak dari orang lain sehingga tidak menjadi permainan,” ucapnya.

Tentu, ia menambahkan, permohonan izin impor harus disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian sebagai kementerian teknis yang mengetahui detail jenis industri berikut volume kebutuhan bahan bakunya saban tahun. “Kalau dia membocorkan bahan baku itu ke pasar tradisional sehingga membuat harga garam rakyat anjlok, izin akan dicabut,” tutur Luhut, mewanti-wanti.

Menurut Luhut, Kementerian Perindustrian akan mendaftar perusahaan yang memerlukan dua komoditas tersebut, juga menyiapkan aturan teknisnya. “Nanti diterbitkan ke publik sehingga publik akan ikut mengawasi, benar enggak jumlah (volume)-nya.”

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Abdul Rochim mengatakan rancangan peraturan menteri yang akan menjelaskan teknik dan mekanisme importasi gula khusus industri masih disusun. “Diharapkan (peraturan) bisa keluar secepatnya,” katanya, Rabu, 4 November lalu.

•••

MENTERI Luhut sampai memberikan penegasan bahwa rapat kabinet terbatas pada 5 Oktober lalu juga memutuskan soal importasi gula untuk industri. Pasalnya, dalam konferensi pers virtual di hari yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita cuma memaparkan ihwal komoditas garam untuk industri. “Saya ingin menambahkan, ini bukan hanya garam, *lho*, ini gula juga,” ujar Luhut. “Jadi nanti, Pak Agus, gula pun industri yang mengimpor. Tidak ada lagi importir-importir gula. Industri makanan yang mengimpor.”

Ia menjelaskan, keputusan itu diambil untuk menyederhanakan proses. Dengan begitu, “Nanti tidak ada lagi harga gula yang bikin gila-gilaan. Semua industri pangan bisa mengimpor,” ucapnya.

Menurut Staf Khusus Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bidang Kelembagaan dan Media Jodi Mahardi, kebijakan baru ini bertujuan menghindari adanya bahan baku hasil impor pihak ketiga yang merembes ke pasar. Rembesan gula impor yang semestinya untuk industri dikhawatirkan membuat harga komoditas petani, baik gula maupun garam, jeblok. “Akan ada mekanisme verifikasi yang ketat untuk industri yang mendapatkan izin dimaksud,” katanya, Rabu, 4 November lalu.

Keputusan rapat kabinet itu sempat menghebohkan kalangan industri makanan-minuman. Sebab, selama ini mereka mendapat pasokan bahan baku gula dari pabrik gula rafinasi. Adapun perusahaan gula rafinasi mengolah bahan baku berupa gula mentah hasil impor.



Presiden Jokowi (kiri atas) memimpin rapat kabinet membahas pasokan garam dan gula khusus untuk industri secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, 5 Oktober lalu. Foto: setkab.go.id

Dwiatmoko salah satu yang sumringah menyambut keputusan itu. Pemilik pabrik pengolahan cokelat ini hakulyakin bisnisnya, yang masuk kategori menengah, tak akan kerepotan menggelar pengadaan secara langsung gula rafinasi. Sebaliknya, dia menilai impor langsung oleh industri pengguna akan lebih efisien, berbiaya murah, lantaran prosedurnya sederhana. “Sektor makanan-minuman akan lebih kompetitif bersaing di pasar dalam negeri ataupun mancanegara,” tuturnya.

PT Indolakto, produsen susu merek Indomilk di bawah bendera Grup Indofood, memilih menunggu aturan teknis yang konkret. “Apakah akan memakai sistem kuota yang perizinannya dikeluarkan beberapa kementerian?” ucap Direktur Teknik dan Operasi Indolakto Sonny Effendhi. Menurut dia, jika mekanisme masih sama dengan sebelumnya, artinya belum ada perkembangan positif. “Cara lama banyak kendala, proses lama, dan biayanya tinggi.”

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai positif keputusan rapat kabinet. Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih, mengatakan dibukanya kesempatan mengimpor bagi industri pengguna akan memberi pelaku usaha pilihan membeli secara langsung atau tidak. “Industri akan makin kompetitif,” ujarnya.

Adapun anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih, menilai, untuk jangka pendek, rencana itu akan jauh lebih efisien. Selama ini, kata dia, industri gula rafinasi tak berkembang dan hanya menjadi rente dalam mata rantai industri gula.

Guru besar ilmu ekonomi pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin, punya perhitungan bagaimana rente ekonomi gula rafinasi sangat menggiurkan. Ia mencontohkan, pada pertengahan Oktober 2020, harga gula mentah dunia US$ 14

sen per *pound free on board* atau sekitar US$ 309 per ton. Jika ongkos angkut, asuransi, dan pengolahan (CIF) gula impor itu sekitar US$ 200 per ton, harga gula rafinasi di pabrik berkisar US$ 509 per ton. Dengan kurs Rp 14.800 per dolar Amerika Serikat, harga gula rafinasi di pabrik hanya Rp 7.530 per kilogram.

Di Indonesia, harga eceran gula tertinggi mencapai Rp 12.500 per kilogram. Bayangkan berapa margin yang diraup importir. Karena itu, Bustanul menyebutkan masa depan industri gula domestik berbasis tebu benar-benar dipertaruhkan lantaran rente ekonomi gula rafinasi tersebut.

Mantan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, mengakui pemberian izin impor gula langsung kepada industri pengguna akan lebih efisien. Sebab, produk yang didatangkan akan persis sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan pengguna. Harganya bisa lebih murah. Cara ini juga bakal lebih efektif mencegah gula rafinasi, yang bahan bakunya didatangkan dari luar negeri, merembes ke pasar.

Namun model ini akan merugikan industri rafinasi. “Ini juga industri nasional yang telah berinvestasi besar,” ucap Bayu. Selain itu, nilai tambah yang ditimbulkan dari pengolahan gula mentah di dalam negeri bakal hilang.

•••

BELUM diketuk, draf rancangan peraturan Menteri Perindustrian bertajuk “Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional” sudah membikin pelaku usaha makanan dan minuman menelan pil pahit. Ketentuan baru impor gula rafinasi agaknya tak semanis *woro-woro* yang disampaikan Menteri Luhut tentang keputusan hasil rapat kabinet 5 Oktober lalu.

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Kementerian Perindustrian Supriadi mengatakan mekanisme pengadaan gula industri tak akan berubah. Kementerian Perindustrian masih akan melibatkan perusahaan rafinasi untuk mengimpor gula mentah dan kemudian mengolahnya menjadi gula industri. “Yang diimpor kan gula mentah, diolah di pabrik gula rafinasi agar nilai tambahnya ada di dalam negeri,” tuturnya, Selasa, 3 November lalu.

Bedanya, ia menambahkan, pemerintah bakal mempercepat waktu penerbitan izin agar industri tidak kesulitan memperoleh bahan baku. Kementerian Perindustrian yakin mekanisme itu tak bertentangan dengan hasil rapat kabinet terbatas yang memutuskan impor dilakukan langsung oleh industri makanan dan minuman.

Menurut Supriadi, saat ini pun kebijakan importasi gula mentah dan gula rafinasi spesifikasi khusus untuk bahan baku dan bahan penolong industri hanya diberikan kepada importir produsen atau industri. “Tidak kami berikan kepada importir umum.”

Sejumlah sumber *Tempo* di lingkungan pemerintah yang mengetahui perumusan rancangan aturan ini mengungkapkan bahwa posisi Kementerian Perindustrian tak sejalan dengan niat Kementerian Perdagangan, yang menginginkan pasar lebih efisien. Kementerian Perdagangan, kata sumber tadi, ingin mendorong importasi langsung gula rafinasi oleh pengguna, yang dianggap bisa memperkecil potensi bocornya produk impor ke pasar konsumen.

Sejumlah sumber tersebut mengungkapkan, Kementerian Perdagangan belum menyepakati beberapa pasal dalam draf rancangan peraturan Menteri Perindustrian yang dianggap kontroversial. Pasal 5, misalnya, yang mengatur impor gula mentah untuk memproduksi gula rafinasi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan industri gula rafinasi yang memiliki izin usaha industri sebelum 25 Mei 2010. Tanggal ini merujuk pada terbitnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang dikenal dengan daftar negatif investasi.

Masalahnya, pasal itu klop dengan konsep yang diusung Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI). Dalam dokumen yang diperoleh *Tempo*, perhimpunan perusahaan pengolah gula mentah menjadi gula rafinasi ini mengusulkan ketentuan tentang pemberian rekomendasi persetujuan impor gula mentah. Dalam usulnya, AGRI berharap pemerintah memberikan batas yang tegas antara produsen gula kristal rafinasi dan produsen gula kristal putih.

AGRI mendefinisikan produsen gula kristal rafinasi adalah pabrik pengolahan yang didesain hanya untuk mengolah gula mentah menjadi gula rafinasi. Perusahaan kategori ini mengantongi izin prinsip sebelum peraturan presiden tadi berlaku, yakni pemain lama impor gula yang sekarang tergabung dalam AGRI.

Sedangkan produsen gula kristal putih (gula konsumsi) merupakan perusahaan yang memproduksi gula kristal putih berbasis tebu dan terintegrasi dengan perkebunan tebu. Selama ini, meski bukan anggota AGRI, pabrik-pabrik gula ini juga mengimpor gula mentah untuk diolah menjadi gula rafinasi.

Ketua AGRI Bernardi Dharmawan menampik adanya lobi terhadap Kementerian Perindustrian. Bernardi membantah kabar bahwa ia pernah mengajukan usul tersebut. Yang ada, menurut dia, AGRI menyampaikan keluhan kepada Kementerian Perindustrian sejak dua tahun lalu bahwa komoditas ini dibagi menjadi dua, yakni gula untuk industri dan gula konsumsi rumah tangga.

SEBELAS SAMURAI GULA RAFINASI

Pada awal berdirinya, dua windu lalu, Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) hanya beranggota PT Angels Products, PT Jawamanis Rafinasi, dan PT Sentra Usahatama Jaya. Importir lama gula kristal putih untuk kebutuhan industri itu, secara berurutan, merupakan bagian dari Grup Artha Graha, Grup Wilmar, dan Grup Samora (Sungai Budi).

Kini jumlah anggota AGRI bertambah menjadi sebelas perusahaan. Selain dari tiga grup pendiri, anggota baru asosiasi datang dari empat kelompok usaha berbeda. Mereka kerap dijuluki "Sebelas Samurai" lantaran menguasai industri gula rafinasi. Di tengah neraca gula yang terus defisit, dominasi mereka dinilai makin kuat lantaran sejumlah grup tersebut belakangan juga mulai masuk ke industri pabrik gula berbasis tebu.



GRUP ARTHA GRAHA

PT ANGELS PRODUCTS (AGRI)
Kapasitas: 577.500 ton per tahun
Lokasi: Serang, Banten

PT INDUSTRI GULA NUSANTARA (Non-AGRI)
Kapasitas: 2.000 ton tebu per hari (TCD)
Lokasi: Kendal, Jawa Tengah

GRUP WILMAR

PT JAWAMANIS RAFINASI (AGRI)
Kapasitas: 600.000 ton per tahun
Lokasi: Cilegon, Banten

PT DUTA SUGAR INTERNATIONAL (AGRI)
Kapasitas: 800.000 ton per tahun
Lokasi: Serang, Banten

GRUP FKS (KELUARGA EDY KUSUMA)

PT PERMATA DUNIA SUKSES UTAMA (AGRI)
Kapasitas: 600.000 ton per tahun
Lokasi: Cilegon, Banten

PT MAKASSAR TENE (AGRI)
Kapasitas: 600.000 ton per tahun
Lokasi: Makassar, Sulawesi Selatan

GRUP SAMORA (Sungai Budi Group)

PT MEDAN SUGAR INDUSTRY (AGRI)
Kapasitas: 400.000 ton per tahun
Lokasi: Deli Serdang, Sumatera Utara

PT SENTRA USAHATAMA JAYA (AGRI)
Kapasitas: 600.000 ton per tahun
Lokasi: Cilegon, Banten

PT ANDALAN FURNINDO (AGRI)
Kapasitas: 400.000 ton per tahun
Lokasi: Bekasi, Jawa Barat

PT SUKSES MANTAB SEJAHTERA (Pabrik Gula, Non-AGRI)
Kapasitas: 5.000-10.000 TCD
Lokasi: Dompu, Nusa Tenggara Barat

PT ADIKARYA GEMILANG (Pabrik Gula, Non-AGRI)
Kapasitas: 8.000 TCD
Lokasi: Lampung Tengah, Lampung

GRUP LABINTA

PT SUGAR LABINTA (AGRI)
Kapasitas: 540.000 ton per tahun
Lokasi: Lampung Selatan, Lampung

PT KEBUN TEBU MAS (Pabrik Gula, Non-AGRI)
Kapasitas: 12.000 TCD
Lokasi: Lamongan, Jawa Timur

GRUP OLAM INTERNATIONAL (SINGAPURA)

PT DHARMAPALA USAHA SUKSES (AGRI)
Kapasitas: 250.000 ton per tahun
Lokasi: Cilacap, Jawa Tengah

GRUP BERKAH MANIS MAKMUR

PT BERKAH MANIS MAKMUR (AGRI)
Kapasitas: 600.000 ton per tahun
Lokasi: Serang, Banten

PT REJOSO MANIS INDO (Pabrik Gula, Non-AGRI)
Kapasitas: 10.000 TCD
Lokasi: Blitar, Jawa Timur

KETAGIHAN GULA IMPOR

Produksi gula nasional stagnan, cenderung menurun, dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, tingkat konsumsi terus meningkat, terutama kebutuhan industri. Walhasil, volume impor gula melambung

Tahun	Produksi	Konsumsi**	Impor
2015	2,49	5,1	2,63
2016	2,36	5,1	4,76
2017	2,19	5,1	4,48
2018	2,17	5,1	5,02
2019	2,22	5,1	4,09
2020*	2,41	5,2	4,08

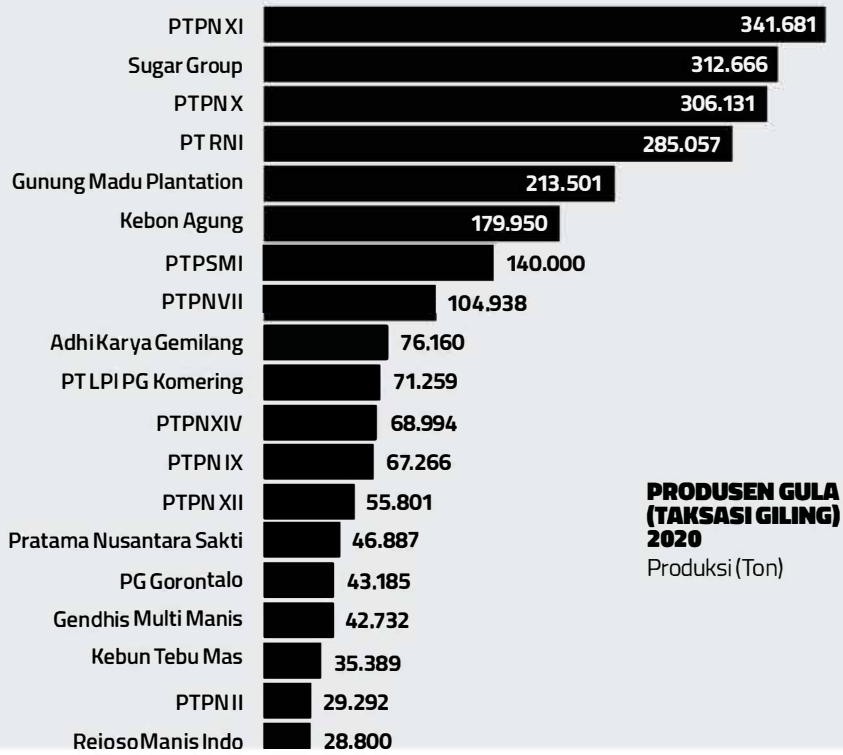
*) 2020 angka proyeksi. Khusus data impor per September 2020.
**) Konsumsi meliputi rumah tangga dan industri.

JATAH IMPOR

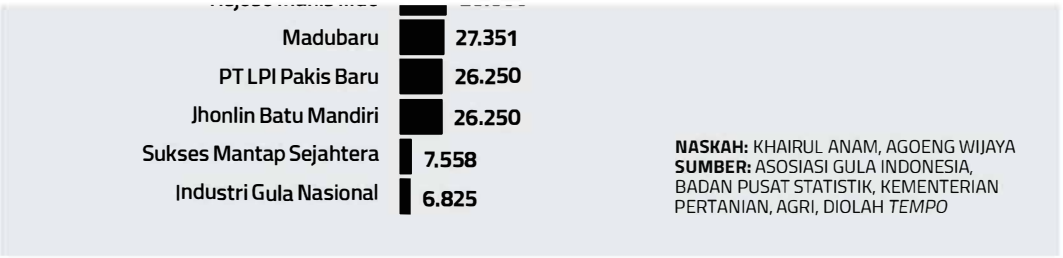
Pada 2019-2020, sejumlah pabrik tebu kebagian kuota impor gula untuk memenuhi defisit dalam negeri. Gula ini digiling untuk menjadi gula kristal putih alias gula konsumsi.

Kuota Impor 2019 (ton)	
PT Adikarya Gemilang (Grup Sungai Budi)	70.050
PT REJOSO MANIS Indo (Grup Berkah Manis Makmur)	60.140
PT Kebun Tebu Mas (Grup Labinta)	52.140
PT Sukses Mantap Sejahtera (Grup Samora/Sungai Budi)	50.300
PT Industri Gula Nusantara (Artha Graha-PT Perkebunan Nusantara IX)	20.000

Kuota Impor 2020 (ton)	
PT PrimaAlam Gemilang (Grup Jhonlin)	50.000
PT Kebun Tebu Mas (Grup Labinta)	35.000
PT Adikarya Gemilang (Grup Sungai Budi)	30.000
PT Gendhis Multi Manis (Badan Urusan Logistik)	29.750
PT Kebon Agung (Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia)	21.422
PT Rejoso Manis Indo (Grup Berkah Manis Makmur)	20.000
PT Sukses Mantap Sejahtera (Grup Samora)	20.000
PT Madubaru (Rajawali Nusantara Indonesia dan Keluarga Sultan Hamengku Buwono X)	10.000



PRODUSEN GULA (TAKSASI GILING) 2020
Produksi (Ton)



Masalahnya, Bernardi mengatakan, selama ini pemerintah juga memberikan izin impor gula mentah kepada pabrik rafinasi di luar anggota AGRI. “Kami hanya memonitor anggota. Bagaimana dengan perusahaan non-AGRI? Bagaimana memastikan gula yang mereka produksi masuk ke industri?” ucapnya, Jumat, 13 November lalu.

Bernardi berdalih, kapasitas produksi dari sebelas anggota AGRI sudah berlebih, totalnya mencapai 5,5 juta ton per tahun. Padahal, dia menjelaskan, kebutuhan industri hanya sekitar 3 juta ton. Artinya, masih ada kapasitas yang belum terpakai. Di sisi lain, dia mengingatkan, gula konsumsi masih defisit. “Seyogianya, ketika ada industri gula baru, mereka mengisi defisit dari kebutuhan konsumsi. Kalau gula industri sudah terpenuhi oleh AGRI.”

Dwiatmoko Setiono waswas. Bila draf rancangan aturan baru mengabulkan pasal tersebut, praktis pemasok gula industri akan dibatasi sebelas perusahaan anggota AGRI saja. Kekhawatirannya bertambah lantaran pabrik-pabrik rafinasi tersebut sebagian besar terafiliasi dalam kelompok usaha. “Pada dasarnya, mereka hanya empat atau lima grup,” ujar Dwiatmoko, yang menilai kondisi ini sangat berpotensi membentuk pasar oligopoli.

Dwiatmoko berharap pemerintah menjadikan momentum ini sebagai titik balik untuk membuat peta jalan ketahanan pangan baru. “Kecuali kalau mau melanggengkan praktik oligopoli,” katanya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah lama mencium aroma oligopoli di industri gula. Komisi antimonopoli ini menyelidiki rantai bisnis gula ketika harga gula konsumsi melambung menembus Rp 18 ribu per kilogram pada awal 2020. Hasilnya, KPPU mengungkap adanya kecenderungan pasar yang oligopolistik karena pemenuhan pasokan dan distribusi gula dilakukan oleh beberapa pelaku usaha saja.

Sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan tak bersedia menjelaskan rencana aturan baru ini. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi hanya memberikan respons singkat. “Sekarang Kemendag sudah punya jubir (juru bicara). Jadi *please* ke Pak Wisnu, ya,” ujarnya, Selasa, 10 November lalu.

Wisnu Wardhana, anggota staf ahli Menteri Perdagangan yang juga mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, tak merespons permohonan konfirmasi *Tempo*. Begitu pula Direktur Impor I Gusti Ketut Astawa.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga juga enggan memberikan penjelasan. Ranah impor gula, kata dia, berada di luar tugas pokok fungsi dan wewenangnya sebagai Wakil Menteri. “Saya diberi tugas pokok fungsi berikut wewenang khusus untuk mempercepat penyelesaian perjanjian dagang luar negeri dan peningkatan ekspor,” tuturnya, Kamis, 12 November lalu.

RETNO SULISTYOWATI, AISHA SHAIDRA

Luhut Pandjaitan Impor Gula Joko Widodo Industri Gula

Industri Makanan dan Minuman Desak Izin Impor Gula



Produk Indomilk yang diproduksi oleh PT Indolakto di salah satu minimarket di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

- **Pasokan gula terancam seret, sejumlah produsen makanan dan minuman mengadu ke pemerintah. .**
- **Rencana impor raw sugar tak kunjung dibahas dari biasanya telah diputuskan pada November. 21657**
- **Jika izin impor tak kunjung turun, produksi industri makanan dan minuman awal tahun depan bisa terganggu. .**

SEJUMLAH surat diterima Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono pekan pertama November lalu. “Ada dari Wings Food, Indofood, dan lain-lain,” kata Susiwijono, Selasa, 10 November lalu.

Lewat warkat terpisah, para pelaku industri makanan dan minuman itu menyampaikan kekhawatiran mereka akan pasokan bahan baku gula kristal rafinasi yang menipis menjelang akhir tahun. Mereka meminta pemerintah segera

mengabulkan permintaan izin impor *raw sugar* bagi pabrik gula rekanan pemasok gula rafinasi.

Anak perusahaan Indofood, PT Indolakto, misalnya, meminta izin segera diberikan kepada PT Kebun Tebu Mas (KTM), pabrik gula di Lamongan, Jawa Timur. Selama ini KTM merupakan pemasok bahan baku gula untuk pabrik Indolakto di Pasuruan, Jawa Timur. Tiap bulan, KTM biasa memasok kurang-lebih 12.500 ton gula rafinasi ke produsen susu merek Indomilk tersebut.

Direktur Teknik dan Operasi PT Indolakto Sonny Effendhi mengatakan izin impor yang terlambat keluar memiliki efek domino cukup besar. “Pasokan gula ke industri telat, produksi pangan bisa berhenti,” tutur Sonny, Rabu, 4 November lalu.

Sonny tak tahu pasti apa alasan seretnya izin impor periode semester kedua 2020 tersebut. Padahal perusahaannya telah membeberkan kebutuhan gula untuk industri. Undangan menyambangi pabrik untuk melihat langsung stok dan kebutuhan gula pun sudah ditawarkan kepada pejabat di Kementerian Perindustrian. Namun upaya perusahaan masih belum membuahkan hasil.

Sonny menyebutkan cadangan gula di pemasok sebenarnya masih mencukupi kebutuhan hingga Desember. Namun tetap saja izin impor *raw sugar* harus segera turun agar stok gula tidak terputus untuk kebutuhan awal tahun depan.

Kekhawatiran serupa tersirat dari surat yang dilayangkan PT Karunia Alam Segar, bagian dari Wings Food. Tiga pabrik Wings Food di Jawa Timur sejak 2016 juga bergantung pada pasokan gula rafinasi dari Kebun Tebu Mas sekitar 7.000 ton per bulan. Menjelang akhir tahun ini, seperti disebutkan dalam surat Wings Food, KTM kesulitan memasok gula rafinasi karena terbatasnya bahan baku.

Senior Public Relations Specialist Wings Group Indonesia Christie Rachel Lumban Tobing menyatakan manajemen perusahaannya tidak dapat menjawab upaya konfirmasi *Tempo* tentang surat yang dilayangkan Karunia Alam Segar. “Mohon maklum karena Wings adalah perusahaan swasta tertutup non-Tbk,” ujar Christie lewat pesan pendek, Sabtu, 14 November lalu.

•••

SAMBATAN sejumlah pelaku usaha makanan dan minuman bermula dari datangnya surat pemberitahuan PT Kebun Tebu Mas kepada mitra usahanya, Senin, 2 November lalu. Melalui surat tersebut, KTM menyampaikan informasi tentang penyediaan bahan baku gula mentah yang masih dalam perizinan. Dampaknya, produksi gula rafinasi kemungkinan besar terhambat.

KTM menjamin penjualan dan pengiriman gula rafinasi kepada mitra masih aman dalam satu bulan ke depan. Namun dampak keterlambatan izin impor harus mulai diantisipasi pada bulan berikutnya. “Penyediaan bahan baku akan berpengaruh pada penjualan atau pengiriman di periode bulan berikutnya karena sangat dipengaruhi kecepatan terbitnya izin impor oleh kementerian terkait,” demikian bunyi surat tersebut.

Advisor pabrik gula Kebun Tebu Mas, Adi Prasongko, enggan menjelaskan permasalahan bahan baku yang tengah dihadapi perusahaannya. Dia hanya menyatakan, pada Juni lalu, pemerintah telah memenuhi permintaan izin impor sebagai pengganti kuota 15 ribu ton yang “dipinjam” untuk program stabilisasi harga gula konsumsi.

KTM memang menjadi pabrik gula yang ditugasi pemerintah mengolah *raw sugar* menjadi gula kristal putih untuk konsumsi rumah tangga dari semestinya dijadikan gula rafinasi buat industri. Penugasan ini diputuskan pemerintah pada Februari-Maret lalu, ketika kelangkaan gula konsumsi memicu lonjakan harga.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) belakangan juga mengirimkan surat kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Selasa, 10 November lalu. Gapmmi menyatakan telah mendapat informasi tentang kurangnya bahan baku *raw sugar* dari para pemasok gula rafinasi. Gapmmi memperkirakan para pemasok hanya bisa menyuplai gula rafinasi ke industri sampai awal Januari 2021.



Agus Gumiwang Kartasasmita tiba di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Oktober 2019./TEMPO/Subekti

Asosiasi dan para pelaku usaha mendorong pemerintah agar dapat menurunkan izin impor November. Sebab, gagal panen di Thailand membuat *raw sugar* tak

mungkin didatangkan dari Negeri Gajah Putih tersebut. Walhasil, bahan baku harus diimpor dari Brasil, yang memerlukan waktu hingga dua bulan dari pemesanan, produksi, sampai pengiriman.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan stok gula rafinasi sebenarnya masih cukup hingga Desember. Namun, masalahnya, bahan baku untuk produksi Januari 2021 juga sudah harus tersedia sejak akhir tahun ini. "Transaksi dan perjalanan butuh waktu dua bulan. Maka izin harus segera diterbitkan," tutur Adhi, Jumat, 13 November lalu.

Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Bernardi Dharmawan mengatakan anggota asosiasi sebenarnya telah mengantongi izin impor bahan baku untuk periode semester II 2020 pada Juli lalu. Kini kuota impor tersebut juga telah terealisasi. "Sampai akhir tahun aman stoknya," ujar Bernardi saat dihubungi pada 13 November lalu.

Masalahnya, yang membikin ketar-ketir adalah stok bahan baku tahun depan. Pada September lalu, AGRI melayangkan pemberitahuan berupa estimasi kebutuhan 2021 yang bakal naik 5 persen. Namun pengajuan rencana impor hingga kini masih menunggu rapat koordinasi terbatas.

Menurut Bernardi, izin impor untuk 2021 idealnya diputuskan pada November. Dia khawatir keterlambatan izin impor tahun depan bisa berdampak pada berhentinya produksi di pabrik. "Beberapa pabrik akan habis bahan baku di awal Desember dan melakukan *maintenance*," ucapnya.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono menyatakan berbagai masukan dari pelaku industri makanan dan minuman kini tengah dibahas di tingkat kementerian teknis. "Kami juga sedang membahas revisi beberapa peraturan menteri, terkait dengan adanya keluhan atas kesulitan bahan baku impor, dan juga keluhan atas kendala ekspor."

AISHA SHAIDRA, RETNO SULISTYOWATI

Impor Gula Kelangkaan Gula

Kubu Presiden Donald Trump Menggugat Hasil Pemilihan Presiden Amerika



Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memberikan keterangan pers terkait hasil PemiluAmerika Serikat di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 5 November 2020. Reuters/Carlos Barria

- **Para pendukung Presiden Donald Trump meyakini hasil pilpres tak sesuai karena dicurangi. .**
- **Gugatan kubu Presiden Donald Trump di sejumlah negara bagian, antara lain Michigan dan Pennsylvania, mental karena tak ada buktinya. 21657**
- **Lembaga pemerintah menyatakan pilpres pada 3 November paling aman dalam sejarah Amerika. .**

RATUSAN pendukung Presiden Donald Trump berkumpul di depan kantor Gubernur Negara Bagian Michigan di Kota Lansing pada Rabu siang, 11 November lalu. Mereka memprotes hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat yang diduga curang, seperti yang dutuduhkan oleh Trump, pada 3 November lalu. Mereka juga menuntut Kongres menginvestigasi proses pemilihan. “Kami menang di pemilihan minggu lalu,” kata Nick Fuentes, orator aksi massa di

Lansing. Dia menyebut tim kampanye Trump juga memiliki bukti bahwa kecurangan terjadi di mana-mana. “Jangan percaya laporan media.”

Hasil penghitungan suara sementara menunjukkan kandidat presiden inkumben dari Partai Republik, Donald Trump, kalah sekitar 150 ribu suara dibanding perolehan sang penantang, Joe Biden, di wilayah Michigan. Biden meraup 2.795.975 suara atau sekitar 50,5 persen dari total pemilih. Trump akan sulit mengejar selisih suara sebanyak itu, mengingat surat suara yang dihitung sudah mencapai 99 persen.

Michigan merupakan salah satu negara bagian kunci dalam pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini. Negara bagian ini kerap berubah pilihan atau *swing state*. Kandidat presiden dari Partai Republik atau Demokrat sama-sama pernah menang di sini. Barack Obama pernah menang dalam pemilihan presiden 2008 dan 2012. Empat tahun berselang, meski menjadi basis partai Demokrat yang mendukung kandidat Hillary Clinton, mayoritas penduduk Michigan justru memilih pasangan Trump dan Mike Pence. Kemenangan Biden tahun ini mengembalikan dominasi Demokrat di sana.

Dalam pidato pertamanya di hadapan publik sejak kalah dalam pemilihan, Trump tetap tak mengakui kekalahannya. Dalam pidatonya pada Jumat, 13 November lalu, dia tak menyentuh isu pemilihan dan berkonsentrasi pada penanganan kasus pandemi Covid-19 yang berpotensi meningkat menjelang musim dingin. Menurutnya, pemerintahan Amerika tidak akan menjalani karantina alias *lockdown*. “Apa pun yang terjadi di masa mendatang, entah di pemerintahan siapa, saya menyatakan pemerintahan tidak akan berhenti,” kata Trump, yang langsung meninggalkan podium setelah menyelesaikan pidatonya dan tidak menanggapi pertanyaan para jurnalis.

Akhir pekan lalu, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joe Biden dan Kamala Harris mengumpulkan suara terbanyak dalam pemilihan. Alih-alih mengakui kekalahan dan memberi selamat kepada lawannya, Trump malah berulah. Sejak hari pemilihan, Trump terus melontarkan klaim kemenangan dan menuntut proses penghitungan suara dihentikan karena menilai ada kecurangan dalam pemilihan. Tapi tim kampanye Trump tak pernah menyodorkan bukti-bukti atas klaim tersebut.

Kubu Trump juga mengajukan gugatan di sejumlah negara bagian. Sehari setelah penghitungan suara, tim menggugat Sekretaris Negara Bagian Michigan ke Court of Claims, pengadilan yang mengurus gugatan terhadap pemerintah federal di Michigan. Dalam dokumen gugatan yang diperoleh *Tempo*, tim Trump mengklaim proses penghitungan suara yang masuk melalui jalur pos dilakukan

tanpa kehadiran saksi. Berbeda dengan di Indonesia, yang memiliki Komisi Pemilihan Umum, proses pemilihan di sana digelar oleh sekretaris negara bagian masing-masing.

Kantor Sekretaris Negara Bagian Michigan mengirimkan pernyataan resmi ke pengadilan yang membantah tudingan Trump. “Penggugat tidak menjelaskan di lokasi mana, kapan, bagaimana, dan bahkan siapa saksi yang tidak hadir dalam proses penghitungan yang mereka gugat tersebut,” kata Jonathan Brater, pengacara Sekretaris Negara Bagian Michigan. Pada Kamis, 12 November lalu, hakim Cynthia Stephens menolak gugatan itu karena tak berdasar dan bukti-bukti yang diajukan pun hanya “kabar angin”.

Gugatan tim kampanye Trump membuat para pendukungnya terbelah. Ketika Fuentes dan kawan-kawannya terus berunjuk rasa, Kate Williams, yang sebelumnya mendukung Trump, malah berharap Trump bisa menerima kekalahan dan gugatan soal hasil pemilihan segera berakhir. “Saya tidak tahu ada bukti kecurangan atau tidak,” kata Williams kepada *Tempo*. “Kalau memang ada kecurangan, buktikan saja ke pengadilan. Tapi, kalau hakim sudah bilang tidak ada kecurangan, sebaiknya menerima kekalahan.”

Kekalahan di Court of Claims tak menyurutkan langkah kubu Trump. Mereka kini menggugat Sekretaris Negara Bagian Michigan di Pengadilan Distrik Michigan Barat. Dalam salinan dokumen sebanyak 31 halaman, gugatan itu diajukan atas nama tujuh pemilih Trump di Michigan. Isi gugatan tersebut, antara lain, mengenai klaim adanya penyimpangan dalam pemilihan dan proses penghitungan suara.

Penggugat menyebut ada surat suara yang dihitung dua kali, saksi Partai Republik dihadang saat berusaha memantau proses penghitungan, dan ada surat suara yang tanggalnya tidak sesuai. Selain itu, penggugat menyebut petugas tempat pemilihan suara yang mengenakan kaus bertulisan “Biden” dan ada kesalahan pada perangkat lunak penghitung suara. Gugatan itu juga berisi lampiran testimoni sejumlah orang yang diwawancarai tim kampanye Trump. Meski demikian, laporan media-media lokal Michigan menyebut klaim kubu Trump tersebut tak memiliki bukti kuat.

Kubu Trump mengajukan hampir 20 gugatan ke pengadilan Michigan dalam tempo kurang dari sepekan. Jaksa Agung Negara Bagian Michigan Dana Nessel menyebut langkah itu sekadar untuk mencari informasi. Gugatan yang disampaikan pun minim bukti atau malah berisi fakta yang tidak benar. Nessel, seperti dilaporkan *ABC 7 Chicago*, menduga motif gugatan itu adalah untuk memperlambat proses pengesahan hasil pemilihan untuk Biden. “Tugas saya adalah melindungi negara dan kepentingan rakyat,” tuturnya.

Gugatan kubu Trump di Pengadilan Pennsylvania, seperti dilaporkan *Reuters* pada Jumat, 13 November lalu, juga terancam kandas. Tim pengacara Sekretaris Negara Bagian Pennsylvania dan tujuh *county* (setara kabupaten) di Pennsylvania menyatakan gugatan dari tim kampanye Trump tak punya bukti dan hanya didasari teori yang sudah banyak dibantah. "Pengadilan seharusnya bisa melihat sasaran gugatan ini, yaitu serangan terencana terhadap sistem pemilihan di Pennsylvania dan mengambil hak para pemilih yang sudah memberikan suaranya dengan sah," kata tim itu dalam dokumen yang dikirim ke pengadilan.

Biden meraup suara mayoritas pemilih di tujuh *county* di Pennsylvania yang disebutkan dalam gugatan tim Trump. Dengan sekitar 97 persen surat suara yang sudah dihitung, Biden berhasil mengungguli Trump lebih dari 53 ribu suara. Otoritas Pennsylvania dijadwalkan mengesahkan hasil pemilihan pada 23 November nanti.

Kisruh klaim Trump mempengaruhi proses serah-terima urusan administrasi dan dokumen kepada tim transisi pemerintahan Biden. Trump masih belum menyerahkan surat yang memungkinkan tim Biden mengakses administrasi dan kantor federal. Biasanya, kedua tim kandidat sudah menyelesaikan urusan transisi hanya dalam waktu beberapa jam setelah proyeksi pemenang pemilihan diumumkan. Tim Obama, misalnya, sudah memberikan surat penyerahan transisi sehari setelah Trump diumumkan menang pada 2016. Pada pemilihan 2008, urusan ini bahkan langsung selesai pada malam hari pemilihan. Hanya pada pemilihan 2000, ketika terjadi sengketa pemilihan antara George W. Bush dan Al Gore, urusan transisi tersendat hingga 37 hari.

Aksi protes di sejumlah negara bagian tempat kubu Trump yakin bisa meraup suara mayoritas, seperti di Georgia, Pennsylvania, Arizona, Minnesota, dan Wisconsin, juga terjadi. Kubu Trump juga mengklaim ada kecurangan dalam proses pemilihan di Kansas dan Ohio, yang justru dimenangi Trump. "Di Kansas tidak ada isu sistematis menyangkut kecurangan pemilih, intimidasi, atau masalah pemilihan lainnya," kata Scott Schwab, Sekretaris Negara Bagian Kansas yang juga anggota Partai Republik, seperti dilaporkan *The New York Times*, 11 November lalu.

Dalam pidato menyambut kemenangannya di Wilmington, Delaware, pada 10 November lalu, Biden mengajak semua warga Amerika untuk kembali bersatu dan menanggalkan perbedaan yang muncul selama kampanye hingga pemilihan. Dia juga menyindir aksi Trump yang tak mau mengakui kekalahannya sebagai warisan yang memalukan sebagai seorang presiden.

GABRIEL WAHYU TITIYOGA, INDRI MAULIDAR (MICHIGAN)

Harapan Baru dari Orang Lama

Joe Biden adalah orang lama di Gedung Putih. Selama delapan tahun dia menjadi wakil presiden pendamping Barrack Obama setelah mereka menang dalam pemilihan umum 2008 dan 2016. Kembalinya Biden ke Gedung Putih pada Januari mendatang, kali ini sebagai presiden, membuka harapan baru bagi Amerika Serikat, yang kerap diwarnai kontroversi selama empat tahun di bawah pimpinan Donald Trump.

Dalam pidato perdananya menyambut hasil pemilihan presiden 2020, Biden sudah menyinggung soal keberlanjutan program asuransi kesehatan masyarakat yang diprakarsai Obama tapi dipandang sebelah mata oleh Trump. Biden juga menyatakan akan meningkatkan pajak korporasi hingga 28 persen. Pada era Trump, pajak itu hanya sebesar 21 persen. Adapun penduduk dengan penghasilan kurang dari US$ 400 ribu setahun, menurut Biden, tidak perlu membayar berbagai pajak lagi.

Biden juga berjanji untuk langsung berfokus menangani pandemi Covid-19 yang makin merajalela dengan membentuk badan khusus. Salah satu penyebab meluasnya infeksi penyakit ini diduga adalah retorika dan perilaku Trump yang kerap meremehkan protokol kesehatan dan diikuti para pendukungnya. “Badan ini juga akan menjamin vaksin aman dan efektif serta didistribusikan secara efisien dan gratis,” kata Biden, seperti dilaporkan *NPR* pada Senin, 9 November lalu.



Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden Amerika Serikat terpilih Kamala Harris, menggelar pertemuan bersama Dewan Penasehat Transisi Covid 19, di Washington, Amerika Serikat, 9 November 2020. Reuteras/Jonathan Ernst

Sektor lain yang disasar Biden adalah urusan imigrasi. Dia berjanji membuat aturan imigrasi komprehensif yang dapat membantu 11 juta imigran ilegal

mendapatkan kewarganegaraan. Biden juga berencana membuat keputusan untuk menghentikan pemisahan keluarga imigran dari Meksiko yang sebelumnya kerap terjadi pada era Trump.

Biden juga memasukkan urusan reformasi polisi, isu lingkungan hidup, serta urusan relasi dan kerja sama Amerika dengan negara lain dalam program kerjanya. Dalam kampanyenya sebelum pemilihan umum, Biden menyatakan Amerika membutuhkan pemimpin yang bisa memperbaiki kebijakan luar negeri Trump yang berantakan dan kerusakan yang dibuatnya di dunia.

GABRIEL WAHYU TITIYOGA (*NPR*, *CNBC*, *WASHINGTON POST*)

Ancaman terhadap Demokrasi Donald Trump Joe Biden Pemilu Amerika

Partai Aung San Suu Kyi Menang tapi Citranya Terus Melorot



Simpatisan NLD merayalan kemenangan partainya di kantor pusat NLD, di Yangon, Myanmar, 9 November 2020. Reuters/Shwe Paw Mya Tin

- **Liga Nasional untuk Demokrasi kembali menang dalam pemilihan umum Myanmar. .**
- **Pemilihan umum diwarnai penangkapan aktivis dan larangan pencoblosan di Rakhine. 21657**
- **Citra Aung San Suu Kyi terus melorot setelah serangan militer terhadap kaum Rohingya pada 2017. .**

HASIL pemilihan umum Myanmar pada Ahad, 8 November lalu, mengamankan langkah Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), memperpanjang kekuasaan mereka. Hasil penghitungan suara sementara menunjukkan NLD menang telak dengan meraih 346 dari 412 kursi parlemen. Juru bicara NLD, Myo Nyunt, mengatakan hasil pemilihan ini diharapkan dapat membantu memperkecil konflik politik.

Ini pemilihan umum kedua di Myanmar setelah pemilihan pada 2015 yang juga dimenangi NLD yang mengakhiri lebih dari lima dekade kekuasaan junta militer. "Masyarakat menyadari bahwa NLD membutuhkan suara yang cukup untuk membentuk pemerintahan sesuai keinginan mereka," kata Myo Nyunt, seperti dilaporkan *Al Jazeera* pada Jumat, 13 November lalu.

Pemilihan umum ini berlangsung di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang terus meningkat. Sejak Agustus lalu, tercatat ada 60 ribu kasus Covid-19 dan lebih dari 1.300 korban meninggal di sana. Permintaan untuk menunda pemilihan tak digubris pemerintah. Komisi Pemilihan Umum juga menilai pemilihan harus terus berjalan dan menjamin pelaksanaannya dengan protokol kesehatan. Komisi menyatakan pemilihan telah digelar secara bebas, adil, dan transparan.

Menurut anggota NLD, Monywa Aung Shing, kemenangan partainya membuktikan bahwa publik memberikan dukungan besar. Partai itu juga menyatakan akan mengajak kelompok etnis minoritas untuk berkolaborasi. "Kita masih harus bekerja untuk membentuk pemerintahan nasional yang bersatu," kata dia kepada *BBC*.

Tapi, tanpa menunjukkan bukti-buktinya, pesaing terkuat NLD, Partai Solidaritas dan Pembangunan Bersatu (USDP), menuding pemerintah tak beres mengurus pemilihan umum. Dalam keterangan pers pada Rabu, 11 November lalu, USDP, yang disokong angkatan darat, tak mengakui hasil pemilihan. Mereka menuntut pemerintah menggelar pemilihan yang bebas, adil, dan tidak bias.

Hasil pemilihan ini membantu menggenjot citra Suu Kyi yang masih populer di kalangan masyarakat Bamar, etnis mayoritas di negeri itu. Tapi, di mata dunia, pamor perempuan 75 tahun itu terus melorot setelah serangan militer Myanmar terhadap etnis minoritas muslim Rohingya pada 2017. Lebih dari 700 ribu orang Rohingya mengungsi setelah tentara menyerbu Negara Bagian Rakhine untuk memburu milisi Arakan Rohingya. Hingga saat ini, banyak orang Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh dan negara lain. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut serangan itu sebagai genosida. Pemerintah Myanmar membantah tudingan itu dan mengklaim bahwa militer hanya memburu milisi pemberontak Arakan.

Pemilihan umum kali ini praktis tak memberi ruang bagi suara kaum Rohingya di Rakhine. Komisi Pemilihan melarang sebagian besar wilayah itu menggelar pemilihan dengan alasan keamanan. "Warga Rohingya bahkan tak bisa memberikan suara dan mendapatkan kewarganegaraan gara-gara aturan diskriminatif," kata aktivis lembaga pembela hak asasi manusia Fortify Rights, John Quinley, seperti dilaporkan *CNN*.

Pemilihan umum ini juga diwarnai pembungkaman terhadap sejumlah aktivis pro-demokrasi. Sebelum pemilihan, 14 mahasiswa diciduk polisi dari rumah dan kampus mereka karena dinilai melanggar aturan berkumpul secara damai dan mengganggu ketertiban umum. Sebagian mahasiswa yang lolos dari kejaran polisi akhirnya terpaksa bersembunyi. Informasi penahanan para pelajar itu muncul dalam laporan Federasi Persatuan Mahasiswa Burma (ABFSU) dan Asosiasi Pendampingan Tahanan Politik Myanmar (AAAP).

ABFSU merupakan bagian dari kelompok pro-demokrasi yang aktif sejak 1930-an dan membuka jalan bagi kelompok sipil Myanmar masuk pemerintahan. Organisasi ini memiliki relasi khusus dengan Aung San, ayah Suu Kyi, yang menjadi salah satu pendirinya. Tapi, pada rezim Suu Kyi, organisasi itu justru semakin ditekan, apalagi setelah mereka berkampanye untuk memboikot pemilihan umum. Suu Kyi, dalam konferensi bersama sejumlah pejabat negara pada 5 Agustus lalu, mengatakan ajakan untuk memboikot pemilihan merupakan tindakan tak bertanggung jawab.

Kampanye mengkritik pemerintah itu dimulai sejak Agustus lalu. Para aktivis mendistribusikan selebaran berisi slogan seperti “diktator harus dihentikan” dan “lawan fasis pembunuh” di berbagai kota. Mereka juga menuntut jaringan Internet di Negara Bagian Rakhine, wilayah yang terus ditekan militer untuk menghentikan perlawanan milisi, dipulihkan. Swam Pyae Tae, mahasiswa yang kini dalam persembunyian, mengatakan mereka hanya ingin perang sipil di Rakhine dihentikan. “Kami hanya menginginkan perdamaian,” kata Swam kepada radio *Free Asia*.

Human Right Watch menyebut pemerintah Myanmar telah mengintimidasi dan mempersekusi para mahasiswa yang menyampaikan pandangan mereka dengan damai. Tindakan polisi juga dinilai berlebihan karena menyamakan aktivitas yang membagikan stiker dan selebaran dengan aksi berkumpul. “Mengkritik atau mengikuti aksi memprotes pemerintah dengan damai bukanlah tindak kriminal,” tutur aktivis Human Right Watch, Linda Lakhdir.

Penahanan para aktivis itu menodai kemenangan Suu Kyi, yang dulu menjadi ikon demokrasi dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian. Apalagi pengaruh militer masih sangat kuat di pemerintahan. Sejak sukses meraih dukungan publik lewat pemilihan umum pada 2015 dan menjabat di Dewan Negara, Suu Kyi tak banyak mengubah aturan represif di negerinya.

Alih-alih membangun demokrasi, pemerintah malah mempersekusi kelompok oposisi, aktivis politik, dan para jurnalis yang memberitakan isu-isu yang dianggap sensitif. Kasus yang paling populer adalah penangkapan dua jurnalis *Reuters*, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, pada 2017. Mereka merilis laporan

investigasi pembunuhan 10 muslim Rohingya yang dilakukan tentara dan kelompok Buddha garis keras selama serangan militer di Rakhine. Keduanya divonis bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Negara dan dihukum 7 tahun penjara. Tapi, pada 2019, mereka bebas setelah mendapat amnesti dari Presiden Myanmar.

Aksi pemerintah Myanmar memberangus kelompok pro-demokrasi membuat kepercayaan terhadap Suu Kyi terus merosot. Sebagian pendukungnya pun membelot. Hnin, salah satu aktivis mahasiswa, mengatakan Suu Kyi gagal memenuhi janjinya untuk menyatukan warga Myanmar. "Saya tak mempercayainya lagi," kata perempuan 21 tahun itu, seperti dikutip *Reuters*. "Mustahil mencapai demokrasi dengan jalan yang diambilnya."

Ye Wai Phyo Aung, pendiri organisasi pembela hak asasi manusia Athan, menilai pemerintahan Suu Kyi sangat mengecewakan. Memilih NLD pada 2015 ketika usianya menginjak 20 tahun, Ye Wai kini berbalik melawannya dengan menuntut demokrasi dan kebebasan berpendapat di negerinya.

Sejak Suu Kyi dan NLD berkuasa, gugatan yang diajukan militer terhadap warga sipil justru meningkat. Athan mencatat, tentara Myanmar telah mengajukan 47 gugatan terhadap 96 orang, termasuk 51 aktivis, 4 seniman, dan 3 anggota partai politik. Menurut Ye Wai, pemerintah kini juga memburu anggota Athan. "Intel-intel mengamati kegiatan kami di media sosial dan mengumpulkan informasi tentang kami," ucap Ye Wai kepada *Deutsche Welle*.

GABRIEL WAHYU TITIYOGA (ASSOCIATED PRESS, RADIO FREE ASIA, IRRAWADY, MYANMAR TIMES, NATIONAL PUBLIC RADIO, THE DIPLOMAT)

Ancaman terhadap Demokrasi Pemilihan Umum Derita Rohingya Myanmar

Deklarasi Anti-Aborsi oleh 32 Negara, antara Niat Melindungi Perempuan dan Merampas Hak Asasi



Warga Polandia memprotes keputusan Pengadilan Konstitusional yang memberlakukan larangan terhadap aborsi, di depan Parlemen di Warsawa, Polandia 27 Oktober 2020. Maciek Jazwiecki / Agencja Gazeta

- **Polandia menunda pengetatan aborsi setelah dilanda protes besar selama dua pekan. .**
- **Sebanyak 32 negara meneken Deklarasi Konsensus Jenewa yang menghapus aborsi. 21657**
- **Indonesia termasuk negara penanda tangan Deklarasi. .**

ABORTION Dream Team biasanya menerima 400 panggilan telepon setiap bulan dari para perempuan yang mencari informasi dan nasihat tentang aborsi. Namun, pekan lalu, organisasi Polandia yang membantu perempuan mendapatkan akses terhadap aborsi itu menerima 700 panggilan hanya dalam tiga hari. Sebagian

berasal dari perempuan yang baru tiba di rumah sakit untuk melakukan aborsi karena janinnya cacat, tapi ditolak setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pelarangan aborsi.

"Mereka cemas dan sedih dan tak tahu harus berbuat apa," kata Justyna Wydrzynska, anggota Abortion Dream Team, kepada *CNN*, Ahad, 1 November lalu. "Mereka tak bisa meminum pil (aborsi) karena (usia kehamilannya) lebih dari 20 pekan sehingga berbahaya bagi ibu dan janin." Menurut Layanan Kesehatan Nasional (NHS) Inggris, lembaga yang mirip Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di sini, penggunaan pil aborsi membutuhkan penanganan yang lebih rumit bagi usia kandungan di atas 14 minggu.

Pada akhir Oktober lalu, Mahkamah Konstitusi Polandia memutuskan bahwa pasal yang mengizinkan aborsi dalam kasus janin cacat dalam undang-undang tahun 1993 melanggar konstitusi. Kalaupun dibolehkan, aborsi hanya diizinkan dalam kasus pemerkosaan, inses, dan risiko atas kesehatan ibu. Peninjauan atas aturan itu diajukan oleh sejumlah anggota parlemen dari partai politik penguasa, Partai Hukum dan Keadilan, pada tahun lalu.

Putusan itu praktis melarang hampir semua permintaan aborsi karena 98 persen kasus aborsi di negeri itu terjadi karena janin cacat. Menurut *BBC*, diperkirakan seribu aborsi terjadi di Polandia pada tahun lalu. Tanpa pengetatan pun perempuan sering kesulitan menjalani aborsi karena seperti ada stigma terhadap pelaku aborsi. Kelompok hak-hak perempuan memperkirakan 80-120 ribu perempuan Polandia menjalani aborsi di luar negeri untuk mengatasi kerepotan di dalam negeri.

Pengetatan aturan aborsi memicu unjuk rasa besar di Polandia selama dua pekan lebih. Berbagai protes memaksa pemerintah menunda pelaksanaan putusan itu. "Ada pembahasan yang sedang berlangsung, dan ada baiknya mengambil jeda dengan berdialog dan menemukan posisi baru terhadap keadaan yang sulit dan memancing emosi ini," ucap Michał Dworczyk, Kepala Kantor Perdana Menteri Polandia, seperti dikutip *Guardian*, Selasa, 3 November lalu.

Perdana Menteri Mateusz Morawiecki meminta dialog dengan pemrotes dan anggota parlemen dari partai oposisi. Adapun Presiden Andrzej Duda menawarkan aturan baru yang memungkinkan aborsi dalam kasus janin cacat tapi tidak dalam kasus seperti *down syndrome.*



Aksi membagian perlengkapan dan kebutuhan bayi oleh aktivis anti aborsi, di Waren, Michigan, Amerika Serikat, 16 Oktober 2020./Reuters/Emily Elconin

Kelompok-kelompok hak asasi manusia meminta pemerintah tidak mengetatkan aturan ini. Komisioner HAM Dewan Eropa menyebut hari keluarnya putusan itu sebagai "hari sedih bagi hak-hak perempuan". "Menghapus dasar bagi hampir semua kasus aborsi legal di Polandia itu melanggar hak asasi manusia," tutur komisioner Dunja Mijatovic.

Putusan itu membuat Polandia, bersama Malta, menjadi negara anggota Uni Eropa yang mengatur aborsi secara ketat. Di Malta aborsi bahkan sepenuhnya dilarang, meskipun saat nyawa perempuan yang mengandung terancam.

Dorongan memperketat aturan aborsi pelan-pelan merambat di berbagai negara di Eropa. Di Slovakia, misalnya, para anggota parlemen dari partai ultrakonservatif Serikat Kristen, anggota koalisi partai berkuasa Orang Biasa dan Pribadi Independen (OLANO), berusaha mendorong lahirnya aturan yang memperketat tindakan aborsi. Mereka membahas rancangan undang-undang baru tentang aborsi itu secara diam-diam di parlemen dan tanpa banyak sorotan media. Usaha mereka mentok saat berlangsung pemungutan suara pada 20 Oktober lalu. Hanya 58 dari 117 legislator yang mendukung usul itu.

Namun gerakan besar untuk menentang aborsi sesungguhnya terjadi ketika 32 negara, termasuk Polandia dan Indonesia, menandatangani Deklarasi Konsensus Jenewa untuk Mendukung Kesehatan Perempuan dan Memperkuat Keluarga. Peresmian deklarasi itu dilakukan dalam sebuah pertemuan daring yang diampu oleh Amerika Serikat pada 22 Oktober lalu. Deklarasi itu tidak mengikat sehingga tergantung setiap negara untuk mewujudkannya dalam bentuk kebijakan dan undang-undang nasional.

Deklarasi yang ditaja oleh Amerika, Brasil, Mesir, Hungaria, Indonesia, dan Uganda ini menekankan perlunya ketahanan keluarga dan menyatakan bahwa aborsi tidak boleh dipromosikan sebagai metode keluarga berencana. Deklarasi itu bahkan juga menegaskan bahwa tidak ada hak internasional atas aborsi atau kewajiban internasional apa pun bagi negara untuk mendanai atau memfasilitasi aborsi.

Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo bersama Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Alex Azar hadir dalam forum *online* tersebut. Pompeo menggarisbawahi bahwa tak ada hak internasional atas aborsi. "Setiap negara punya hak berdaulat untuk menentukan hukumnya sendiri mengenai aborsi," katanya.

Dalam sambutannya di forum itu, Menteri Kesehatan Indonesia Terawan Agus Putranto mengatakan Indonesia mendukung penuh deklarasi tersebut tanpa menyebutkan soal aborsi. "(Deklarasi) ini menjadi pendorong untuk memperkuat komitmen dan tindakan kolektif kita untuk memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di semua aspek, termasuk kesehatan," ujar Terawan dalam siaran pers Kementerian Kesehatan.

Upaya Amerika di bawah Presiden Donald Trump untuk menghapus aborsi dari kamus kesehatan sudah berjalan lama. Saat hadir dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2019, Trump menyatakan, "Kami di Amerika percaya bahwa setiap anak—terlahir ataupun tidak—adalah rahmat dari Tuhan." Pompeo menyatakan, selama masa pemerintahan Trump, tak ada satu sen pun duit negara yang mengalir ke organisasi non-pemerintah asing yang mendukung atau aktif mempromosikan aborsi sebagai metode keluarga berencana.

Pemerintah Amerika juga menentang istilah "kesehatan reproduksi". Dalam sidang umum PBB itu, Menteri Azar mendesak para pemimpin dunia tidak memasukkan istilah seperti "kesehatan dan hak reproduksi" ketika membahas akses kesehatan. Beberapa bulan sebelumnya, pemerintah Trump juga meminta Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menghapus semua referensi tentang kesehatan reproduksi dan aborsi dari rencana tanggap kemanusiaan PBB untuk pandemi Covid-19.

Amnesty International mengecam deklarasi internasional tersebut. Tarah Demant, Direktur Program Gender, Seksualitas, dan Identitas Amnesty International Amerika, menyebut deklarasi itu sebagai kemunduran besar bagi Amerika. "Setiap perempuan, gadis, atau orang yang hamil punya hak asasi untuk aborsi. Titik. Ini soal orang memenuhi hidupnya sendiri—bukan kehidupan yang didiktekan pemerintah untuk mereka," kata Demant dalam pernyataannya.

Amnesty berseru kepada Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan agar tidak menerapkan ketentuan dalam deklarasi itu. “Pemerintah ini tampaknya tak akan berhenti sampai mereka sepenuhnya menginjak-injak hak-hak, otonomi, dan martabat para perempuan dan gadis di mana saja,” tuturnya. “Setiap orang punya hak atas diri pribadi dan otonomi atas tubuhnya, meskipun pemerintah ini ingin menentukan yang lain.”

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menilai deklarasi itu merupakan upaya membongkar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan kerangka kerja internasional tentang perlindungan perempuan serta kelompok seksual rentan. Data PKBI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan, selama masa pandemi Covid-19, terdapat ratusan ribu laporan kasus kehamilan tidak diinginkan yang membebani perempuan.

“Deklarasi itu tidak *legitimate*, tidak mengikat, dan tidak menunjukkan keberpihakan kuat pada upaya negara untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, terutama selama pandemi Covid-19,” ucap Direktur Eksekutif PKBI Eko Maryadi kepada *Tempo*.

IWAN KURNIAWAN (GUARDIAN, BC, CNN)

Donald Trump Aborsi dan Permasalahannya Polandia Hak Perempuan Amerika Serikat

Semua Legislator Oposisi di Hong Kong Mundur



Legislator pro-demokrasi mengumumkan pengunduran diri dari Dewan Legislatif di Hong Kong, Cina, 11 November 2020. REUTERS/Tyrone Siu

Hong Kong

Semua Legislator Oposisi Mundur



Dewan Legislatif prodemokrasi Hong Kong memberikan pernyataan pers bahwa mereka mundur, setelah kebijakan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cina yang represif. Reuters/Tyrone Siu

SEMUA anggota Dewan Legislatif prodemokrasi mundur pada Rabu, 11 November lalu. Mereka menguasai 19 dari 70 kursi di lembaga legislatif Hong Kong tersebut. "Kami harus melakukannya," kata Claudia Mo, politikus partai oposisi Hong Kong First yang turut mundur. "Kami perlu memprotes apa yang bisa menjadi tindakan keras Beijing terhadap Hong Kong—untuk membungkam perbedaan pendapat terakhir di kota ini," ujarnya kepada *BBC*.

Hal itu terjadi setelah Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cina mengeluarkan kebijakan yang represif. Pemerintah Cina menetapkan bahwa anggota parlemen akan didiskualifikasi jika mendukung kemerdekaan Hong Kong, menolak mengakui kedaulatan Cina, meminta pasukan asing ikut campur dalam urusan wilayah otonom tersebut, atau dengan cara lain mengancam keamanan nasional.

Selama ini, Hong Kong menerapkan "satu negara, dua sistem" yang menjamin banyak hak dan kebebasan warga kota itu. Tapi, pada akhir Juni lalu, Cina menerbitkan undang-undang keamanan nasional yang mengurangi otonomi Hong Kong dan memudahkan Beijing menghukum para demonstran prodemokrasi.

Uni Emirat Arab

Amendemen Hukum Pidana



Foto Presiden Uni Emirat Arab, Syekh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Reuters/Ahmed Jadallah

PRESIDEN Uni Emirat Arab (UEA) Syekh Khalifa bin Zayed al-Nahyan dikabarkan telah mengamendemen beberapa undang-undang yang akan mengubah sejumlah ketentuan pidana. Ia antara lain menghapus pasal yang meringankan status "kejahatan kehormatan". Selama ini, hakim biasanya meringankan hukuman bagi orang yang membunuh saudara perempuan yang dianggap merusak kehormatan keluarga. Kabar itu dilansir kantor berita UEA, *WAM*, tanpa menyebutkan sumber pemerintah yang menjadi rujukannya pada Sabtu, 7 November lalu.

Undang-Undang Status Pribadi dan Undang-Undang Transaksi Sipil juga diamendemen sehingga memungkinkan mereka yang bukan warga negara Emirat memilih hukum waris dan perceraian negara asalnya daripada hukum Emirat yang berbasis syariat Islam. Hal ini dilakukan, menurut *WAM*, "untuk mencapai stabilitas kepentingan keuangan investor asing di negara UEA".

Menurut *Guardian*, pemerintah juga mencabut larangan tinggal serumah bagi pasangan tak menikah dan menghapus sanksi pidana terkait dengan alkohol bagi orang asing. Selama ini, meskipun minuman beralkohol tersedia di restoran dan bar, orang perlu izin untuk membeli atau menyimpannya di rumah. Aturan itu juga memungkinkan kaum muslim, yang tak mungkin mendapatkan izin, meminum alkohol secara bebas.

Cina

Beijing Menangguhkan IPO Ant Group

PEMERINTAH Cina mendadak menangguhkan penawaran saham perdana (IPO) Ant Group Co senilai US$ 35 miliar atau hampir Rp 500 triliun hanya dua hari sejak masuk Bursa Saham Shanghai pada Jumat, 6 November lalu. Penangguhan ini awal dari kebijakan baru Beijing untuk mengendalikan kerajaan teknologi finansial yang dipegang oleh Jack Ma itu. Alibaba—milik Jack Ma—adalah pemilik saham terbesar ketiga Ant.

Pada Rabu, 11 November lalu, Bursa Saham Shenzhen juga menolak IPO perusahaan pengembang perangkat lunak Jiangsu Netin Technologies. Seperti dikutip *Fortune*, Manran Ma, manajer umum di Beijing Mamanran Asset Management, menyebutkan penangguhan IPO Ant Group dapat dilihat sebagai sinyal bahwa regulasi Cina belakangan ini akan relatif lebih ketat daripada sebelumnya.

Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi berencana memperketat aturan kredit, sumber pendapatan terbesar Ant. Komisi, misalnya, bakal meminta operator

platform menyediakan setidaknya 30 persen pendanaan untuk pinjaman, yang akan mempersulit transaksi di Ant.

Dalam sebuah konferensi di Shanghai pada akhir Oktober lalu, Jack Ma mengkritik kebijakan Cina yang menghambat inovasi. Komentarnya ini keluar setelah Wakil Presiden Cina Wang Qishan meminta perimbangan antara inovasi finansial dan regulasi yang ketat untuk mencegah krisis keuangan.

Hong Kong Cina | Pemerintah Cina Fintech Uni Emirat Arab

Ringkasan Berita: Tanda Jasa Sarat Kontroversi dan Raibnya Duit Rp 20 Miliar di Rekening Maybank



Presiden Joko Widodo menghadiri penganugerahan Tanda Kehormatan Mahaputera dan Bintang Jasa di Istana Negara Jakarta, 11 September 2020. ANTARA/HO/Setpres Kris

PEMBERIAN tanda jasa dan tanda kehormatan dalam rangka Hari Pahlawan 2020 menuai polemik. Kontroversi itu terkait dengan daftar nama penerima penghargaan. Salah satunya bekas Panglima Tentara Nasional Indonesia, Gatot Nurmantyo, yang menerima anugerah Bintang Mahaputera Adipradana.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sempat menyebut Gatot bersedia menerima penghargaan itu dari Presiden Joko Widodo. “Sudah mengambil undangan,” kata Heru di Jakarta pada Selasa, 10 November lalu. Namun, saat penyerahan penghargaan sehari kemudian, Gatot tak datang.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengatakan Gatot mengirimkan surat kepada Presiden ihwal alasannya tidak hadir dalam acara tersebut. “Pak Gatot Nurmantyo menyatakan menerima bintang jasa itu, tapi beliau tidak bisa hadir karena alasan Covid-19,” ujar Mahfud dalam

keterangannya, Rabu, 11 November lalu.

Sejumlah pegiat demokrasi juga mengkritik penyematan Bintang Mahaputera kepada hakim Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai penghargaan itu akan mempengaruhi independensi Mahkamah dalam memutus sejumlah perkara. Salah satunya peninjauan kembali Undang-Undang Cipta Kerja. Para pengadil yang menerima tanda jasa itu antara lain Ketua Mahkamah dan wakilnya, Anwar Usman dan Aswanto, serta hakim Arief Hidayat.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah anggapan bahwa pemberian penghargaan dari Presiden akan menggoyang independensi Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, beberapa mantan hakim MK, seperti Jimly Asshiddiqie dan Hamdan Zoelva, pernah menerima tanda jasa serupa tapi tetap memegang teguh independensi hakim. “Bintang itu memberi penghormatan istimewa bagi mereka yang berjasa untuk bangsa dan negara,” ucap mantan Panglima TNI tersebut.

Bintang Jasa untuk Bekas Pembantu

PRESIDEN Joko Widodo memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada semua menteri yang membantunya pada periode pertama pemerintahannya. Para dokter dan tenaga medis yang gugur selama pandemi Covid-19 juga menerima penghargaan tersebut.

Bintang Mahaputera Adipradana
Penerima: 46 orang
Antara lain:
• **Puan Maharani,** Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2014-2019
• **Luhut Binsar Pandjaitan,** Menteri Koordinator Kemaritiman 2016-2019
• **Pratikno,** Menteri Sekretaris Negara
• **Tito Karnavian,** Kepala Kepolisian RI 2016-2019

Bintang Mahaputera Utama
Penerima: 18 orang
Antara lain:
• **Khofifah Indar Parawansa,** Menteri Sosial 2014-2018
• **Mulyono,** Kepala Staf TNI Angkatan Darat 2015-2018

Bintang Jasa Utama
Penerima: 2 orang

• **Agus Gumiwang Kartasasmita,** Menteri Sosial 2018-2019
• **Syafruddin,** Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2018-2019

Bintang Jasa Pratama dan Bintang Jasa Nararya
Penerima:
• 21 dokter dan perawat yang meninggal selama pandemi Covid-19

KPK Selidiki Proyek Gereja Mimika

KOMISI Pemberantasan Korupsi telah memeriksa 30 saksi terkait dengan dugaan skandal korupsi pembangunan Gereja Kemah Injil Indonesia (Kingmi) di Mile 32 Timika, Papua. Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan jumlah saksi tersebut mungkin bertambah. "Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan atas dugaan korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap pertama," tutur Ali, Rabu, 4 November lalu.

Menurut Ali, para saksi berasal dari kalangan aparat pemerintah daerah Mimika, swasta, dan tokoh agama. Pejabat yang diperiksa antara lain Sekretaris Daerah Mimika Ausilius You dan Kepala Dinas Pendapatan Mimika 2013-2015, Cheryl Lumenta.

Penyidik juga telah meminta keterangan dari pihak swasta, di antaranya Kepala Cabang PT Darma Abadi Consultant Muhammad Natsar. Ali mengatakan penyidik mendalami proses pencairan anggaran proyek yang berlangsung pada 2015 tersebut.

Tuduhan Gratifikasi Suharso Monoarfa



MENKO Polhukam Mahfud MD (tengah), dan Menteri PPN/Kelapa Bappenas Suharso Monoarfa di Kantor Presiden, Jakarta, Februari 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suharso Monoarfa, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima gratifikasi. Pelapor yang juga kader PPP, M. Nizar Dahlan, menuding Suharso menerima bantuan berupa carter jet pribadi saat berkunjung ke Medan dan Aceh.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan lembaganya akan menganalisis dan memverifikasi data itu. “Jika ditemukan indikasi peristiwa pidana, tidak tertutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah hukum berikutnya,” kata Ali pada Jumat, 6 November lalu.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai laporan tersebut mengada-ada. “Bantuan pesawat itu dalam kapasitas sebagai pengurus partai, bukan pejabat negara,” ucapnya. Tujuan kegiatan tersebut, Arsul menambahkan, adalah pertemuan dan sosialisasi muktamar PPP pada Desember mendatang.

Pegawai KPK Mundur Lagi

PEGAWAI senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Nanang Farid Syam, mengundurkan diri dari lembaga tersebut setelah bekerja selama 15 tahun. Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu masuk ke komisi antikorupsi melalui program Indonesia Memanggil Jilid I pada 2005. “Sepertiga usia saya jalani

bersama KPK," tulis Nanang dalam surat pengunduran dirinya pada Kamis, 12 November lalu.

Nanang meminta surat pengunduran dirinya diproses sebelum 16 Desember mendatang. Dalam suratnya, dia juga menyinggung soal perubahan yang terjadi di KPK.

Setelah Undang-Undang KPK direvisi, belasan pegawai lembaga itu mundur. Sebelum Nanang, mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, mundur dengan alasan situasi di komisi antikorupsi sudah berubah. Menurut undang-undang baru, semua pegawai KPK akan menjadi aparat sipil negara.

Maybank Akan Gugat Balik Nasabah



Anjungan tunai mandiri (ATM) di kantor pusat Maybank, Jakarta, Maret 2017. TEMPO/Tony Hartawan

PT Maybank Indonesia Tbk berencana menggugat balik atlet *e-sport,* Winda Lunardi, atas kasus pembobolan uang yang dilakukan Kepala Cabang Maybank Cipulir, Jakarta, berinisial AT. Kuasa hukum Maybank, Hotman Paris Hutapea, mengatakan ada kejanggalan dalam perkara yang menyebabkan duit di rekening Winda dan ibunya raib tersebut. "Akan kami gugat balik," ujar Hotman pada Senin, 9 November lalu.

Winda membuka rekening tabungan berjangka senilai Rp 15 miliar atas namanya

dan Rp 5 miliar atas nama ibunya di Maybank Cipulir pada 2014. Belakangan, duit yang tersisa hanya sekitar Rp 17 juta dan Rp 600 ribu. Menurut hitungan mereka, uang itu seharusnya berjumlah Rp 22 miliar. Winda melaporkan kasus ini ke kepolisian.

Head of Financial Crime Compliance and National Anti-Fraud Maybank Indonesia, Nehemia Andiko, menyebutkan salah satu keanehan kasus ini adalah Winda tak memegang kartu anjungan tunai mandiri dan buku tabungan setelah membuka rekening. Justru kepala cabang yang memegangnya. “Sebagai pemilik uang, kenapa dibiarkan?” tuturnya.

Undang-Undang KPK Wadah Pegawai KPK Partai Persatuan Pembangunan | PPP Suharso Monoarfa Maybank Indonesia Gatot Nurmantyo

Wawancara Ketua Konsil Kedokteran Taruna Ikrar: Rencana Impor Dokter Asing, Dokter Indonesia Harus Bersiap -



Ketua Konsil Kedokteran Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, PhD. (foto: Dok. Taruna Ikrar)

- **Ketua Konsil Kedokteran Taruna Ikrar menyambut positif wacana pemerintah mempermudah izin praktik dokter asing di Indonesia. .**
- **Indonesia akan membutuhkan tambahan 160 ribu dokter sampai tahun 2030, meski menurut IDI saat ini jumlah dokter sudah memadai. 21657**
- **Taruna Ikrar memutuskan kembali ke Tanah Air setelah diminta oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk membantunya sebagai staf ahli .**

BAGI Ketua Konsil Kedokteran Taruna Ikrar, masuknya dokter berkewarganegaraan asing untuk berpraktik di Indonesia tinggal menunggu waktu. Cepat atau lambat, para dokter di Tanah Air harus mempersiapkan diri menghadapi persaingan bebas. Apalagi, kata dia, Indonesia menghadapi kekurangan dokter dalam beberapa tahun mendatang. “Kita masih kekurangan

sekitar 160 ribu dokter sampai 2030," ucap Taruna, 51 tahun, dalam wawancara khusus dengan *Tempo* di kantornya, Rabu, 11 November lalu.

Wacana tentang perlunya dibuka kesempatan bagi dokter asing berpraktik di Indonesia dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam berbagai kesempatan. Tujuannya agar masyarakat Indonesia tidak lagi berobat ke luar negeri. Impor dokter asing juga bertujuan menambal kekurangan jumlah dokter di dalam negeri. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menentang keras rencana pemerintah dan menyatakan jumlah dokter di Indonesia sudah mencukupi. Hanya, distribusinya belum merata.

Taruna, mengutip data Badan Kesehatan Dunia (WHO), mengatakan rasio jumlah dokter idealnya adalah 0,4 persen dari populasi atau empat dokter untuk 1.000 orang. "Jumlah dokter kita masih 250-an ribu (rasio dokter 1 : 100.000 versi Kementerian Kesehatan)," ujarnya. Menurut Taruna, pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir dan telah merenggut nyawa sedikitnya 132 dokter membuat rencana mendatangkan dokter dari luar negeri makin relevan.

Setelah bertahun-tahun berkecimpung sebagai dokter dan ilmuwan di Jepang dan Amerika Serikat, Taruna kembali ke Tanah Air dan menempati sejumlah posisi penting. Atas permintaan Terawan Agus Putranto—mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto yang kini menjadi Menteri Kesehatan—Taruna didapuk sebagai staf ahli hingga terpilih sebagai salah satu dari 17 anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mewakili Kementerian Kesehatan.

Kepada wartawan *Tempo*, Mahardika Satria Hadi dan Nur Alfiyah, Taruna mengatakan kepakarannya dalam riset neurosains berjodoh dengan kebutuhan Terawan yang tengah mengembangkan Cell Cure Center di RSPAD. "Saya jadi staf ahli beliau sejak 2017," ucapnya. Taruna juga menanggapi tentang perlunya memperbaiki uji kompetensi dokter hingga gugatan IDI dan sejumlah organisasi profesi kedokteran menyangkut kepengurusan KKI.

Pemerintah berencana mempermudah izin bagi dokter berkewarganegaraan asing berpraktik di Indonesia. Bagaimana Konsil Kedokteran Indonesia merespons wacana ini?

Konsil Kedokteran Indonesia sampai sekarang belum ada keputusan, aturan, dan pembicaraan untuk membahas secara khusus tentang dokter asing. Menurut laporan Kementerian Kesehatan, kita masih akan kekurangan sekitar 160 ribu dokter sampai tahun 2030. Kita kekurangan dokter secara keseluruhan.

Berapa idealnya jumlah dokter di Indonesia?

Idealnya, menurut standar WHO, sebesar 0,4 persen dari populasi. Artinya, empat dokter per 1.000 orang. Jumlah dokter kita masih 250-an ribu.

Sejauh mana pembicaraan di lingkup internal Konsil mengenai hal ini?

Yang dibahas adalah kita mengikuti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang akan berlaku pada 2025. Ada pula kerja sama dengan negara-negara Pasifik serta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kalau kita izinkan mereka (dokter asing) masuk, akan terjadi persaingan. Tentu kami tidak mau kawan-kawan dokter kedodoran. Jadi wacana tentang itu sudah dimunculkan supaya para dokter siap.

Benarkah Konsil sedang menyiapkan regulasi dan menunggu aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja perihal perizinan praktik bagi dokter asing?

Kami harus mengikuti semua aturan. Tapi tentu nanti ada aturan penjelasannya. Nanti juga akan dibahas secara bertahap dengan melibatkan semua *stakeholder*, seperti kolegium dan organisasi profesi, misalnya IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Sebelum sampai ke situ, KKI akan mengeluarkan peraturan Konsil. Selama ini, kami mengacu pada Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Undang-Undang Praktik Kedokteran dibuat pada 2004, tentu suasananya sekarang sudah berbeda.

Apa saja yang akan diatur dalam peraturan Konsil yang baru?

Antara lain adaptasi dokter spesialis warga negara Indonesia. Banyak dokter Indonesia, seperti saya, lulus spesialisasi dari luar negeri dan ingin mengabdi kembali di Indonesia. Tapi dia harus mengikuti program adaptasi di rumah-rumah sakit pendidikan yang menempel pada universitas. Mereka tidak dibayar selama adaptasi. Nanti, dengan aturan yang baru, adaptasinya bisa dilakukan di pusat-pusat layanan kesehatan masyarakat. Bisa ditugasi ke daerah, jadi tidak harus di Ibu Kota dan kota-kota besar. Ini untuk kepentingan rakyat, apalagi di saat pandemi seperti sekarang. Kementerian Kesehatan juga akan membayarkan honor seperti standar dokter spesialis.

Berapa dokter Indonesia di luar negeri yang ingin kembali ke Tanah Air?

Ada ratusan dokter. Sebetulnya dokter-dokter di luar negeri, seperti saya, lebih senang di sana karena lebih dihargai. Mereka sudah belajar cukup lama, punya lisensi dari luar negeri dan pengalaman, lalu mau kembali ke sini untuk mengabdi. Mungkin ada jiwa nasionalismenya. Mereka juga ingin dilegalkan.

Seberapa penting rencana mempermudah izin bagi dokter berkewarganegaraan asing berpraktik di Indonesia?

Ini sebuah keharusan. MEA sudah ditandatangani. Jadi kita harus mengikutinya. Kalau tidak, kita akan dikenai sanksi. Tapi masih ada waktu untuk mempersiapkan diri.

Menurut Kementerian Kesehatan, Indonesia kehilangan devisa hingga Rp 100 triliun karena banyak masyarakat berobat ke luar negeri. Apakah alasan ini yang mendasari rencana mempermudah izin praktik dokter asing?

Saya kira ke depan bukan hanya ekonomi yang menjadi patokan kami. Tapi yang paling utama adalah cita-cita kami agar dokter dan dokter gigi Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Para dokter Indonesia secara prinsip sebetulnya sudah sangat berkualitas, punya keterampilan luar biasa, memiliki empati, dan memahami aspek sosial-budaya masyarakat. Saya juga sebagai seorang dokter Indonesia tidak mau kawan-kawan mengalami masalah kalau perdagangan bebas ini sudah dibuka dari segi barang dan jasa. Jadi kami ingin tetap ada aspek perlindungan untuk dokter sekaligus masyarakat Indonesia karena dokter bagian dari masyarakat.

Anda telah bertahun-tahun menjadi dokter di Amerika Serikat. Apa yang membuat banyak pasien Indonesia memilih berobat ke luar negeri?

Saya kira ada faktor subyektif dari pasien. Hak dia mau berobat ke dokter siapa. Tentu kalau mau berobat ke luar negeri itu umumnya orang yang mampu. Berobat ke Singapura, Malaysia, Jepang, atau Amerika Serikat harganya pasti lebih mahal. Jadi faktor pertama tergantung kemampuan finansial pasien. Lalu ada faktor psikologis. Pasien-pasien ini mungkin lebih nyaman ditangani dokter di luar negeri dan itu sangat subyektif. Kita enggak bisa mengukurnya.

Apakah para pasien Indonesia tersebut menganggap kualitas dokter di negara lain lebih baik sehingga memilih berobat ke luar negeri?

Saya sangat percaya bahwa kualitas dokter kita bagus. Dokter kita mau belajar. Kalau model lama, perlu tujuh tahun untuk jadi dokter. Empat tahun pendidikan praklinis, kemudian dua-tiga tahun pendidikan koas. Lalu ada pendidikan intensif satu tahun. Jadi cukup lama. Kalau melihat kualitas dalam konteks itu, tentu mereka sudah belajar pengetahuan, keterampilan, dan sikap berinteraksi dengan pasien. Belum lagi nanti keahlian tambahan, keahlian spesialis. Kita sudah memiliki ahli-ahli yang luar biasa. Saya melihat kualitas individu dokter Indonesia tidak perlu diragukan. Bahkan banyak dokter Indonesia berpraktik di beberapa negara, seperti Singapura dan Malaysia, atau di California seperti saya.



Ketua Konsil Kedokteran Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, PhD di Kantor Puslitbangkes Kemenkes, Jakarta, Rabu, 11 November 2020./TEMPO/M Taufan Rengganis

Bagaimana Anda menilai kualitas pelayanan dokter di Indonesia?

Dokter di Amerika, misalnya, lebih banyak dihitung dalam proses pembayarannya berdasarkan waktu, yaitu per jam, bukan per pasien. Dalam konteks itu, mereka bisa punya waktu lebih panjang untuk berinteraksi dengan pasien dan itu dihitung sebagai remunerasi atau honor. Kalau di Indonesia dihitung per pasien sehingga dokter-dokter kita mungkin pasiennya banyak lalu menanganinya cepat-cepat. Mungkin itu jadi faktor juga. Kami sedang mengeksplorasi apa sebetulnya masalahnya.

Dalam kurun sampai 2025, apakah kualitas dokter Indonesia bisa digenjot agar mampu berkompetisi dengan dokter asing?

Saya yakin dokter Indonesia memiliki kemampuan luar biasa dalam konteks pengetahuan dan beradaptasi. Yang penting kawan-kawan dokter minimal sadar ada tantangan seperti itu. Tentu diharapkan nanti organisasi profesi, kolegium, universitas, dan institusi pendidikan menyiapkan para dokter untuk berkompetisi secara bebas karena ini sudah menjadi kesepakatan bangsa kita dengan bangsa lain.

Apakah masih banyak dokter di Indonesia yang resistan terhadap rencana pemerintah mempermudah izin praktik bagi dokter asing?

Ini kan baru wacana. Seperti halnya kita belum menghadapi sesuatu, misalnya, mau ikut ujian kan cemas. Ini semacam ujian juga. Ada yang lulus, ada yang tidak. Jadi saya kira bukan resistan. Mereka masih waswas, kita semua masih waswas.

Kapan dokter asing bisa mulai berpraktik di Indonesia?

Itu tergantung sekali dengan kondisi Indonesia. Selama ini, ada beberapa dokter asing yang melakukan praktik di Indonesia secara sementara. Mereka menggunakan surat tanda registrasi sementara. Gunanya untuk transfer pengetahuan. Contohnya, ada seorang dokter dari Jerman atau Eropa mau praktik di Indonesia selama beberapa bulan. Mereka harus mendapatkan surat izin praktik dulu. KKI memberikan surat tanda registrasi sementara. Masa berlakunya ada yang satu bulan atau tiga bulan, tergantung kebutuhan. Tapi dokter-dokter asing ini menempel pada universitas karena tujuannya untuk transfer pengetahuan dan keterampilan. Tapi kalau praktik secara legal, di luar buka papan praktik, belum ada.

Dalam rencana revisi Undang-Undang Praktik Kedokteran, sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat ingin uji kompetensi dokter dan dokter gigi dipermudah. Apakah hal itu memungkinkan?

Saya kira bukan dipermudah. Contohnya, sekarang ada 2.000-an dokter yang belum lulus uji kompetensi. Ada beberapa kasus dokter yang ujian berkali-kali. Kenapa tidak lulus? Apakah karena dokter tersebut tidak belajar ataukah ujiannya yang terlalu susah atau ada faktor lain? Sebetulnya uji kompetensi itu tetap perlu ada untuk membuat dokter tetap mempertahankan kemampuannya. Tapi sistemnya yang diperbaiki. Sekarang tinggal mencari apa masalahnya.

Untuk bersaing dengan dokter asing, bukankah seharusnya uji kompetensi justru diperketat sesuai dengan standar internasional?

Uji kompetensi dalam bentuk uji tulis itu kan pengetahuan. Tapi ada faktor lain yang kita butuhkan, yaitu keterampilan. Ada juga sikap, etika, empati. Jadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan pasien. Dalam konteks empati, apalagi budaya, kemungkinan dokter asing akan kalah. Itu keunggulan dokter Indonesia yang bersinggungan dengan pasien dalam waktu lama. Saya kira kita tidak perlu takut (terhadap dokter asing). Yang terpenting adalah kita atur ujian kompetensi itu bisa membuat keterampilan dokter bisa bagus. Sekarang fakta yang sangat nyata adalah kita masih kekurangan dokter. Apalagi dokter spesialis.

Anda memiliki pengalaman praktik sebagai dokter di California, Amerika Serikat. Bagaimana uji kompetensi dokter di sana?

Di Amerika Serikat, orang dari negara mana pun bisa berpraktik dan menjadi dokter. Amerika telah membuka diri untuk menerima dokter asing sejak puluhan tahun lalu. Itu salah satu faktor untuk membuat Amerika tidak kekurangan dokter. Tapi semua dokter harus ikut
seleksi United States Medical Licensing Examination (US MLE). Itu sebetulnya

uji kompetensi. Lalu ada yang namanya *continuing medical education* atau pendidikan kedokteran berkelanjutan.

Apa saja yang diujikan dalam US MLE?

Ada tiga level. Ada ujian pengetahuan dasar, tentang biomolekuler, dan sebagainya. Lalu ada ujian dalam bentuk yang sangat spesifik tentang *skill* rumah sakit. Ketiga, ujian pasien. Setelah lulus, dokter bisa bertugas di rumah sakit. Dokter itu sudah mendapat residensi dan bisa langsung ke bagian anak, penyakit dalam, penyakit jantung, dan sebagainya.

Siapa yang menentukan rumah sakit tempat residensi dokter tersebut?

Dokternya sendiri. Dia dibayar, *lho*. Lumayan bayarannya, sekitar US$ 7.000 per bulan. Kalau dirupiahkan kan lumayan. Itu baru dokter residen. Mereka sudah dianggap dokter, sudah dikasih lisensi untuk menangani pasien. Itu bisa dari mana pun, termasuk Indonesia. Banyak dokter Indonesia di Amerika.

IDI dan sejumlah asosiasi profesi kedokteran menggugat Presiden Joko Widodo dan Menteri Terawan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan meminta surat keputusan pengangkatan anggota KKI dibatalkan. Tanggapan Anda?

Intinya kami sebagai orang yang ditugaskan, dilantik, disumpah, disahkan, kami ikhlas bekerja. Kami siap menjalankan tugas. Tapi apa yang terjadi setelah itu, berdasarkan keputusan negara, kami juga akan *legowo* menerima keputusannya. Secara prinsip, kami menghargai sumpah yang telah kami ucapkan di depan Presiden dan akan kami maksimalkan. Bayangkan dalam waktu dua bulan ini kami kerja keras. Saya menandatangani 22 ribu surat tanda registrasi untuk izin membuka praktik bagi dokter.

Sejak anggota KKI dilantik pada 11 Agustus lalu, IDI dan asosiasi profesi kedokteran sudah menyatakan penolakan. Anda pernah menjalin komunikasi dengan mereka?

Kami mengusahakan. Dalam setiap kesempatan, kami mengundang mereka. Kami sudah berkomunikasi.

Bagaimana tanggapan mereka?

Mereka mengatakan bahwa dalam pihak mereka tidak merasa terwakili (di KKI). Jadi tetap menuntut itu. Kalau saya kan perwakilan dari Kementerian Kesehatan.

Bukankah anggota KKI sudah termasuk perwakilan semua organisasi profesi kedokteran?

Ini ada aspek politis juga mungkin. Karena sifatnya demikian, kami, 17 anggota KKI, sepakat untuk kasus ini yang menanggapi adalah Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Putu Moda Arsana.

TARUNA IKRAR

• **Tempat dan tanggal lahir:** Makassar, 15 April 1969 • **Pendidikan:** Sarjana Sains Universitas Hasanuddin, Makassar (1994); Dokter dari Universitas Hasanuddin, Makassar (1997); Magister Ilmu Biomedik, Spesialisasi Farmakologi, Universitas Indonesia (2003); PhD bidang Ilmu Biomedik, Niigata University, Jepang (2008); Postdoktoral di Departemen Neurosains, University of California, Amerika Serikat (2010) • **Karier:** Adjunct Professor di Departemen Neurologi, Universitas Hasanuddin (sejak 2016); Dokter dan Staf Ahli RSPAD Gatot Soebroto dan Cell Cure Center (sejak 2017); Dekan dan Profesor Ilmu Biomedik, International School of Biomedical Sciences, Pacific Health Sciences University (sejak 2017); Peneliti Vaksin Ilmiah dan Klinis Aivita Biomedical Inc (sejak 2017); Pendiri dan Chief Scientific Officer Human Immortality LLC (sejak 2018); Ketua Konsil Kedokteran (2020-2025) • **Organisasi:** Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (2000-2003), Anggota Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (2016-2022)

Anda masuk KKI atas rekomendasi Menteri Terawan. Bagaimana ceritanya Anda mendapatkan rekomendasi itu?

Sebetulnya secara fungsional saya konsultan Menteri Kesehatan. Saya konsultan untuk bidang penelitian, teknologi kesehatan, dan globalisasi. Kalau di RSPAD Gatot Soebroto, saya staf ahli beliau. Itu jabatan fungsional.

Sejak kapan Anda menjadi konsultan Menteri Terawan?

Sejak beliau dilantik, Menteri Kesehatan meminta saya untuk membantunya. Dengan demikian wajarlah saya mewakili beliau.

Bagaimana dengan posisi Anda sebagai staf ahli di RSPAD Gatot Soebroto?

Beliau yang menghubungi saya langsung. Beliau meminta saya membantu Kementerian Kesehatan. Ternyata bantuan itu yang paling utama diarahkan untuk membantu di KKI. Karena itu, saya mewakili Kementerian Kesehatan di KKI.

Sejak kapan Anda mengenal Menteri Terawan?

Saya jadi staf ahli beliau sejak 2017. Mungkin salah satu alasan beliau menarik saya karena saya pakar di bidang neurosains. Saya sudah belajar dan menggeluti riset di bidang itu selama puluhan tahun. Beliau saat itu sedang mengembangkan Cell Cure Center di RSPAD. Ternyata spesifikasi keilmuan saya ke arah sana. Jadi cocoklah.

Konsil Kedokteran Indonesia KKI Dokter Terawan Agus Putranto Kementerian Kesehatan

Angka Kasus Positif Masih Tinggi

HINGGA Jumat, 13 November lalu, terdapat 53.174.182 kasus positif Covid-19 di seluruh dunia. Rata-rata tingkat kesembuhan di dunia adalah 70,1 persen dari 37.266.755 pasien. Data juga menunjukkan sebanyak 1.300.800 orang meninggal karena virus *corona*.

Adapun di Indonesia tercatat sebanyak 457.735 kasus positif Covid-19. Sedangkan kasus sembuh sebanyak 385.094 dan meninggal 15.037. Jika dibandingkan dengan kasus aktif dunia, Indonesia masih berada di level 12,58 persen atau 57.604 kasus. Dalam daftar peringkat kasus di dunia, Indonesia menempati urutan ke-21. Berikut ini sepuluh negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di dunia.



1. Amerika Serikat
Total Kasus: 10.873.936
Kasus Aktif: 3.897.231
Meninggal: 248.585
Sembuh: 6.728.120

2. India
Total Kasus: 8.729.190
Kasus Aktif: 484.888
Meninggal: 128.722
Sembuh: 8.115.580

3. Brasil
Total Kasus: 5.783.647
Kasus Aktif: 362.548
Meninggal: 164.332
Sembuh: 5.256.767

4. Prancis
Total Kasus: 1.898.710
Kasus Aktif: 1.720.796
Meninggal: 42.960
Sembuh: 134.954

5. Rusia
Total Kasus: 1.880.551
Kasus Aktif: 441.205
Meninggal: 32.443
Sembuh: 1.406.903

6. Spanyol
Total Kasus: 1.484.868
Kasus Aktif: -
Meninggal: 40.461
Sembuh: -

7. Inggris Raya
Total Kasus: 1.290.195
Kasus Aktif : -
Meninggal: 50.928
Sembuh: -

8. Argentina
Total Kasus: 1.284.519
Kasus Aktif: 149.557
Meninggal: 34.782
Sembuh: 1.100.180

9. Kolombia
Total Kasus: 1.174.012
Kasus Aktif: 58.830
Meninggal: 33.491
Sembuh: 1.081.691

10. Italia
Total Kasus: 1.066.401
Kasus Aktif: 635.054
Meninggal: 43.589
Sembuh: 387.758

Berebut Pasar Imunisasi

SALAH satu cara menanggulangi pandemi Covid-19 adalah menggunakan vaksin. Guna mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, paling tidak 70 persen dari total populasi Indonesia harus mendapat imunisasi. Pemerintah berencana memberikan vaksin kepada 160 juta penduduk dengan asumsi untuk setiap orang dibutuhkan dua dosis vaksin. Dengan kata lain, kebutuhan vaksin untuk 160 juta orang sebanyak 320 juta dosis. Berikut ini empat produsen yang berencana memproduksi vaksin Covid-19.

PT Bio Farma (Persero)



Negara: Indonesia
Berdiri: 1890

- Kapasitas produksi vaksin: **3,2** miliar dosis per tahun
- Kapasitas produksi vaksin Covid-19: 100 juta dosis dan 250 juta pada 2020
- Pasar: **140** negara

Pfizer Biopharmaceuticals Group



Negara: Amerika Serikat
Berdiri: 1849

- Kapasitas produksi vaksin: **20** miliar dosis per tahun
- Kapasitas produksi vaksin Covid-19: **1,3** miliar dosis pada 2021

Sinovac Biotech Ltd



Negara: Cina
Berdiri: 1999

- Bekerja sama dengan Indonesia memproduksi vaksin Covid-19
- Kapasitas produksi vaksin Covid-19: 610 juta dosis pada 2020 dan **1,2** miliar pada 2021

China National Pharmaceutical Group Co Ltd atau Sinopharm



Negara: Cina
Berdiri: 1999

- Kapasitas produksi vaksin Covid-19: **1** miliar dosis pada 2021
- Pengembangan vaksin Covid-19 memasuki tahap ketiga

AstraZeneca PLC



Negara: Inggris
Berdiri: 1999

- Kapasitas produksi vaksin Covid-19: 700 juta dosis pada 2020 dan **2** miliar pada 2021

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Perkembangan Pembuatan Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi di Indonesia



Petugas kesehatan melakukan simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tapos, Depok, Jawa Barat, pada Kamis, 22 Oktober 2020. Tempo/M. Taufan Rengganis

PEMERINTAH membuka peluang penggunaan vaksin dari produsen dunia untuk program vaksinasi Covid-19. Sampai saat ini masih dilakukan uji klinis tahap ketiga pengembangan vaksin Sinovac dan Sinopharm asal Cina untuk memenuhi kebutuhan imunisasi di Tanah Air. “Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia terbuka terhadap kandidat vaksin yang cocok dan efektif. Namun harus tetap mempertimbangkan aspek pendukung, aspek kandidat vaksin tersebut,” kata juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, akhir pekan lalu.

Negara-negara maju di dunia saat ini sedang berlomba melakukan uji klinis vaksin Covid-19. Menurut kabar terbaru, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Pfizer, yang bekerja sama dengan BioNTech, mengklaim menemukan bibit penyakit yang dilemahkan untuk virus *corona*. Vaksin itu juga disebut-sebut efektif mengurangi gejala Covid-19 hingga 90 persen.

BioNTech dan Pfizer mengumumkan uji klinis yang diikuti sebanyak 43 ribu relawan dan kurang dari 10 persen di antaranya terkonfirmasi positif Covid-19.

Wiku mengatakan penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, juga lembaga internasional. Kolaborasi ini akan makin meningkatkan efektivitas penanganan wabah *corona* di Indonesia.

Menurut Wiku, pemerintah mengikuti perkembangan uji klinis vaksin di berbagai negara. Termasuk temuan di Brasil belum lama ini. “Menjadi masukan dan evaluasi terhadap pengembangan vaksin yang dilakukan di dalam negeri. Saat ini kandidat vaksin Covid-19 sedang dalam tahap uji klinis fase ketiga,” ujarnya.

Dia menjelaskan, vaksin baru dapat digunakan setelah lolos uji klinis fase ketiga. “Dan memperoleh *emergency use authorization* dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ucap Wiku.

Ahli epidemiologi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Windhu Purnomo, mengatakan pemerintah perlu membuat kajian secara tuntas apabila berencana membeli vaksin dari Pfizer. Meski vaksin itu diklaim memiliki efektivitas 90 persen, menurut dia, data keamanannya belum diketahui. Selain itu, pemerintah perlu memastikan pengujian dilakukan pada populasi yang sama dengan penduduk Indonesia.

Adapun uji klinis tahap ketiga calon vaksin Sinovac telah selesai dilakukan terhadap 1.620 relawan di Bandung, Jawa Barat. Penyuntikan dilakukan dua kali dalam rentang dua pekan, sejak Agustus hingga awal pekan November 2020.

Sebanyak 19 relawan keluar (*drop out*) karena alasan pindah tugas atau pekerjaan ke luar Bandung. Kejadian ini sudah masuk perhitungan tim dan tidak mempengaruhi jumlah sampel uji klinis.

Tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, akan menyiapkan laporan perdana uji klinis vaksin Sinovac. Pembuatan laporan itu melibatkan tim khusus yang bekerja tertutup demi menjaga kerahasiaan data dan identitas relawan. Laporan tersebut akan disampaikan ke BPOM pada akhir Desember nanti.

Manajer tim riset, Eddy Fadlyana, mengatakan pembuatan laporan perdana uji klinis ke pemerintah dan PT Bio Farma berlangsung pada November-Desember 2020. “Data laporan itu akan dipakai BPOM untuk mengambil keputusan soal pemakaian vaksin Sinovac,” tuturnya kepada *Tempo*.

Eddy mengatakan ketentuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, dua bulan seusai imunisasi uji klinis calon vaksin, hasilnya sudah bisa dinilai otoritas negara. Jika proses lancar dan vaksin terbukti aman serta ampuh menangkal

Covid-19, pada Januari 2021 sudah bisa digelar imunisasi massal. Rencana itu, menurut Eddy, tetap harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian.

Juru bicara tim uji klinis fase ketiga vaksin Covid-19 dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rodman Tarigan, menyatakan uji klinis vaksin Covid-19 produksi Sinovac masih berlangsung aman. “Sejauh ini belum ada laporan mengenai kejadian ikutan pascaimunisasi yang serius alias *serious adverse event*,” ucapnya.

Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM Togi Junice Hutadjulu mengatakan BPOM dapat menerbitkan persetujuan darurat meski kandidat vaksin belum lulus uji klinis tahap akhir. Persetujuan darurat itu hanya memerlukan hasil uji klinis fase pertama dan kedua untuk melihat aspek keamanan vaksin.

Sedangkan aspek efikasi atau efektivitas kekebalan bisa berbasis pada laporan sementara atau *interim report* uji klinis fase ketiga. “Dalam uji klinis fase pertama dan kedua sudah dapat ditunjukkan khasiat dan keamanannya, dengan dosis yang tepat diberikan kepada pasien. Dengan kaidah tersebut, kami bisa memberikan persetujuan darurat,” kata Togi.

Walaupun nantinya ada vaksin Covid-19 yang bisa ditemukan dalam waktu dekat, epidemiolog Griffith University, Australia, Dicky Budiman, menyatakan pemerintah harus tetap menjalankan uji klinis fase ketiga bersama Sinovac dan terus meriset vaksin Merah Putih. Hal ini dibutuhkan sebagai opsi ke depan. “Karena vaksin gelombang pertama pasti akan jauh dari efektivitas yang ideal. Jadi yang berikut-berikutnya diikuti dengan efektivitas yang ideal,” tuturnya kepada *Tempo*.

Dia menyebutkan biasanya vaksin generasi pertama mempunyai tingkat efektivitas yang kecil. Untuk mencapai kekebalan kelompok, Dicky menjelaskan, dibutuhkan vaksin dengan angka efektivitas lebih dari 80 persen.

Karena itu, dia mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan vaksin Covid-19 dari salah satu produsen dalam melakukan vaksinasi. “Dengan adanya banyak pilihan vaksin, kita jadi punya banyak pilihan, karena nanti akan diperlukan dalam strategi *herd immunity*,” ujarnya.

ALI NUR YASIN, EKO WAHYUDI, DIKO OKTARA

Kabar Pandemi #JagaJarak #PakaiMasker #CuciTangan

Agar Angka Kasus Positif Lebih Rendah



Tenaga medis melakukan tes usap terhadap warga Gandekan di Gedung Pancasila, Surakarta, Jumat, 16 Oktober 2020. Tempo/Stringer/Bram Selo Agung Mardika

INDONESIA terus berupaya menekan angka kasus aktif Covid-19 agar menurun dibanding rata-rata dunia. Per 12 November 2020, meski terdapat penambahan kasus positif sebanyak 4.173 kasus, angka kasus aktif masih lebih rendah dari rata-rata dunia.

“Jumlah kasus aktif 55.274 atau 12,22 persen, di mana kasus aktif dunia berada di angka 27,60 persen. Jumlah kasus sembuh di Indonesia pada saat ini 382.084 atau 84,5 persen, di mana kasus sembuh dunia menurun, yaitu 69,93 persen,” ujar juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, akhir pekan lalu.

Dia menambahkan, angka kasus meninggal kumulatif sebanyak 14.933 atau 3,3 persen. “Angka kasus meninggal dunia sebesar 2,45 persen,” tuturnya.

Wiku mengajak semua pihak untuk menjadikan data-data yang disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 sebagai acuan dalam mengendalikan virus *corona*. Melalui data kasus positif, angka kesembuhan dan kematian bisa menentukan prioritas penanganan pengendalian penyakit. “Sehingga semua yang sakit menjadi sembuh, tidak ada lagi yang meninggal, dan tidak ada kasus baru lagi,” ucapnya.

Capaian yang baik ini, menurut Wiku, diminta agar tidak membuat semua pihak lengah. Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan berkolaborasi menekan angka kasus aktif. Dia menambahkan, Indonesia bisa belajar dari negara tetangga, seperti Thailand (3,09 persen) dan Singapura (0,09 persen).

Khusus untuk kasus meninggal di Indonesia, kata Wiku, masih dapat terkendali laju penambahan kasusnya. Di negara lain, laju kasus kematian akibat Covid-19 bertambah signifikan dalam waktu singkat.

Masih tingginya angka kasus meninggal ini harus menjadi perhatian semua pihak. Wiku menuturkan Indonesia dapat belajar dari negara-negara yang menekan angka kematiannya. Pemerintah akan terus meningkatkan *testing*, *tracing*, dan *treatment* (3T) untuk menekan angka kematian.

Peningkatan 3T ini merupakan langkah penting untuk memastikan mereka yang positif Covid-19 dan kontak terdekatnya dapat dideteksi secara dini. Hal ini sekaligus dapat memastikan penanganan diberikan lebih cepat sehingga meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian.

“Penting untuk diingat bahwa upaya meningkatkan 3T merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Jika berkaca pada data Satgas Penanganan Covid-19, epidemiolog Universitas Indonesia, Ede Surya, menyatakan apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah tepat. Menurut dia, dalam penanggulangan bencana memang ada beberapa hal yang dilakukan, di antaranya adalah 3T. “Kalau *data testing* sudah benar semua dan tidak ada pelaporan yang belum tercakup,” ucapnya kepada *Tempo*, Jumat, 13 November lalu.

Ede mengatakan, total 446 laboratorium untuk tes yang tersedia sudah sangat baik. Tapi, yang disayangkan, mayoritas laboratorium itu hanya berpusat di DKI Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, ia berharap fasilitas laboratorium disebar lebih merata di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan tes *polymerase chain reaction* di wilayah lain.

Adapun dalam rerata harian tujuh hari terakhir per 13 November 2020, spesimen yang berhasil didapat mencapai 37.872 dan orang yang diperiksa pun telah mencapai 31.260 per hari. Capaian tersebut telah melampaui target pemerintah, yakni 30 ribu per hari. Sementara itu, *positivity rate* dalam periode yang sama tercatat sebesar 14,09 persen atau 4.023.

Dia menyarankan beberapa wilayah melaporkan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan baik. Sebab, ia menduga, masih ada beberapa daerah yang tak

melaporkan kasus positif Covid-19. “Jika ada yang tak baik, perbaiki *bareng-bareng*,” ucap Ede.

Dengan angka kematian yang masih tinggi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai orang yang meninggal karena terjangkit Covid-19 merupakan pahlawan bagi bangsa Indonesia. “Mereka semua adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia, sebagai bagian perjalanan dan pergelutan untuk memenangi pertempuran melawan pandemi Covid-19,” ujarnya dalam peringatan Hari Pahlawan.

Bagi mereka yang sedang menghadapi Covid-19, Sri Mulyani juga berdoa agar dapat dipulihkan dan bisa beraktivitas kembali dan berjuang menangani pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi ini telah mengancam semua orang dan perekonomian serta bangsa.

ALI NUR YASIN, EKO WAHYUDI

Kabar Pandemi #JagaJarak #PakaiMasker #CuciTangan

Bukti Musik Membuat Senang



Ilustrasi mendengarkan musik./Shutterstock

- **Peneliti Prancis memberi bukti ilmiah baru tentang rasa senang saat mendengarkan musik dengan neuroscience. .**
- **Penelitian ini masih sebatas memeriksa aktivitas gelombang otak saat seseorang senang mendengarkan musik. 21657**
- **Terapi musik selama ini dipakai untuk membantu pemulihan pasien kasus-kasus saraf, seperti stroke. .**

MUSIK sudah lama dikenal sebagai medium relaksasi dan sumber kesenangan. Daya tarik inilah yang membuat banyak orang rela merogoh kocek untuk menonton konser meski berbiaya mahal. Penelitian terbaru yang dilakukan Thibault Chabin dan tim peneliti dari Université de Bourgogne di Dijon, Prancis, memberi bukti ilmiah baru tentang bagaimana rasa senang saat mendengarkan musik bisa dideteksi melalui aktivitas di otak dengan pendekatan *neuroscience*.

Penelitian Chabin berjudul "Cortical Patterns of Pleasurable Musical Chills Revealed by High-Density EEG" diterbitkan jurnal *Frontiers in Neuroscience* edisi 3 November lalu. Menurut Margaretha, pengajar Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, penelitian Chabin ini adalah dukungan empiris ilmiah atas sesuatu yang sudah biasa dilakukan. "Kita tahu bahwa mendengarkan musik membuat nyaman dan merasa lebih rileks. Penelitian ini memberikan penjelasan ilmiahnya," kata Margaretha, Rabu, 12 November lalu.

Penelitian Chabin dilakukan terhadap 11 perempuan dan 7 laki-laki, yang direkrut melalui poster di kampus dan rumah sakit universitas. Mereka diminta mendengarkan musik kesukaannya. Mereka dipasangi Elektroensefalografi (EEG)—alat perekam aktivitas listrik di seluruh kulit kepala—dengan menempelkan elektrode di kepalanya. Mereka juga mengisi kuesioner dan diminta menunjukkan kapan mereka mengalami rasa senang. "Peserta penelitian kami mampu secara tepat menunjukkan momen-momen 'yang membuat merinding' dalam lagu," kata Chabin, seperti dikutip *Eureka Alert,* 3 November lalu.

Ketika peserta mengalami kesenangan itu, Chabin melihat aktivitas listrik spesifik di korteks orbitofrontal—wilayah yang terlibat dalam pemrosesan emosi, area motorik tambahan, dan lobus temporal kanan—wilayah di sisi kanan otak yang terlibat dalam pemrosesan pendengaran dan apresiasi musik. Daerah ini bekerja sama untuk memproses musik, memicu sistem penghargaan otak, dan melepaskan dopamin—hormon yang dihasilkan ketika seseorang senang.

Menurut Fitri Oktaviani, pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sebelumnya pemeriksaan fungsional otak banyak dilakukan dengan pencitraan resonansi magnetik fungsional (fMRI) atau pemindai *positron emission tomography* (PET *scan*). Penelitian Chabin ini dinilai baru karena melihat kegiatan fungsional otak dengan EEG. Kalau MRI melihat otak berdasarkan pencitraan, EEG didasari aktivitas listrik di otak. "Pemeriksaannya lebih murah dari segi biaya, mungkin lebih rumit pengolahan datanya dibanding fungsional MRI," kata Fitri.

Adapun Amanda Tiksnadi dari Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menunjukkan perbedaan metode fMRI dengan EEG. Kalau fMRI melihat struktur bangunan otak, EEG melihat pancaran atau gelombang otak. MRI digunakan untuk melihat bangunan otak, misalnya, untuk mendeteksi kemungkinan adanya tumor, penyumbatan, dan masalah fisik lainnya di otak.

Menurut Margaretha, ada cara lain untuk melihat aktivitas otak, apakah seseorang senang atau tidak saat mendengarkan musik, selain dengan metode EEG ini, yaitu dengan melihat neurokimia yang diproduksi otak. "Kalau kurang dopamin, itu tanda orang sedih. Kalau diproduksi lebih banyak, orang itu lagi senang. Jika dia memproduksi serotonin, saat merasa lebih rileks atau lebih bahagia," ucapnya.

Penelitian Chabin ini, Amanda menambahkan, membuktikan ada aktivitas tertentu di otak saat seseorang senang. "Biasanya kita mendengarkan musik, tahunya senang, *mood* bagus, kerja lebih bagus. Sebelumnya, kita hanya tahu dari

pengamatan saja, tidak mempunyai bukti secara ilmiah. Jadi, hasil penelitian ini bisa meyakinkan bahwa hal tersebut bukan terjadi secara kebetulan. Ternyata, kalau mendengarkan musik, ada area otak yang teraktivasi," ujarnya.

Margaretha menambahkan, musik yang membuat senang memang bisa berbeda-beda pada tiap orang. Ia mengutip penelitian Tom ter Bogt dan tim dari University of Utrecht, Belanda, pada 2010 lalu. Jenis musik yang akan dinikmati akan berbeda-beda pada tiap orang. "Mungkin musik tertentu saya lebih senang, tapi mendengarkan musik yang lain bisa tambah stres," tuturnya. Ada sejumlah faktor dari komponen musik yang membuat pikiran lebih rileks, yaitu lirik, nada, dan tempo. "Mendengarkan Bruno Mars dan Hetty Koes Endang tentu berbeda."

Memang ada anggapan umum bahwa mendengarkan musik dengan nada lambat bisa membuat seseorang rileks. "Kebanyakan mungkin seperti itu. Tapi faktor kepribadian sangat berperan. Bagi orang yang hipersensitif, jangankan mendengarkan *rock*, *country* saja sudah berisik *banget*. Tapi kalau orang yang hiposensitif, mungkin butuhnya *hardcore*," ucap Margaretha.

Margaretha juga mengutip Tom ter Bogt yang menyatakan bahwa musik, selain bisa memperbaiki dan mengubah suasana hati, bisa mengidentifikasi kepribadian. "Ada beberapa orang yang menggunakannya sebagai identitas. Anak *punk*, anak *jazz*, dan anak dangdut kan beda gayanya," ujarnya.

Selama ini musik juga memang sudah dikenal sebagai alat atau pendukung terapi. Menurut Margaretha, Rumah Sakit Jiwa Malang adalah salah satu yang menggunakannya. Para penderita skizofrenia dengan gejala mental berat biasanya diberi obat dan musik membuatnya cepat tidur. Musik menenangkan otak tapi tidak membantu beraktivitas. Inilah yang difasilitasi rumah sakit dengan musik dengan cara karaoke dan joget bersama. "Itu dipakai untuk membantu pasiennya beraktivitas dan membangun interaksi sosial," tuturnya.

Musik juga dipakai untuk membantu anak autis di bawah umur untuk melakukan interaksi komunikasi sosial. Selain mendapatkan sesi terapi satu-satu, anak autis pasti akan diterapi secara kelompok. Anak autis, meski berkelompok, cenderung bermain sendiri-sendiri sehingga perlu difasilitasi dengan musik, joget *bareng*, bergerak dengan cara yang sama, serta tepuk tangan dengan teman-temannya. "Musik menjadi cara untuk membangun interaksi sosial," ucap Margaretha.

Margaretha, yang kini menempuh pendidikan doktor di University of Melbourne, Australia, mengatakan kampusnya juga menerapkan terapi musik untuk membantu mencegah penurunan lebih cepat pada penderita alzeimer. "Menyanyi,

memproduksi musik, bermain alat musik, itu kan mengaktivasi otak. Ada bagian otak yang bekerja dan itu semacam latihan. Sel saraf yang terus-menerus aktif bisa menjadi lebih rendah kemungkinannya untuk cepat aus," ucapnya.

Amanda juga menggunakan metode terapi musik untuk mengaktivasi atau membantu pemulihan pasien kasus-kasus saraf, seperti *stroke*, Parkinson, gangguan konsentrasi, autisme, dan semacamnya. Melalui *brand* bernama Neurology Music Therapy, dia memanfaatkan irama musik untuk membantu pasiennya. Lebih dulu ia mengenali masalah khusus pasiennya. Misalnya ada pasien stroke yang jalannya terlalu lamban. Ia akan menggunakan musik dengan irama dan kecepatan tertentu dari jenis musik apa pun. "Yang digunakan ketukannya. Saat pasien berjalan, kayak dia dapat kode. Akhirnya ia bisa berjalan sesuai dengan irama," ujarnya.

Penelitian Chabin, menurut Fitri Oktaviani, memang masih sebatas memeriksa aktivitas gelombang otak saat seseorang dalam keadaan senang mendengarkan musik. "Apakah musik menyebabkan memori meningkat? Itu tidak dijelaskan dalam studi ini," ucap Fitri. Chabin pun mengatakan akan ada penelitian lanjutan. "Kenikmatan musik adalah fenomena yang sangat menarik yang patut untuk diteliti lebih lanjut, untuk memahami mengapa musik bermanfaat dan mengapa musik penting dalam kehidupan manusia," tuturnya.

Bagi Margaretha, ada hal praktis dari penelitian ini yang bisa dipakai secara personal. Caranya, kenali jenis musik yang membuat kita senang dan mendengarkannya ketika sedang membutuhkannya, entah pada saat stres atau tidak nyaman. "Ketika kita mendengar musik yang kita sukai selama beberapa waktu, dampaknya akan mengubah suasana hati kita, membuat kita lebih rileks, dan ini sudah teruji secara empiris oleh penelitian Chabin tersebut," ucapnya.

E-SPORTS

PADA 9 November lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga membuka secara resmi kompetisi e-Sports *Free Fire* tingkat pelajar. Kompetisi yang diikuti oleh lebih dari 10 ribu tim ini berlangsung selama 9-13 November dan memperebutkan hadiah senilai Rp 500 juta. Atlet olahraga elektronik Indonesia sudah mendunia. Dalam turnamen *Mobile Legends* paling bergengsi di Asia Tenggara, ONE Esports MPL Invitational, yang hanya diikuti 20 tim undangan terbaik, sebanyak delapan tim berasal dari Indonesia. Turnamen semacam ini kerap memperebutkan hadiah fantastis sehingga pendapatan para atletnya bernilai miliaran rupiah. Misalnya atlet Winda "Earl" Lunardi yang tabungannya di Maybank raib senilai Rp 22 miliar.

495 JUTA
PERTUMBUHAN PENONTON E-SPORTS GLOBAL PADA 2020

US$ 400 JUTA NILAI VALUASI TEAM SOLOMID (TSM) DAN CLOUD9 PADA 2020

885

JUMLAH MAJOR EVENT SELAMA 2019 DENGAN PENJUALAN TIKET SEBESAR US$ 56,3 JUTA ATAU SETARA RP 789,9 MILIAR

1.674 JUTA US$ ATAU SETARA DENGAN RP 23,7 TRILIUN, TOTAL HADIAH DARI KOMPETISI GLOBAL SELAMA 2019

1,11 MILIAR US$

ATAU SETARA RP 16,3 TRILIUN, PASAR *E-SPORTS* GLOBAL PADA 2020

2,11 MILIAR US$

ATAU SETARA RP 31 TRILIUN, PREDIKSI PASAR *E-SPORTS* GLOBAL PADA 2023

822,4 JUTA US$

ATAU SETARA RP 11,6 TRILIUN PENGHASILAN *E-SPORTS* GLOBAL PADA 2020 YANG HANYA BERASAL DARI MEDIA RIGHTS DAN SPONSORSHIP



90%

SUMBER PEMASUKAN TIM *E-SPORTS* BERASAL DARI SPONSORSHIP

15 juta US$-35 juta US$

TOTAL HADIAH DARI SETIAP TURNAMEN *E-SPORTS*

105,5 JUTA JAM, RAIHAN PENONTON SIARAN LANGSUNG MELALUI TWITCH DAN YOUTUBE PADA LIGA LEGENDS WORLD CHAMPIONSHIP 2019

4,94 US$ ATAU SETARA RP 70 RIBU, RATA-RATA PENDAPATAN DARI SETIAP PENGGEMAR SECARA GLOBAL PADA 2019

LIMA TIM DENGAN PENDAPATAN TERBESAR DI DUNIA

RP 520 MILIAR, TEAM LIQUID

RP 357 MILIAR, EVIL GENIUSES

RP 494 MILIAR, OG

RP 228 MILIAR, FNATIC

RP 221 MILIAR, VIRTUS PRO

LIMA TIM TERPOPULER DI ASIA TENGGARA

6,3 JUTA PENGGEMAR DIMILIKI OLEH EVOS ESPORTS DARI INDONESIA

5,8 JUTA PENGGEMAR DIMILIKI OLEH AURA ESPORTS DARI INDONESIA

4,1 JUTA PENGGEMAR DIMILIKI OLEH RRQ DARI INDONESIA

2,3 JUTA PENGGEMAR DIMILIKI OLEH BIGETRON ESPORTS DARI INDONESIA

1,2 JUTA PENGGEMAR DIMILIKI OLEH HEAVY DARI VIETNAM

RP 711 MILIAR, JUMLAH PENDANAAN B SERIES YANG DIDAPATKAN OLEH EVOS ESPORTS

RP 294 MILIAR, TARGET PENDAPATAN EVOS ESPORTS PADA 2021

SUMBER: ESCHARTS.COM, NEWZOO.COM, STATISTA.COM

Sistem Pengairan Hidroponik Tanpa Membutuhkan Pompa Listrik



BERKEBUN di rumah dengan lahan yang sempit bisa disiasati dengan pola pertanian hidroponik, yang tidak menggunakan tanah. Tim mahasiswa dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran angkatan 2016 dan 2017 mengenalkan cara baru pertanian hidroponik. Sistem pengairannya, yang dinamakan Smart Watering, bekerja tanpa pompa listrik. Irigasinya mengandalkan gravitasi dan hukum Archimedes. "Prinsip tim kami adalah bertani tanpa *ribet*," ucap salah satu pembuatnya, Diki Abdulah, Ahad, 8 November lalu.

Diki bersama Chaerul Amin, Shilvya Dewi Agustien, Annisa Nurdiah, Salma Waffiyah, serta dosen pembimbing Sophia Dwiratna Nur Perwitasari menggarap Smart Watering sejak Maret lalu. Selain untuk menerapkan ilmu pertanian di bangku kuliah dan laboratorium, mereka ingin mengajak banyak orang menerapkan ketahanan pangan dengan cara yang mudah di rumah sendiri, khususnya bagi generasi milenial.

Umumnya, kata Diki, pertanian hidroponik menggunakan sirkulasi air yang dicampur nutrisi sesuai dengan jenis tanamannya. Kelebihan sistem itu adalah

menghemat air, tapi harus memakai listrik. Setrumnya digunakan untuk pompa yang berfungsi memutar siklus air. Dari kajian anggota tim pada contoh satu kali masa tanam sawi pagoda selama satu bulan, biaya listriknya sekitar Rp 66 ribu.

Beban setrum sebesar itu dari pemakaian pompa sebanyak 45 kilowatt-jam (kWh) dengan tarif Rp 1.467,28 per kWh. Pompa listrik itu berukuran 0,285 ampere, bertegangan 233,58 volt, dan berdaya 66,57 watt. Durasi pemakaian beragam, dari 11 hingga mayoritas selama 24 jam.

Smart Watering mengalirkan air bercampur nutrisi dengan gaya tarik bumi atau gravitasi. Dari tandon atau bak penampungan air, irigasi mengalir lewat slang ke pot-pot kecil khusus untuk hidroponik (*netpot*) yang dikumpulkan dalam suatu wadah (*bucket*). Wadah pot itu diberi penutup untuk menahan penguapan dari air yang menggenang di dalamnya.



Menurut Diki, Smart Watering memodifikasi sistem pertanian hidroponik tanpa listrik yang dikembangkan di luar negeri. "Modifikasi pada komponen-komponennya," ujar mahasiswa tingkat akhir itu. Kunci kepintaran sistem Smart Watering ada pada katup air khusus. Katup itu akan menutup otomatis jika genangan air di dalam *bucket* penuh. Katup akan terbuka kalau air kurang. "Penanda turun-naik air itu dari pelampung," katanya.

Dengan cara itu, pemakai Smart Watering bisa meninggalkan tanaman hidroponiknya sementara waktu jika ada pekerjaan lain misalnya selama satu-dua minggu. Setelah itu, air dan nutrisinya perlu diisi ulang ke tandon. Soal takaran nutrisi dan jumlah air yang dibutuhkan tergantung jenis tanaman. Riset dan pengembangan Smart Watering menggunakan dana hibah dari universitas untuk pra-*startup* dan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia yang digelar pemerintah.

Sesuai dengan tujuan dan misi dari pendanaan hibah, hasil riset tim itu harus menjadi produk yang bisa dijual. Sejak Agustus lalu, Smart Watering telah meluncur 33 unit ke tangan pembelinya di Bandung, Cirebon, hingga Magelang. "Kebanyakan pemesannya ibu-ibu," tutur Diki. Paket kirimannya berisi sebuah tandon air, *bucket*, *netpot*, slang, media tanam, serta nutrisi untuk tanaman hidroponik. Semua komponen itu dirakit sendiri oleh pengguna sesuai dengan buku petunjuk.

Lewat beberapa akun media sosial mereka, tim melepas barangnya dengan harga Rp 750 ribu selama masa promosi. Harga normalnya, kata Diki, kurang dari Rp 1 juta. Sasaran pembelinya kelompok urban, termasuk milenial. Rencana ke depan, mereka akan terus mengembangkan Smart Watering untuk budi daya tanaman hias.

Tanaman hidroponik Penemuan Baru | Inovasi

Debut Joe Taslim di Korea

Aktor Indonesia, Joe Taslim, terlibat dalam film kolosal produksi Korea Selatan. Kembali mengisi peran antagonis.



Hyuk Jang dalam The Swordsman produksi Opus Picture. Imdb

SETELAH paceklik film hampir setahun lamanya, *The Swordsman* datang sebagai pembuka yang menggoda. Penyebabnya tak lain nama aktor Indonesia, Joe Taslim, yang terpampang sebagai salah satu aktor dalam film kolosal arahan sutradara Choi Jae-hoon itu. Joe memang sudah unjuk gigi dalam sejumlah film mancanegara, yakni *Fast & Furious 6* (2013) dan *Star Trek Beyond* (2016). Tapi menjadi *ahjussi*—sebutan untuk paman di Korea Selatan—dalam film kolosal? Jangan-jangan Joe hanya kebagian sekelumit dialog dan *nongol* untuk pamer kemampuan gelut dalam beberapa menit saja?

The Swordsman sebetulnya sudah mulai digarap pada 2017, baik untuk pembacaan naskah maupun pengambilan gambar. Namun jadwal rilisnya tertunda karena terhambat problem keuangan, di samping pandemi Covid-19. Para kru kabarnya kesal lantaran rumah produksi Opus Pictures memprioritaskan pelunasan honor pemain ketimbang mereka. Walhasil, film ini baru tayang di Korea Selatan pada 17 September 2020—sempat masuk lima besar film terlaris. Sementara itu, di Indonesia, *The Swordsman* menjadi pembuka Festival Film Korea-Indonesia (KIFF) 28-31 Oktober lalu di Bandung. Film ini juga menjadi salah satu tontonan perdana di bioskop pada era normal baru.



Hyuk Jang dan Joe Taslim (kanan) beradu akting dalam The Swordsman (Geom Gaek).
koreanfilm.or.kr

Cerita The *Swordsman* (*Geom-gaek*) berkisar pada intrik politik di Korea setelah jatuhnya Raja Gwanghaegun dari Dinasti Joseon pada abad ke-17. Dalam situasi tak menentu, peralihan kekuasaan dinasti Cina dari Ming ke Qing menambah keruwetan di kalangan aristokrat. Para preman berkeliaran di tengah masyarakat, menculik orang sesukanya untuk dijual atau dijadikan budak. Teror itu terus berlangsung karena baik kesatria maupun bangsawan Joseon tak melawannya.

Salah satu pendekar Joseon, Tae Yul (diperankan Jang Hyuk yang karismatik), termasuk yang memilih jalan sunyi. Dia menyepi ke pegunungan bersama putrinya, Tae Ok (Kim Hyun-soo). Namun, di tengah hidup yang adem tenteram itu, tiba-tiba saja penglihatan Tae Yul memburuk. Ta Ok tak tega melihat ayahnya menderita. Dia akhirnya turun gunung mencari obat untuk Tae Yul, dan gara-gara itu justru tersangkut dalam urusan politik kerajaan. Jalan cerita selanjutnya sudah bisa kita tebak. Tae Yul, dengan kondisi mata yang nyaris buta, keluar dari persembunyiannya. Dia memburu geng pendekar Dinasti Qing yang menyekap putrinya, kembali bertarung, dan menebas banyak nyawa.

Bagi Choi Jae-hoon, *The Swordsman* adalah debutnya sebagai sutradara, setelah belasan tahun berkubang di industri ini. Choi sangat rapi dalam urusan ornamen, seperti pakaian dan riasan yang memperkuat karakter setiap tokoh. Ia juga berupaya membuat dialog dan kutipan filosofis yang relevan sampai kapan pun. Misalnya, saat Tae Yul dihadapkan pada pertanyaan tentang nasionalismenya, dia menyebut sang putrilah definisi bangsa buatnya. Bukan picisan, tapi Choi menggariskan bahwa masa depan Korea dan bangsa lain berada di tangan anak muda seperti Tae Ok.



The Swordsman

Alih-alih terbenam di alur cerita, rasa penasaran terhadap film ini justru lebih kepada kapan Joe Taslim muncul. Sementara dalam *Star Trek Beyond* dan *Fast & Furious 6* Joe hanya menjadi pemeran pendukung, tidak demikian di *The Swordsman*. Joe mendapat porsi besar, bahkan menjadi tokoh antagonis utama yang senyum culas dan tatapan matanya membuat geregetan. Dia memerankan Gurutai, jawara dari Kekaisaran Qing yang dicitrakan bengis dan jago beradu pedang.

Gurutai adalah antitesis dari Tae Yul, yang irit omong dan karismatik. Ia flamboyan, doyan membual, dengan gerak-gerik dan ekspresi menjengkelkan. Di belakangnya ada geng beranggota tiga jagoan tangguh yang lebih banyak *nongkrong* di rumah bordil. Ada juga seorang perempuan bule berambut pirang yang hingga akhir film tak jelas apa gunanya. Keberadaannya semacam mengakomodasi stereotipe bahwa perempuan adalah sosok dekoratif di antara para lelaki yang doyan baku hantam. Walau demikian, bila ditengok latar waktunya, peran pacar Gurutai ini bisa jadi lumrah adanya.

Setelah Gurutai muncul, tensi film mulai naik. Dia seperti menyibak satu demi satu karakter tokoh dalam film ini sekaligus membuka peta politik transisi yang penuh gejolak. Namun, sayangnya, plot *The Swordsman* terlalu bersahaja. Jangankan kejutan, kita bahkan tak merasakan ketegangan apa pun dari kecamuk konflik antardinasti ataupun momen penculikan anak para aristokrat. Tak ada juga kisah percintaan yang sendu atau hubungan ayah-anak yang mengharu-biru di sini.

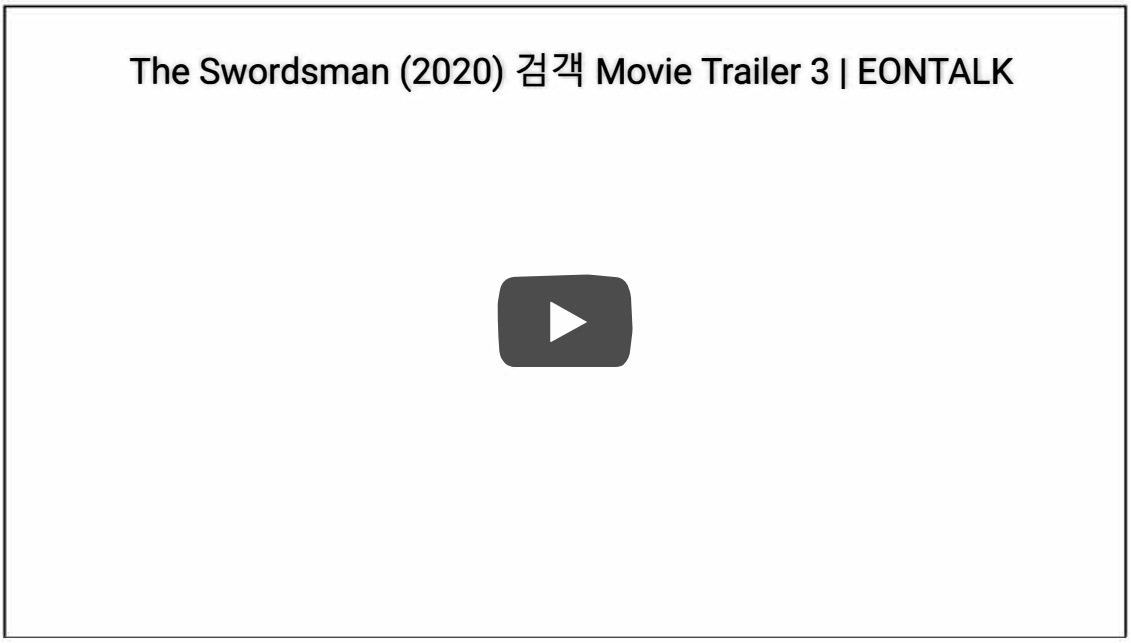
Jadi mari nikmati saja perkelahian di dalamnya yang penuh cipratan darah tapi sekaligus indah. Visualisasi pertarungan dalam *The Swordsman* terasa brutal. Adegan gelut yang intens dua jawara kadang disorot sangat dekat dan mulus sehingga penonton ikut merasakan kengeriannya. Salah satu yang memukau adalah saat Tae Yul beraksi bak ninja dalam menghabisi puluhan prajurit musuh. Dengan pedangnya, Tae Yul menebas gelombang senapan liar dalam perkelahian beberapa menit saja. Epik!

Adegan itu berujung pada duel puncak antara Tae Yul dan Gurutai. Sebagai pamungkas, perkelahian itu sayangnya tak berlangsung lama. Padahal koreografi adu pedang di antara keduanya mendebarkan dengan konflik yang khas: sang pendekar protagonis sempat ambruk sebelum akhirnya balik menghajar si antagonis yang sudah kewalahan. Untuk aksi klimaks ini, Jang Hyuk membuktikan kelasnya sebagai aktor (*Voice, Iris 2*) yang saat bermain dalam film laga tak mau menggunakan pemeran pengganti. Seperti Joe Taslim, Jang Hyuk dulu atlet profesional, tapi di cabang olahraga taekwondo.

Adapun permainan pedang dan kelihaian dalam seni bela diri menjadi kredit bagi Joe Taslim, 39 tahun, di *The Swordsman*. Padahal ini pertama kalinya aktor kelahiran Palembang tersebut berjibaku dengan pedang dalam film. Demikian pula kemampuannya berbicara dalam bahasa Korea lawas yang meyakinkan dan tak pernah tersendat. Demi fasih berbahasa Korea, Joe, yang mengawali kariernya sebagai atlet judo, berlatih selama tiga bulan dan menenteng buku saku bahasa Korea ke mana-mana.

Setelah *The Swordsman*, Joe masih menyimpan proyek film lain yang diproduksi di luar negeri. Rencananya, dia memerankan karakter Sub-Zero dalam film *Mortal Kombat*, yang diadaptasi dari permainan video yang tersohor. Tokoh itu dikisahkan mempunyai kemampuan bela diri yang dahsyat dan bisa mengendalikan es. Sedangkan di dalam negeri, Joe tergabung di waralaba Jagat Sinema Bumilangit sebagai Mandala. Seperti halnya Gurutai, Mandala juga seorang kesatria yang piawai mengayunkan pedang.

ISMA SAVITRI



The Swordsman (Geom-gaek)

Sutradara: Choi Jae-hoon
Produksi: Opus Pictures
Pemain: Jang Hyuk, Joe Taslim, Kim Hyun-soo
Rilis: 28 Oktober 2020

Festival Film Film